

MENGUATNYA POSISI PARTAI OPOSISI DIBALIK
KEMENANGAN GOH CHOK TONG DALAM
PEMILU TAHUN 1991 DI SINGAPURA

SKRIPSI



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Dilajukan Guna memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurnsau Hubungan Internasional
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

S.

Amf	Booklet Perhatian	KLAS
Terima	03 NOV 2000	324 25957
No. Induk	10 238 06 / 2000	NUS
		411

Oleh :

Nugraha Nusantara

950910101010

Pembimbing

Drs. Sjoekroen Sjah, SU

Asisten ;

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2000

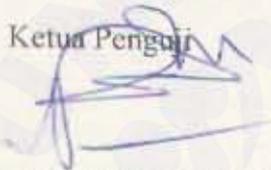
PENGESAHAN

Diterima dan Dipertahankan
Di hadapan Panitia Penguji Skripsi
Guna memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S - 1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2000
Jam : 10.00 WIB.

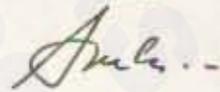
Panitia Penguji

Ketua Penguji



(Drs. Nuruddin M. Yasin)

Sekretaris



(Drs. Sjaekroen Sjah, SU)

Anggota:

1. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA.
2. Drs. A. Habibullah, Msi.



Mengetahui:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dekan



Drs. H. Moch. Toerki

NIP. 130524832

Motto:

“...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...”

Artinya:

- *Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.¹*
- *Berusahalah untuk menyenangkan apa yang seharusnya kamu kerjakan, tetapi janganlah terus menerus mengerjakan apa yang sedang kamu senangi. (Drs. Sutrisno. SH)*

¹ QS. Ar Ra'd, ayat: 11.

Persembahan

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

- Ibunda Tercinta Ruswati dan Ayahanda Tercinta Sutrisno yang telah dengan sabar membesarkan, mendidik, membimbing dan memberikan segala kasih sayang dan cintanya kepadaku.
- Kakak tersayang Wisnu Wicaksono dan Sri Erlianawati yang telah mendorong semangatku di setiap waktu.
- Adinda terkasih Langlang Tata Buana dan Fitra Pinandhita yang selalu memacu diriku agar segera menyelesaikan skripsiku.
- Teknisiku Ely Setyo Astuti yang selalu menemani dan membalut lukaku dalam setiap dukaku.

Semoga aku bisa membalas kebaikan mereka kelak.

Kata Pengantar

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Menguatnya Posisi Partai Oposisi Dibalik Kemenangan Goh Chok Tong Dalam Pemilu Tahun 1991 Di Singapura”**. Penulis mengerjakan skripsi ini dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S – 1) di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pelaksanaan penulisan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Kiranya tanpa bantuan dan bimbingannya, penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Sjoekroen Sjah, SU, selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, yang telah memberi saran, dan koreksi yang sangat membantu bagi penulis.
2. Bapak Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, memberi masukan dan mengorbankan sekian banyak waktunya kepada penulis.
3. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Pra Adi Sulistyono, selaku Dosen Wali penulis.
5. Anak Kostku Agung “Kirno”, Edwan, Reza”Tante”, Bowo, Pak Samsul “Jagawana”, Pak Farid “Mega Mendung”, Ali Topan “Anak Hutan”, Cak Ambar, Agus “Pees”, Novi “Cengir”, Iik “Godul”, Hari “Stevie”, Andik, Masruri “Dot”, Exi dan Gaguk ”Direktur Gong”.

6. Sahabatku Harald, Uwais, Tisna, Teguh, Wahid, Irma, Silfi, Isal, Nanang, HW, Wahyu, dan Hari.
7. Teman-temanku di "Posko KKN", Firda, Ovit, Zainuri, Riska, Rini, Beni, Handis, Dwi dan Emi.
8. Teman-teman HI'95 Nuning, Nunung, Arin, Reni, Bagus, Dewi, Sri, Nana, Eti, Rini, Windi, Fika, Eliza, Vivin, Pungki dan teman-teman lainnya yang tidak bisa kusebutkan semuanya.

Saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini, akan penulis terima dengan senang hati. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang berkepentingan dalam masalah ini, khususnya bagi perkembangan Studi Ilmu Hubungan Internasional.

Jember, Oktober 2000

Penulis.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Lampiran.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2. Ruang Lingkup Pembahasan.....	6
1.3. Permasalahan.....	8
1.4. Kerangka Dasar Teori.....	11
1.5. Hipotesa.....	24
1.6. Metode Penelitian.....	27
1.6.1. Tahap Pengumpulan Data.....	27
1.6.2. Metode Analisa Data.....	28
1.7. Pendekatan.....	30
BAB II MASA KEPEMIMPINAN LEE KUAN YEW (1959-1990) DAN GOH CHOK TONG (1990-1991)	
2.1. Masa Kepemimpinan Lee Kuan Yew (1959-1990).....	32
2.1.1. Pemerintahan Partai Aksi Rakyat (<i>People's Action Party / PAP</i>) di Bawah Lee Kuan Yew.....	35
2.1.2. Awal Pemerintahan Partai Aksi Rakyat.....	37

2.1.3. Dominasi Politik Partai Aksi Rakyat (<i>People's Action Party</i>)	42
2.1.4. Munculnya Partai Oposisi Dalam Parlemen	54
2.2. Masa Kepemimpinan Goh Chok Tong (1990-1991).....	57
2.2.1. Proses Pergantian Pemerintahan	60
2.2.2. Tantangan Kepemimpinan Goh Chok Tong (1990-1991).....	62
BAB III PEMILU TAHUN 1991 DI SINGAPURA	
3.1. Percepatan Pelaksanaan Pemilu	65
3.2. Ketentuan Baru Pemilu	71
3.3. Pemilu Tahun 1991 dan Prosesnya.....	74
3.3.1. Strategi Partai Dalam Pelaksanaan Pemilu	74
3.3.2. Pelaksanaan Pemilu Tahun 1991	85
BAB IV HASIL PEMILU TAHUN 1991 DI SINGAPURA SERTA IMPLIKASINYA BAGI PARTAI OPOSISI DAN PARTAI AKSI RAKYAT	
4.1. Hasil Pemilu Tahun 1991 di Singapura.....	87
4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Pemilu Tahun 1991	98
4.2.1. Keefektifan Strategi Pemilu Partai Oposisi	98
4.2.2. Isu-Isu yang Diangkat Oposisi	99
4.2.3. Kesalahan Strategi Partai Aksi Rakyat (<i>PAP</i>)	105
4.2.4. Faktor yang Menguntungkan Partai Aksi Rakyat (<i>PAP</i>)	108
4.2.5. Perluasan Kelas Menengah dari Generasi Muda di Singapura	112

4.3. Arti Hasil Pemilu Bagi Partai Oposisi	118
4.3.1. Penambahan Kursi Partai Oposisi di Parlemen	118
4.3.2. Membangun Oposisi yang Lebih Kuat dan Hambatannya.....	123
4.4. Implikasi Hasil Pemilu Bagi Partai Aksi Rakyat.....	125
BAB V. KESIMPULAN.....	132
POSTSCRIPT	138
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Perolehan Suara Partai Aksi Rakyat Sejak pemilu Pertama.....	87
2. Perolehan Suara Partai-Partai pada Pemilu 31 Agustus 1991.....	93
3. Persentase Suara PAP dalam Pemilu tahun 1988 dan 1991.....	94
4. Pekerjaan Berdasarkan Jabatan Menurut Sensus Tahun 1957, 1970, dan 1980 di Singapura.....	115

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A: Calon - Calon Anggota Parlemen yang Bertanding dalam Pemilu Tahun 1991 di Singapura.
- Lampiran B: Map Electoral Boundaries 1991 General Election dan List of Electoral Boundaries
- Lampiran C: Singapore : Basic Economic Indicators, 1960, 1970, 1985, 1986.
- Lampiran D: Pembangunan dan Demokrasi di Beberapa Negara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Singapura mencapai kemajuan yang sangat pesat sejak memisahkan diri dari Malaysia dan memperoleh kedaulatannya pada tanggal 9 Agustus 1965. Singapura tampil sebagai salah satu negara industri baru (*New Industrial Countries / NIC's*) di Asia disamping Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan. Negara pulau yang memiliki luas wilayah 622 km² itu, dalam waktu kurang dari tiga dekade telah berhasil membangun dirinya sebagai negara yang makmur. Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party / PAP*) pimpinan PM Lee Kuan Yew yang memerintah sejak tahun 1959 berhasil merubah negara pulau itu dari sebuah pelabuhan tropis menjadi pusat manufaktur dan finansial. Walaupun tidak memiliki sumber-sumber kekayaan alam, namun Singapura benar-benar mampu memanfaatkan lokasinya yang strategis sebagai suatu pelabuhan alam internasional yang tepat berada pada lalu lintas perdagangan Internasional.¹ Pendapatan Singapura melonjak drastis dari sekitar 3,7 milyar dolar AS tahun 1966 (setahun setelah kemerdekaan), menjadi 92 milyar dolar AS tahun 1989, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen per tahunnya.² Saat ini Singapura mempunyai pendapatan perkapita nomor dua tertinggi setelah Jepang di Asia. Berdasarkan laporan Bank Dunia / *World Development Report* 1991, GNP per kapita Singapura adalah sekitar US \$ 10.458 per tahun.³

Keberhasilan Singapura dalam meningkatkan pendapatan negaranya tidak terlepas dari program pembangunan ekonomi yang telah dijalankan Lee Kuan Yew selama masa pemerintahannya (1959-1990). Lee dengan reputasi kejujurannya, kerja kerasnya, serta naluri kepemimpinannya telah membawa

¹ Jon S. T. Quah, "*Singapore : Towards a National Identity*", dalam *Southeast Asian Affairs 1977*, Institute of Southeast Asian Studies Heinemann Educational Books (Asia) LTD, Singapura, 1977.

² *Merdeka*, 8 Agustus 1990

³ *Suara Pembaruan*, 5 Agustus 1991

bangsa Singapura mencapai tingkat yang oleh Bank Dunia disebut sebagai negara yang paling maju di Asia Tenggara.⁴

Setelah 31 tahun memerintah (1959-1990) dan berhasil membangun Singapura menjadi sebuah negara maju, pada tanggal 28 November 1990 Perdana Menteri Lee Kuan Yew (67) secara resmi menanggalkan jabatannya sebagai kepala pemerintahan. Ia digantikan oleh Deputy I PM Goh Chok Tong (49) dan selanjutnya Lee diangkat sebagai salah seorang menteri senior serta tetap menjabat sebagai Sekjen Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party / PAP*), partai yang selama ini berkuasa di Singapura.⁵

Dalam sejarah modern Singapura, inilah untuk pertama kalinya terjadi pergantian pimpinan pemerintahan. Lee Kuan Yew dalam 31 tahun pemerintahannya begitu leluasa memimpin pemerintahan Singapura tanpa adanya kekuatan oposisi yang berarti. Dalam setiap kali Pemilu, *PAP* yang dipimpinnya selalu menang mutlak atas lawan-lawannya. Lee Kuan Yew melepaskan jabatan PM bukan karena kalah dari rival politiknya, namun semata-mata karena kemauannya untuk melakukan regenerasi kepemimpinan. Meskipun penyerahan kekuasaan itu dilakukan tidak melalui Pemilu atau referendum, tetapi nampaknya bagi Lee hal itu lebih baik daripada harus memimpin Singapura sepanjang hayatnya.

Goh Chok Tong ternyata menyadari kekurangan yang ada dari proses pemilihan dirinya menjadi Perdana Menteri, sehingga berniat segera menyelenggarakan pemilu lebih cepat dari rencana sebelumnya, yaitu dari akhir tahun 1993 ketika masa bakti anggota parlemen berakhir, berubah menjadi tahun 1991.⁶ Menurut Goh, dengan diadakan pemilu bisa dijadikan sebagai ukuran dukungan rakyat bagi kepemimpinannya, bagi program-programnya, serta bagi gaya pemerintahannya yang terbuka dan partisipatif. Penyelenggaraan pemilu menurut Goh diadakan lebih awal juga dengan pertimbangan telah diumumkannya

⁴ Far Eastern Economic Review, *Asia 1991*, Year Book, 1991, hal. 204.

⁵ *Pelita*, 3 Januari 1991

⁶ Raj Vasil, "*Singapore 1992 : Continuity and Change*", dalam *Southeast Asian Affairs 1993*, Institute of Southeast Asian Studies Heinemann Educational Books (Asia) LTD, Singapura, 1993, hal. 298.

garis besar rencana pembangunan pemerintah untuk 25 tahun mendatang, sehingga diperlukan mandat yang jelas dari rakyat atas rencana program pembangunan itu. Apabila telah mendapatkan mandat yang jelas, maka pemerintah bisa menerapkan program itu dengan cepat dan efektif.⁷

Pemilu di Singapura yang diadakan pada tanggal 31 Agustus 1991 diikuti oleh satu partai pemerintah, lima partai oposisi dan satu kelompok independen. Partai-partai tersebut adalah Partai Aksi Rakyat (*People Action Party/PAP*), Partai Pekerja/Buruh (*Worker's Party/WP*), Partai Demokratik Singapura (*Singapore Democratic Party/SDP*), Partai Solidaritas Nasional (*National Solidarity Party/NSP*), PKMS (Partai kebangsaan Melayu Singapura), Partai Keadilan Singapura (*Singapore Justice Party/SJP*) dan Kelompok Independen. Sebelumnya, Parlemen Singapura dibubarkan oleh Presiden Wee Kim Wee pada tanggal 14 Agustus dan hari nominasi ditetapkan pada tanggal 21 Agustus.

Dalam pemilu tahun 1991 ini partai oposisi mampu membuat sejarah baru dengan keberhasilannya menampilkan 4 wakilnya di parlemen yang merupakan jumlah terbanyak sejak pemilu pertama pasca kemerdekaan Singapura tahun 1965.⁸ Sejak pemilu tahun 1968 – 1980 partai oposisi tidak pernah mampu menempatkan wakilnya dalam parlemen. Dominasi *PAP* ini berhasil dipatahkan oleh JB. Jeyaretnam, Sekjen Partai Buruh, ketika pada tahun 1981 mampu tampil sebagai satu-satunya wakil dari oposisi dalam parlemen. Ia mampu menang dengan mengalahkan calon *PAP* dalam pemilu tambahan untuk mengisi kursi parlemen yang kosong mewakili daerah pemilihan Anson.⁹ Kemudian berturut-turut disusul oleh pemilu pada tahun 1984, dimana partai oposisi memperoleh 2 kursi yang berhasil kembali didapatkan Jeyaretnam dan satu lagi oleh Chiam See Tong dari Partai Demokratik Singapura (*SDP*). Pada pemilu tahun 1988, Chiam See Tong tampil sebagai satu-satunya anggota parlemen yang berasal dari partai oposisi. Sementara itu, Jeyaretnam tidak bisa tampil dalam pemilu tahun 1988

⁷ *Pelita*, 15 Agustus 1991.

⁸ *Regional Outlook, Southeast Asia 1992-93*, ISEAS, Singapore, 1992, hal. 27.

⁹ *Jurnal Ekuin*, 12 November 1981.

karena pada tahun 1986 dipenjara dengan tuduhan penyelewengan dana partai, dan akan berakhir pada bulan November tahun 1991.¹⁰

Empat kursi yang diperoleh partai oposisi pada pemilu tahun 1991 diraih oleh Chiam See Tong, Ling How Dong dan Cheo Chai Chen dari Partai Demokratik Singapura (*SDP*), serta Low Thia Kiang dari Partai Buruh (*WP*).¹¹ Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party / PAP*) kehilangan keempat kursinya di wilayah pemilihan Potong Pasir, Bukit Gombak, Nee Soon Central dan Hougang, yakni empat di antara 21 wilayah pemilihan tunggal (*Single Member Constituency / SMC*), dimana akan dipilih satu orang calon untuk duduk sebagai anggota parlemen. Popularitas calon *SDP* di *SMC* Potong Pasir, Chiam See Tong, rupanya tidak tergoyahkan oleh calon *PAP*, Andy Gan, di kawasan tersebut. Dengan kata lain, Sekjen *SDP* Chiam See Tong pada Pemilu tahun 1991 ini berhasil mempertahankan kursi parlemen yang didudukinya sejak pemilu tahun 1984 untuk ketiga kalinya. Calon *PAP* lainnya di kawasan Bukit Gombak Dr Seet Ai Mee dikalahkan oleh calon dari *SDP*, Ling How Dong. Sementara itu, di wilayah Nee Soon Central calon *PAP* Ng Pock Too dikalahkan oleh calon *SDP*, Cheo Chai Chen. Satu-satunya calon dari Partai Pekerja (*WP*) yang meraih kursi dalam pemilu ini adalah Low Thia Kiang yang mengalahkan Tang Guan Seng dari *PAP*.¹²

Walaupun secara keseluruhan Goh Chok Tong mampu memenangkan pemilu tahun 1991, namun keberhasilan partai-partai oposisi menambah jumlah kursinya di parlemen merupakan fenomena tersendiri yang menarik untuk dibahas. Hal itu bukan karena kurang solidnya kepemimpinan PM Goh Chok Tong yang menggantikan Lee Kuan Yew yang mundur pada tanggal 26 November 1990, melainkan lebih ditentukan oleh adanya peningkatan jumlah generasi muda yang menjadi pemilih dan adanya perubahan budaya politik

¹⁰ *Kompas*, 5 September 1988.

¹¹ Hussin Mutalib, *Singapore's 1991 General Election dalam Southeast Asian Affairs 1992*, Institute of Southeast Asian Studies Heinemann Educational Books (Asia), LTD, Singapura, 1992, hal. 304.

¹² Bilveer Singh, *Whither PAP's Dominance An Analysis of Singapore's 1991 General Elections*, Pelanduk Publications, Singapura, 1992., hal. 86.

masyarakat yang selama ini menganut budaya politik Konfusius. Rakyat Singapura, khususnya golongan muda menghendaki penambahan jumlah kursi partai oposisi dalam parlemen agar bisa lebih efektif mengawasi pemerintah.¹³

Alasan lain yang menyebabkan penurunan suara *PAP* dalam pemilu tahun 1991 ini adalah ketidakefektifan strategi yang dilakukan oleh Goh Chok Tong.¹⁴ Strategi Goh yang cenderung lebih banyak melakukan pendekatan kepada kalangan menengah terpelajar berpendidikan barat dengan berbagai mekanisme konsultatif terbukti kurang berhasil. Cara yang dilakukan Goh ini tidak mampu mencegah peningkatan dukungan terhadap lawan politik *PAP* karena Goh telah mengesampingkan kalangan menengah berpendidikan Cina yang banyak terdapat dalam kelas pekerja.¹⁵ Kenaikan harga beberapa jasa pelayanan seperti kesehatan, transportasi, perumahan dan pendidikan menyebabkan penurunan dukungan suara dari kelas pekerja yang selama ini merupakan pendukung tradisional bagi *PAP*.¹⁶ Kekecewaan dan ketidakpuasan golongan muda berpendidikan Cina tersebut nampaknya telah mengakibatkan penurunan suara bagi *PAP* dan beralihnya dukungan mereka kepada partai oposisi, sehingga persentase suara partai oposisi mengalami peningkatan.

Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party / PAP*) yang selama ini merupakan satu-satunya partai terkuat dan terbesar yang para pemimpinnya selalu menjadi kalangan elit negeri itu, pamornya lambat laun mulai sedikit menurun. Singapura sedang menghadapi suatu transisi politik, bukan karena ketidakberhasilan ekonomi, tetapi sebaliknya sebagai hasil sampingan dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Keberhasilan pembangunan ekonomi yang terjadi di Singapura membuat tuntutan masyarakat tidak lagi terbatas pada kebutuhan dasar ekonomi saja, melainkan mulai meluas kepada pemenuhan kebutuhan pada bidang politik.

¹³ Regional Outlook, *op.cit.*, hal. 26.

¹⁴ Garry Rodan, "Preserving The One Party System in Contemporary Singapore", dalam Kevin Hewison, Richard Robison and Garry Rodan (eds), *Southeast Asia in The 1990s : Authoritarianism, Democracy and Capitalism*, ISEAS, 1993., hal. 97.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Salah satu indikator transisi politik yang terjadi di Singapura adalah dengan munculnya orientasi baru yang terlihat di kalangan generasi muda yaitu adanya keinginan untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat yang selama ini dikekang oleh pemerintahan Lee Kuan Yew. Rakyat Singapura makin lama makin menuntut ruang politik yang lebih luas, pemerintahan yang lebih partisipatif dan lebih terbuka.¹⁷ Rakyat Singapura tidak memungkiri keberhasilan pemerintahan PAP dalam memajukan Singapura, namun sebaliknya mereka juga ingin melihat lebih banyak lagi anggota-anggota parlemen yang berasal dari oposisi, sehingga kesempatan untuk berpartisipasi lebih luas dalam pemerintahan dapat dilaksanakan. Secara umum, peningkatan persentase suara dan jumlah kursi bagi partai oposisi dalam pemilu tahun 1991 disebabkan oleh meningkatnya partisipasi politik rakyat.

Dari uraian di atas dan rasa keingintahuan yang sangat mendalam terhadap permasalahan ini, maka penulis merasa tertarik untuk mengkajinya dengan judul :

**“ MENGUATNYA POSISI PARTAI OPOSISI DIBALIK KEMENANGAN
GOH CHOK TONG DALAM PEMILU TAHUN 1991 DI SINGAPURA “**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Pembatasan ruang lingkup pembahasan merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah yang dimaksudkan untuk memperjelas dan mempermudah dalam menganalisa permasalahan secara seksama, terarah dan sistematis dalam kurun waktu tertentu. Selain itu pembatasan masalah dimaksudkan untuk menghindari kekaburan arti dan pembahasan yang terlalu meluas, mengambang dan melampaui batas sehingga mengakibatkan berkurangnya bobot ilmiah suatu penulisan. Sebagaimana yang dikatakan oleh *Joseph Frankel* :

¹⁷ *Kompas*, 24 Desember 1984.

“Pada suatu titik tertentu suatu kejadian historis adalah unik, karena itu semakin luas ruang lingkup studi kita, maka akan semakin sukar untuk membuat pernyataan”.¹⁸

Dalam hal ini *Kartini Kartono* memberikan penjelasan yang lain tentang pembatasan masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

“Pembatasan masalah sangat berkaitan dengan limit waktu, terbatasnya tenaga dan kemampuan intelektual guna menyelidiki semua interrelasi permasalahan”.¹⁹

Berdasarkan hal di atas, maka dalam karya tulis ini pembatasan yang akan penulis berikan terdiri atas :

1. Pembatasan waktu
2. Pembatasan materi.

Pada **Pembatasan Waktu**, penulis memberikan batasan ruang lingkup pembahasan kajian ini adalah sepanjang tahun 1991, yaitu pada saat menjelang pemilu tanggal 31 Agustus 1991 sampai dengan sesudahnya. Pembatasan ini juga dimulai sejak mundurnya Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri Singapura pada tanggal 28 November 1990 yang digantikan oleh Goh Chok Tong yang akhirnya menyelenggarakan pemilu tahun 1991.

Penulis memberikan **Pembatasan Materi** skripsi ini yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan partai oposisi mampu meningkatkan jumlah kursinya di parlemen, sebagai hasil pemilu 31 Agustus 1991. Oposisi yang sebelumnya hanya mampu meraih maksimal 2 kursi pada Pemilu tahun 1984 dan 1 kursi pada pemilu tahun 1988, ternyata mampu meningkatkan suaranya sehingga berhasil mendapatkan 4 kursi pada pemilu tahun 1991. Walaupun Goh Chok Tong bersama Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party / PAP*) mampu memenangkan pemilu, namun hasil pemilu tahun 1991 ini merupakan yang terburuk bagi *PAP* sejak pemilu tahun 1968. Pada pembatasan ini juga akan dibahas apa saja yang melatarbelakangi bertambahnya suara oposisi di parlemen.

¹⁸ Joseph Frankel, *Hubungan Internasional*, ANS Sungguh Bersaudara, Jakarta, 1990, hal. 20.

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, CV Rajawali Pers, Jakarta, 1981., hal. 55.

1.3 Permasalahan

Permasalahan atau problematika merupakan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam situasi tertentu dan selanjutnya menuntut kita untuk menyelesaikannya atau mencari jalan keluar. Ketika kita menghadapi suatu masalah, kita dituntut untuk mengamati bagaimana masalah itu muncul dan tidak puas hanya melihat saja melainkan kita juga ingin mengetahui secara mendalam.

Keberhasilan pemerintahan Singapura di bawah pimpinan Lee Kuan Yew (selama 31 tahun memerintah) dan Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party / PAP*) mampu memberikan begitu banyak dampak positif bagi rakyat Singapura berupa kemajuan perekonomian Singapura. Kemajuan perekonomian yang dialami oleh Singapura dan berbagai dampak positifnya bisa dilihat dalam berbagai aspek seperti, keberhasilan membenahi sistem pendidikan, mendorong terciptanya identitas nasional, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, komunikasi, membina heterogenitas sosial, memajukan industrialisasi, memperbaiki hubungan dagang dan politik dengan dunia internasional, mengurangi pengangguran dan meningkatkan standar hidup, perumahan yang baik dan kemajuan dalam bidang transportasi.²⁰

Pembangunan ekonomi yang telah dilakukan oleh pemerintah Singapura terbukti mampu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dari masyarakat yang miskin menjadi masyarakat yang makmur. Sebagai contoh meningkatnya standar hidup warga Singapura dapat dilihat dari jumlah kepemilikan kebutuhan-kebutuhan sekunder, seperti TV, telepon, radio dan mobil, meningkatnya jumlah pengunjung tempat hiburan dan lain-lain.²¹ Dengan indikator penduduk seperti di atas jumlah masyarakat kelas menengah yang ada di Singapura pada tahun 1990 mencapai persentase sebesar 83%.²²

Adanya indikator berupa peningkatan taraf hidup rakyat Singapura di atas, telah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Singapura di bawah dominasi *PAP* menghasilkan suatu perubahan

²⁰ *Sinar Harapan*, 8 Agustus 1984.

²¹ *Merdeka*, 28 Januari 1984.

²² *Ibid.*

dalam masyarakat Singapura. Perubahan tersebut dapat dilihat dengan bergesernya struktur ekonomi masyarakat Singapura dari masyarakat kelas bawah menjadi masyarakat yang sebagian besar kelas menengah. Walaupun masyarakat yang miskin masih ada di Singapura, namun jumlahnya tidak terlalu besar saat ini, yaitu sekitar kurang dari 20% dari keseluruhan jumlah penduduk Singapura.²³ Kondisi yang telah dicapai di atas telah membuat keberhasilan modernisasi masyarakat Singapura.²⁴

Dominasi *PAP* yang mampu bertahan lama dalam pemerintahan Singapura juga didukung oleh penerapan “kemampuan merangkul” (*kooptasi*) *PAP* terhadap calon-calon tokoh politik, khususnya yang berpendidikan Barat (*English Educated*). Disinilah nampaknya salah satu letak sukses *PAP* dalam regenerasi kepemimpinan yang dilakukannya, karena mereka mampu merekrut generasi muda yang telah mendapat pendidikan Barat seperti, *Goh Chok Tong*, *Tony Tan*, *Ong Teng Cheong*, *Lim Che Onn*, *Lee Hsien Loong* dan lain-lain secara lebih awal.²⁵ Tokoh-tokoh generasi muda tersebut sejak awal tahun 1970-an sudah direkrut oleh Lee Kuan Yew, dan dipersiapkan sebagai kandidat pemimpin di masa depan. Sistem kader diterapkan oleh Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party / PAP*) pada tingkat rukun tetangga (*residensial*), sehingga *PAP* mampu membangun jaringan sentral yang bersifat wilayah.²⁶ Melalui sistem ini, para anggota parlemen yang mewakili daerah konstituensi tertentu bisa berkomunikasi secara langsung dengan rakyat di wilayahnya untuk mengetahui segala keinginan rakyat dan sekaligus menjaring potensi yang ada untuk dipersiapkan sebagai kader-kader *PAP*.

²³ Garry Rodan, “*The Growth of Singapore’s Middle Class And It’s Political Significance*”, dikutip dalam Garry Rodan, (ed), *Singapore Change’s Guard: Social, Political, And Economic Directions in The 1990s*, Singapura, 1993., hal. 62.

²⁴ Istilah *modernisasi* di sini menunjukkan pada proses perubahan yang mencakup keseluruhan perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, intelektual, dan kebudayaan, yang berkaitan dengan peralihan suatu masyarakat dari suatu kondisi yang relatif miskin bersifat pedesaan, ke kondisi yang relatif makmur, bersifat perkotaan dan industrial. Istilah *pertumbuhan ekonomi* menunjukkan pada penambahan kekayaan ekonomi secara keseluruhan dari suatu masyarakat yang dihitung menurut angka GDP (Produksi Domestik Kotor) per kapita. Dikutip dalam Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, PT. Gramedia, Jakarta, 1982. Hal., 28.

²⁵ *Pelita*, 16 September 1991.

²⁶ *Kompas*, 22 Desember 1984.

Dalam strategi Pemilu, *PAP* menerapkan pembagian wilayah pemilihan disesuaikan dengan penambahan penduduk dan keseimbangan ras, sehingga dominasi *PAP* bisa dijamin pada tingkat paling bawah. Misalnya, jika wilayah suatu pemilihan terlalu banyak penduduk Melayu atau berpendidikan Cina yang kebanyakan kelas menengah kebawah, maka wilayah itu dipecah atau digabungkan dengan wilayah lainnya. Dengan demikian, suara yang dianggap berpotensi sebagai pendukung partai oposisi tidak akan terkumpul dalam satu wilayah konstituensi. Dengan suara antara 25 sampai 30 persen, sebenarnya kelompok oposisi dapat memperoleh 18 kursi parlemen dalam sistem pemilu proporsional.²⁷ Namun, karena pemilu di Singapura menggunakan sistem distrik yang mana sisa suara di masing-masing wilayah konstituensi menjadi tidak diperhitungkan lagi, maka hal ini mengakibatkan partai oposisi tidak mampu memperoleh kursi dalam jumlah yang banyak.²⁸

Dominasi *PAP* yang lain dapat dilihat dari adanya usaha *PAP* untuk mengembangkan dan melembagakan pengaruhnya terhadap posisi-posisi kunci di masyarakat seperti kaum birokrat sipil, perusahaan milik negara dan organisasi lapisan bawah.²⁹ Kaum birokrat sipil dan perusahaan milik negara telah dijadikan oleh *PAP* sebagai sarana untuk mengimplementasikan kerja sama tersebut. Kecenderungan ini kian meningkat dari tahun ke tahun, sehingga partai oposisi sulit untuk mengikutsertakan birokrat dalam menyuarakan aspirasi politiknya. Pengaruh *PAP* tersebut juga terlihat melalui organisasi-organisasi masyarakat lapisan bawah yang dibentuk *PAP*, yang mana merupakan jalur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Beberapa organisasi tersebut diantaranya adalah Badan Permusyawaratan Warga (*Citizens Consultative Committee*) dan Rukun Tetangga (*Residents Committee*).³⁰ Melalui organisasi ini, para anggota parlemen bisa mentransformasikan program-program pemerintah kepada rakyat. Berbagai aspirasi rakyat ditampung dan yang mana sekiranya tidak merugikan bagi *PAP*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Chan Heng Chee, *The Dynamics of One Party Dominance The PAP at The Grass-Roots*, Singapore University Press, 1978., hal. 21.

³⁰ *Kompas*, 18 November 1984.

akan dijadikan pertimbangan untuk diambil sebagai salah satu kebijakan pemerintah. Banyaknya organisasi lapisan bawah yang ada dan keefektifan cara tersebut membuat partai oposisi sulit untuk berhubungan dengan rakyat.³¹

Keadaan yang sangat menguntungkan pihak *PAP* tersebut di atas ternyata tidak membuat surut pihak oposisi. Hal itu dibuktikannya dengan kejutan yang dibuat partai oposisi berupa penambahan wakil dari partai oposisi dalam parlemen menjadi 4 orang. Hal ini membuat dominasi Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party / PAP*) dalam parlemen Singapura menjadi berkurang. Rincian kursi-kursi untuk partai oposisi tersebut adalah 3 kursi untuk Partai Demokratik Singapura (*Singapore Democratic Party/SDP*) dan 1 kursi untuk Partai Pekerja (*Worker's Party/WP*).³²

Dari uraian di atas, maka penulis menetapkan permasalahan dari pembahasan ini adalah :

“ MENGAPA KURSI PARTAI OPOSISI BISA BERTAMBAH DALAM PEMILU TAHUN 1991 DI SINGAPURA ? “

1.4 Kerangka dasar Teori

Dalam mengkaji suatu permasalahan, kita harus menggunakan pijakan teoritis supaya bahasan yang sedang kita kemukakan dapat tepat dan terarah. Kerangka dasar teori sangat diperlukan untuk mengkaji suatu permasalahan dengan tepat. Kerangka dasar teori adalah bentuk penjelasan yang paling umum yang menginformasikan kepada kita untuk mengetahui bahwa sesuatu itu terjadi dan kapan dapat diprediksi sesuatu hal itu akan terjadi. Disamping kerangka dasar teori merupakan alat eksplanasi terhadap permasalahan yang sedang terjadi, kerangka dasar teori juga merupakan konsepsi abstrak yang ditempuh pada masalah-masalah khusus yang diperlukan sebagai analisis terhadap masalah yang sedang dihadapi, sehingga kita mendapatkan solusi-solusi yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

³¹ *Tempo*, 10 September 1988, hal. 33.

³² *Tempo*, 7 September 1991.

Seperti halnya pada pengkajian masalah-masalah yang lain, pengkajian terhadap masalah ini juga memerlukan teori yang berperan sangat penting, sebagaimana dikatakan oleh *Hans J. Morgenthau* berikut ini :

“Bahwa teori yang memberikan pengarahan, yang menentukan jenis-jenis tindakan yang harus dilakukan dalam hubungan internasional, kebiasaan teori yang demikian akan menghasilkan penentuan aturan permainan yang tepat. Teori lalu menjadi seperangkat jawaban “³³

Secara spesifik *Mc Cain* dan *Seagal* memberikan definisi yang lebih jelas bahwa teori adalah :

“Serangkaian statemen yang saling berkaitan ... (yang terdiri dari) : (1) Kalimat –kalimat yang memperkenalkan istilah yang merujuk pada konsep-konsep dasar teori itu; (2) Kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep-konsep dasar itu berkaitan satu sama lain; (3) Kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statemen teoritis itu dengan sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empiris (yaitu hipotesa) “³⁴

Dalam melihat fenomena yang terjadi di Singapura selama masa Lee Kuan Yew, nampaknya cukup relevan untuk melihat keberhasilan *PAP* dalam memantapkan hegemoni ideologinya dan membawa kemakmuran rakyat melalui kemajuan ekonomi. Ideologi yang ditawarkan oleh *PAP* adalah “*survival*” dan “*pragmatisme*”. Dua konsep ideologi ini mampu diterima sebagai ide dasar dalam menumbuhkan legitimasi rakyat kepada pemerintah dan dasar terhadap pelaksanaan program-program pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Chua Beng Huat:

*“The “national interest” was conceptually, i.e. ideologically, encapsulated in two inextricably tied abstract concepts, “survival” and “pragmatism”; survival depends on pragmatism and what is pragmatic is in turn judged in terms of its contribution to survival. All government policies became rationalised and structured within the interactive conceptual spaces provided by these two concepts. The two concepts thus served as the normative basis upon which policies can be debated and defended.”*³⁵

³³ Charles A. Mc Clelland, *Ilmu Hubungan Internasional : Teori dan Sistem*. CV Rajawali Pers, Jakarta, 1971, hal. 5.

³⁴ Garwin Mc Cain dan Erwin Seagal, dikutip dalam Mohtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 187.

³⁵ Chua Beng Huat, “*Singapore*”, dalam Norma Mahmood (ed.), *Rethinking Political Development in Southeast Asia*, University of Malaya Press, Kuala Lumpur, 1994., hal. 123.

Adanya berbagai kesulitan yang menyangkut mengenai kelangsungan hidup bangsa memerlukan suatu solusi tertentu agar problem tersebut mampu dipecahkan. Beberapa faktor yang menjadi masalah mendesak untuk segera dipecahkan dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa diantaranya adalah; kesulitan ekonomi, ancaman kaum Komunis dan tantangan serta ancaman dari negara luar yang menganggap Singapura sebagai "Third Cina".³⁶ Kesulitan ekonomi di Singapura bisa dilihat dari beberapa indikator, seperti; ketiadaan sumber kekayaan alam yang dimiliki, kemiskinan penduduk yang ditandai dengan rendahnya pendapatan perkapita dan tingkat kesejahteraan serta keterbelakangan atau kebodohan yang nampak dari rendahnya kualitas sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran. Sementara, ancaman Komunis yang datang setiap saat ditandai dengan pemberontakan dan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan mereka dalam upayanya untuk merebut kekuasaan dari tangan pemerintahan *PAP* yang non-Komunis. Faktor terakhir yang harus segera diselesaikan adalah adanya tantangan dan ancaman dari negara luar yang menganggap Singapura sebagai negara "Third China" setelah Cina dan Taiwan. Populasi penduduk Singapura yang mayoritas berasal dari ras Cina (76%) dianggap berpotensi sebagai tempat penyebaran ajaran Komunis. Negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Malaysia yang mayoritas penduduknya berasal dari ras Melayu yang beragama Islam sangat menentang adanya Komunis dan menganggap keberadaan ras Cina di Singapura tersebut cukup membahayakan keamanan dalam negeri mereka. *PAP* menyadari bahwa Singapura hanya merupakan satu negara kecil dengan jumlah penduduk yang tidak begitu besar (dibanding kedua negara tetangga tersebut), sehingga apabila terjadi konfrontasi, maka diperkirakan Singapura akan mengalami kehancuran. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintahan *PAP* untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Dari beberapa faktor yang mengancam kelangsungan hidup bangsa di atas, nampaknya ideologi "survival" menjadi satu-satunya alternatif terbaik bagi pemecahan masalah

³⁶ *Ibid.*, hal. 126.

bangsa tersebut. Rakyat mau menerima ideologi tersebut karena menganggap bahwa hanya dengan ideologi itulah mereka bisa tetap bertahan hidup.

Sementara itu, "pragmatisme" dimaksudkan sebagai suatu sistem ideologi yang menggunakan instrumen ekonomi dalam sistem operasionalnya. Ideologi "pragmatisme" menjadi dasar bagi pelaksanaan program-program pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah. Pembangunan ekonomi dianggap merupakan solusi yang terbaik untuk mengatasi kesulitan yang ada. Untuk mempelancar jalannya pembangunan ekonomi diperlukan stabilitas sosial dan politik. Jadi, Ideologi "survival" dan "pragmatisme" yang tepat dari PAP di atas telah menyebabkan tingginya dukungan rakyat atau legitimasi tersendiri bagi PAP dalam menjalankan program-program dan kebijakan yang berkaitan dengan publik. Seperti dijelaskan oleh Chua Beng Huat di bawah ini:

*"Ideologically raising the issue of national survival found sympathetic in the population. Against the probable pitfalls of survival, the government's solution is "economic development". Unrelenting economic growth was, and continues to be seen as the best guarantee of social and political stability necessary for the survival of the nation. It is seen as the wellspring of all else in Singaporean's life, including ultimately a democratic society. Without it, there would be only poverty and squalor, the fertile ground for the spread of communism in real politik."*³⁷

Kemenangan PAP secara berturut-turut dalam Pemilu Singapura sejak tahun 1959 telah membuktikan keberhasilan ideologi PAP dan diterimanya hegemoni ideologi PAP tersebut sebagai "jiwa" rakyat Singapura. Hal ini kembali ditekankan oleh Chua Beng Huat:

*"From the point of ideological analysis, these policies, rationalised within the "need" to maintain social and political stability in order to survive, had a sense of "realism", "necessity" and "naturalness", combined with their efficacy in generating better material life, that gave to these measures legitimacy and their being tolerated by the electorate, as reflected in the unfailing support for the PAP in successive elections. It is also these qualities that enabled the PAP government to elevate the concept of "pragmatism" as its own credo"*³⁸

³⁷ *Ibid.*, hal. 124.

³⁸ *Ibid.*, hal. 125.

Kontrol sosial dan intervensi negara selama masa pemerintahan Lee Kuan Yew nampaknya cukup efektif. Hal ini dapat dilihat pada bagaimana rakyat Singapura secara sukarela menerima ideologi "survival" dan "pragmatisme" yang diterapkan oleh PAP. Kesukarelaan rakyat terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah tersebut sudah merupakan suatu bentuk legitimasi tersendiri bagi pemerintah. Hal ini dijelaskan oleh Gramscy:

*"Social control imposed by the ruling group is likely to be voluntary accepted by the governed as necessary and "enabling" interventions to achieve certain desirable ends. That social control and state intervention may be voluntary accepted by those subjected to them suggests that the "legitimacy" of a regime is not to be evaluated in terms of some pre-selected political philosophy, such as liberal democracy. Rather, the issue of legitimacy should be raised within the ideological / normative system which the regime is relentlessly attempting to institutionalise. The possible meeting of the government and the governed at the ideological level should result in high degree of legitimacy for the former and a high degree of social stability, where specific but effective coercion is used only against those who do not share the same normative values."*³⁹

Ideologi "survival" dan "pragmatisme" yang diterapkan oleh pemerintah tidak hanya sekedar menjadi ide saja, melainkan telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Pelaksanaan program-program pembangunan terutama pembangunan ekonomi merupakan wujud nyata dari kedua ideologi di atas. Kemampuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dalam pembangunan ekonomi yang dilaksanakannya turut mendorong "legitimasi" terhadap konsep-konsep ideologi yang ditawarkan pemerintah, seperti ditegaskan Gramscy:

"... that hegemony/consensus cannot be maintained at the level of ideas alone but 'must also be economic'. It must necessarily be supported by the ruling group's ability to improve the material life of the governed if the extant ideas and values are to retain ideological currency. Moral leadership of the governing is therefore to a significant extent underwritten by the leader's ability to improve the economic wellbeing of the people. Indeed, the desire for economic growth may itself be inserted into ideological system, thereby justifying the need to rearrange existing social structures and organisations to ensure the growth. Subsequent economic success 'validates' and thus legitimacies the

³⁹ Chua Beng Huat, *Communitarian Ideology and Democracy in Singapore*, Murdoch University, Western Australia, 1996., hal. 3.

ideological concepts themselves. A materially transformed society governed by a new set of normative values may then be detonated as one in which the political leaders govern through moral leadership backed by necessary coercion, by 'ideological hegemony' in the best of Gramscian terms."⁴⁰

Selain hegemoni ideologi, budaya politik yang ada di Singapura juga turut mempengaruhi kelanggengan hegemoni tersebut. Rakyat Singapura yang sebagian besar merupakan ras Cina mempunyai warisan budaya konfusian yang terbawa dari nenek moyang mereka di Cina. Warisan konfusian itu menekankan hierarki, penghormatan akan otoritas, komunitarianisme, humanisme konfusian dan mengembangkan kepemimpinan yang saleh dan tercerahkan.⁴¹ Kepatuhan terhadap pemerintah yang sudah memberikan kemakmuran kepada rakyatnya sebagai salah satu perwujudan ajaran konfusius ternyata berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Singapura. Hal tersebut nampak dari kepatuhan rakyat terhadap pemerintah, seperti ketika pemerintah menghimbau rakyat agar rela mengencangkan ikat pinggang dengan membekukan tingkat gaji, mereka semua mematuhi. Rakyat percaya, pengorbanan itu pasti ada hasilnya nanti.⁴² Latar belakang sebagian besar rakyat yang merupakan imigran dari Cina yang berniat ingin mencari uang sebanyak-banyaknya juga menjadi salah satu alasan mengapa mereka mau bekerja keras. Latar belakang budaya politik konfusian dan tujuan mereka bermigrasi ke Singapura tersebut telah menyebabkan sebagian besar rakyat lebih memilih terpenuhinya kebutuhan ekonomi mereka daripada berperan aktif dalam kegiatan politik.

Seperti dijelaskan oleh *Galen A. Irwin* dalam suatu tulisannya yang menyimpulkan bahwa dalam beberapa keadaan tertentu (kemakmuran), perasaan puas menyebabkan partisipasi yang lebih rendah.⁴³ Dalam memerintah Singapura, pemimpin *PAP* terlihat berorientasi pada kepuasan rakyat. Hal tersebut nampak

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ Chan Heng Chee, "Model Demokrasi Asia: Evolusi dan Implementasinya", dalam *Demokrasi dan Kapitalisme: Perspektif Asia dan Amerika*, CIDES, Jakarta, 1994, hal. 22.

⁴² *Suara Karya*, 27 Mei 1988.

⁴³ Galen A. Irwin, dikutip dalam Miriam Budiardjo, (ed), *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, PT. Gramedia, Jakarta, 1982., hal. 6.

dari program-program yang dijalankan oleh pemerintah selama ini. Program-program tersebut antara lain; program pembangunan perumahan yang dikelola oleh Badan Pengembangan Perumahan (*Housing Development Board / HDB*) yang mendirikan rumah-rumah susun bagi rakyat yang lebih layak huni dan lebih representatif. Selain itu, pemerintah juga mendirikan Serikat Dagang (*National Trade Union Congress / NTUC*) yang berfungsi untuk menjamin kesejahteraan para buruh. Kesepakatan-kesepakatan dibuat dengan para majikan yang pada intinya menetapkan standar yang layak bagi para buruh agar mereka bisa bekerja dengan baik. Beberapa program yang lain, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan masyarakat dan lain-lain juga memperlihatkan bahwa faktor kesejahteraan yang berdampak pada kepuasan rakyat merupakan faktor yang sangat dititikberatkan dalam program pembangunan ekonomi Singapura.

Hegemoni ideologi pemerintahan *PAP* yang bisa diterima oleh rakyat nampaknya telah menghasilkan suatu legitimasi tersendiri bagi *PAP* dan Lee Kuan Yew untuk terus memerintah Singapura. Walaupun untuk menjamin kekalnya hegemoni tersebut, *PAP* juga harus menggunakan cara-cara yang represif, namun nampaknya selama ini cara-cara tersebut masih bisa ditolelir oleh sebagian besar rakyat. Kerepresifan ini terlihat dari adanya pemakaian Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (*ISA*). Adanya Perbedaan pendapat dengan pemerintah dan upaya melakukan kritik terhadap pemerintah dianggap oleh pemerintah melakukan tindakan subversif dan dituduh sebagai komunis yang akan membahayakan keamanan negara.⁴⁴ Para oposisi tersebut tidak dapat berbuat banyak untuk membela dirinya disebabkan oleh adanya Undang-undang Keamanan Dalam Negeri yang disebut *ISA (Internal Security Act)* yang membolehkan penangkapan tanpa peradilan.⁴⁵

Pemilihan Umum yang diselenggarakan di Singapura sejak tahun 1968 sampai dengan awal tahun 1980-an, nampaknya hanya merupakan alat bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya daripada alat untuk memilih siapa

⁴⁴ *Business News*, 10 Mei 1993.

⁴⁵ *Suara Karya*, 10 Agustus 1988.

yang seharusnya menjalankan kekuasaan itu. Pemilu yang diadakan di Singapura tidak dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada rakyat untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintahan, tetapi lebih memberi kesempatan pada kaum elit *PAP* yang berkuasa untuk berpropaganda dan memobilisasi rakyat agar mendukung *PAP*. Jadi pemberian suara yang dilaksanakan dalam pemilu tersebut, nampaknya merupakan tindakan untuk memperoleh dukungan rakyat terhadap sistem politik yang ada dan elit yang berkuasa.⁴⁶

Dominasi pemerintahan *PAP* mulai sedikit berkurang sejak pertengahan tahun 1980-an, seiring dengan perkembangan kemajuan ekonomi dan munculnya generasi baru yang lebih berpendidikan dibandingkan pendahulunya.⁴⁷ Hal ini terlihat dengan penurunan suara sebesar 12,5% dibanding pemilu sebelumnya.⁴⁸ Budaya politik konfusian nampaknya mulai mengalami pengikisan nilai-nilai di kalangan generasi muda yang tidak mengalami secara langsung masa-masa sulit pada saat Singapura masih berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris dan masa-masa perjuangan kemerdekaan. Ideologi yang ditawarkan *PAP* mulai dipertanyakan kembali oleh rakyat, terutama oleh kaum muda yang menganggap bahwa keadaan sekarang berbeda dengan masa lalu. Kemajuan dan fondasi ekonomi yang kuat telah memperkokoh posisi Singapura dalam persaingan dengan negara-negara lain di dunia, sehingga rakyat tidak perlu khawatir apakah bangsa Singapura akan bisa tetap *survive*.

Setelah kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Singapura tercapai, maka orientasi masyarakat Singapura mulai berubah. Perubahan tersebut mulai nampak pada pertengahan tahun 1980-an ketika partai oposisi mampu meraih dua kursi di parlemen pada pemilu tahun 1984.⁴⁹ Partisipasi politik yang sebelumnya tidak begitu dipedulikan, berubah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat Singapura. Hal ini merupakan konsekuensi yang wajar sebagai akibat dari kemajuan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara

⁴⁶ Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997., hal. 47.

⁴⁷ *Sinar Harapan*, 24 Desember 1984.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ *Kompas*, 24 Desember 1984.

akan memunculkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi politik masyarakat negara tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh *Seymour Martin Lipset* yang mengatakan bahwa pendapatan (*income*), pendidikan, dan status merupakan faktor penting dalam proses partisipasi. Dengan kata lain, orang yang pendapatannya tinggi, berpendidikan baik, dan yang berstatus sosial tinggi, cenderung untuk lebih banyak berpartisipasi daripada orang yang berpendapatan serta pendidikannya rendah.⁵⁰

Berkaitan dengan perubahan orientasi masyarakat Singapura tersebut, maka untuk menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan bertambahnya kursi partai oposisi dalam Pemilu tahun 1991, teori yang dipandang penulis cukup relevan dalam hal ini adalah *Teori partisipasi Politik*.

Pengertian partisipasi politik sendiri menurut *Herbert Mc Closky* dalam buku Miriam Budiardjo:

" Partisipasi politik adalah kegiatan – kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum ".⁵¹

Sementara itu Miriam Budiardjo menambahkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat atau anggota Parlemen, dan sebagainya.⁵²

Pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk

⁵⁰ Seymour Martin Lipset, dikutip dalam Miriam Budiardjo, (ed). *op.cit.*, hal. 9.

⁵¹ Herbert Mc Closky, dikutip dalam Miriam Budiardjo, (ed). *op.cit.*, hal. 1.

⁵² *Ibid.*

menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.⁵³

Pengertian partisipasi politik yang lain menurut *Samuel P. Huntington* dan *Joan M. Nelson* adalah kegiatan warga negara yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.⁵⁴ Dengan demikian konsep partisipasi politik yang dikemukakan oleh *Huntington* dan *Nelson* menegaskan bahwa partisipasi politik bukan hanya meliputi kegiatan sukarela saja, tetapi dapat pula dilaksanakan dengan paksaan atau tekanan. Partisipasi politik tidak hanya berupa kegiatan yang bersifat legal saja, tetapi juga bersifat ilegal, efektif atau tidak efektif.

Sementara menurut *Myron Weiner* paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu adanya modernisasi yang meliputi komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca-tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media komunikasi massa.⁵⁵ Ketika penduduk merasa bahwa mereka ternyata dapat ikut mempengaruhi nasib mereka sendiri, mereka makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

Perubahan-perubahan struktur kelas sosial juga turut berperan dalam memperluas partisipasi politik rakyat. Terbentuknya suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi menimbulkan masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik.⁵⁶ Hal tersebut menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.

⁵³ Miriam Budiardjo, *Op.cit.*, hal. 3

⁵⁴ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, 1976., hal. 3.

⁵⁵ Gabriel A. Almond., dikutip dalam Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, (eds), *op.cit.*, hal 45.

⁵⁶ *Ibid.*

Perluasan partisipasi politik juga turut didukung oleh kaum intelektual yang terdiri dari sarjana, filosof, dan pengarang, serta wartawan sebagai bagian dari komunikasi massa modern yang sering mengemukakan ide-ide kepada masyarakat umum untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik.⁵⁷ Sistem-sistem transformasi dan komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide-ide baru. Kaum intelektual telah lama menjadi pembuat dan penyebar ide-ide yang mampu merubah sikap-sikap dan tingkah laku dari kelas sosial lain. Melalui kaum intelektual dan media komunikasi modern, ide kebebasan partisipasi telah tersebar ke bangsa-bangsa yang baru merdeka jauh sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.

Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik dengan timbulnya kompetisi memperebutkan kekuasaan membuat kelompok-kelompok yang saling berhadapan tersebut berusaha mencari dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah apabila mereka memperjuangkan ide-ide partisipasi massa. Akibatnya, hal ini akan menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar "hak-hak" untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan politik tersebut dipenuhi. Jadi, kelas-kelas menengah dalam memperjuangkan haknya telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.

Hal terakhir yang menyebabkan partisipasi yang lebih luas adalah keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.⁵⁸ Perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan pemerintah menjadi semakin menyusup ke segala segi kehidupan sehari-sehari rakyat. Tanpa hak-hak sah atas partisipasi politik, individu-individu betul-betul tidak berdaya menghadapi dan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin dapat merugikan kepentingannya. Maka dari itu, meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.⁵⁹

Dari faktor-faktor yang dijelaskan oleh Myron Weiner di atas, beberapa faktor diantaranya nampaknya cukup relevan untuk menggambarkan perubahan orientasi politik yang sedang terjadi di Singapura. Beberapa faktor tersebut adalah faktor *modernisasi* dan *faktor perubahan struktur sosial*. Modernisasi menjadi salah satu faktor yang turut menentukan perluasan partisipasi politik rakyat Singapura karena melalui modernisasi orientasi masyarakat mulai berubah. Pada saat pembangunan ekonomi dilakukan pertama kali oleh pemerintah Singapura, rakyat hanya bisa tunduk dan patuh.⁶⁰ Rakyat menyadari bahwa kondisi masyarakat yang miskin, banyak pengangguran dan tidak adanya sumber-sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan membuat mereka harus bekerja lebih keras agar bisa tetap hidup. Mereka lebih memikirkan bagaimana dapat mempertahankan kelangsungan hidup daripada berpikir ke arah hal yang lain, misalnya partisipasi politik. Namun, setelah kebutuhan mereka terpenuhi, maka mulai muncul tuntutan lain yaitu keinginan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik.

Perubahan struktur sosial juga ikut berperan dalam memperluas partisipasi politik rakyat Singapura. Perubahan struktur sosial dari kelas bawah menjadi kelas menengah sebagai akibat dari proses industrialisasi dan modernisasi membuat pola pemikiran mereka, terutama tentang partisipasi politik juga berubah.⁶¹ Golongan kelas bawah lebih menekankan pada bagaimana mereka dapat mempertahankan hidup, walaupun tidak memiliki kebebasan politik. Sedangkan kelas menengah yang kebutuhan materinya telah terpenuhi mulai berpikir bagaimana mempertahankan keberadaannya. Dan hal itu bisa dipenuhi apabila kebijakan pemerintah mampu mengakomodasi keinginan mereka. Nampaknya golongan kelas menengah tersebut menghendaki perluasan partisipasi politik,

⁵⁹ Gabriel A. Almond, *op.cit.*, hal. 46.

⁶⁰ *Kompas*, 26 Mei 1990.

⁶¹ *Ibid.*

selain karena kebutuhan dasar mereka telah tercapai, juga karena mereka ingin agar keberadaan mereka terjamin.

Meningkatnya kesejahteraan ekonomi rakyat Singapura membawa konsekuensi lahirnya sikap yang lebih kritis terhadap kebijaksanaan pemerintah yang tidak memberikan kesempatan berpartisipasi rakyat. Taraf hidup masyarakat yang semakin tinggi menjadikan makin banyaknya masyarakat yang mampu menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat pendidikan tinggi.⁶² Dari golongan muda inilah (berpendidikan Cina, Barat, Melayu dan India), timbul aspirasi mengenai perlunya peranan dan kehadiran oposisi yang lebih besar di parlemen.⁶³ Kaum intelektual yang dipelopori oleh golongan muda terdidik mulai mengemukakan ide-ide mereka mengenai pentingnya partisipasi politik rakyat yang lebih luas. Sebagian dari mereka mendapatkan ide ini dari Barat bagi kaum terpelajar yang berpendidikan Barat, dan sebagian lagi berasal dari pengetahuan yang didapat lewat media komunikasi modern yang memudahkan penyebaran informasi dari luar.

Mereka melihat politik di Singapura tidak berdasarkan pada bentuk pemerintahan yang ada, melainkan lebih banyak melihat pada kenyataan yang ada di Singapura selama ini.⁶⁴ Kenyataan tersebut adalah bahwa bentuk pemerintahan Demokrasi Parlementer Singapura ternyata hanya merupakan simbol saja, karena pada prakteknya, demokrasi tidak berjalan di Singapura. Banyak yang berkesimpulan bahwa pemerintah *PAP* memang baik dan berjasa, tetapi dianggap terlalu banyak dan terlalu jauh mengatur kehidupan warga dengan berbagai peraturan yang dengan mudah ditetapkan sendiri dengan sedikit konsultasi.⁶⁵ Banyaknya pemilih muda yang lebih berpendidikan cenderung membuat tuntutan mereka bertambah, salah satunya adalah mengenai hak partisipasi dan kebebasan warga.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Lee Boon-Hiok, "Singapore in 1984: A Time for Reflection and a Time for Change", dalam *Southeast Asian Affairs 1984*, Institute of Southeast Asian Studies Heinemann Educational Books (Asia) LTD, Singapura, 1985., hal. 300.

⁶⁴ *Kompas*, 24 Desember 1984.

⁶⁵ *Ibid.*

Peningkatan pendidikan masyarakat dan munculnya generasi baru telah menyebabkan perubahan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Hal ini nampak terhadap perubahan budaya politik masyarakat, yaitu budaya konfusius yang selama dua dekade sejak tahun 1960-an telah melekat di hati rakyat Singapura. Munculnya golongan muda yang terdidik telah merubah pandangan masyarakat dan menganggap bahwa kepatuhan terhadap ajaran konfusius merupakan cara dari *PAP* untuk melestarikan kekuasaannya.⁶⁶ Kaum muda tersebut jenuh oleh ucapan-ucapan *PAP* yang mengatakan bahwa hanya *PAP* yang lebih tahu apa yang bagus bagi rakyat sehingga segala keputusan berada di tangan pemerintah tanpa mengindahkan partisipasi dari rakyat.⁶⁷ Hal ini berarti bahwa sudah bukan saatnya lagi bagi rakyat Singapura untuk tunduk sepenuhnya terhadap pemerintah dengan alasan pemerintah sudah memberikan kemakmuran kepada rakyat Singapura. Rakyat Singapura nampaknya mulai mempunyai keinginan-keinginan baru, yang tercermin dari adanya peningkatan partisipasi politik rakyat. Partisipasi politik dari rakyat tersebut diharapkan semakin meningkatkan kemajuan Singapura, karena pemerintah akan menjadi lebih mengetahui kebutuhan rakyatnya.

1.5 Hipotesa

Hipotesa menurut WJS Poerwodarminto adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau untuk mengutarakan pendapat, meski kebenarannya belum dibuktikan.⁶⁸ Sementara itu, *Sofian Effendi* mengatakan bahwa hipotesa sebagai kesimpulan sementara mengenai hubungan-hubungan antara variabel-variabel. Hipotesa seharusnya menggambarkan hubungan antara variabel yang perlu menyediakan arahan-arahan tentang bagaimana hubungan-hubungan itu diverivikasikan.⁶⁹ Hipotesa diperlukan sebagai usaha untuk menentukan alternatif

⁶⁶ *Business News*, 10 Mei 1993.

⁶⁷ *Ibid*.

⁶⁸ WJS Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 76.

⁶⁹ Sofian Effendi, *Unsur-unsur Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1986, hal. 21.

yang mendekati kebenaran dari berbagai dugaan yang ada. Dan kebenaran suatu hipotesa memerlukan pembuktian lagi.

Goh Chok Tong nampaknya menyadari bahwa posisinya sebagai Perdana Menteri diperolehnya atas dasar penunjukan oleh mantan Perdana Menteri sebelumnya, Lee Kuan Yew. Jadi Goh Chok Tong menduduki jabatan PM Singapura tidak melalui suatu referendum atau pemilu yang melibatkan rakyat banyak. Oleh karena itu ia lalu segera mengadakan pemilu pada tahun 1991 yang dipercepat dua tahun dari rencana sebelumnya, yaitu sekitar akhir tahun 1993. Gaya kepemimpinan yang lebih terbuka dan partisipatif diharapkan oleh Goh akan lebih dapat menarik minat dan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Harapan Goh untuk mendapatkan hasil yang sama bahkan lebih meningkat dari pemilu sebelumnya ternyata meleset. Di satu sisi, memang gaya kepemimpinan seperti itulah yang dikehendaki oleh rakyat Singapura, namun disisi lain dengan gaya kepemimpinan seperti itu ternyata memunculkan keberanian rakyat untuk mengkritik pemerintah dan memberikan alternatif pilihan yang lain.

Bertambahnya generasi muda yang terdidik dan adanya perubahan orientasi masyarakat, terutama kaum muda yang mengalami kejenuhan dalam menghadapi suasana yang monolit menjadi salah satu faktor utama berkurangnya suara yang diberikan oleh rakyat terhadap Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party / PAP*) dan bukan karena kurang solidnya kepemimpinan PM Goh Chok Tong.⁷⁰ Hal ini lebih disebabkan sebagai konsekuensi wajar dari kemajuan ekonomi yang terjadi di Singapura. Terpenuhinya tuntutan akan kebutuhan ekonomi masyarakat menjadikan mereka merasa dapat mempengaruhi nasib mereka sendiri. Selanjutnya tuntutan lain yang dianggap dapat menunjang kebutuhan mereka mulai muncul, yaitu keinginan untuk ikut dalam pengambilan keputusan politik. Gejala yang muncul adalah adanya keinginan sebagian besar kaum muda terdidik yang menghendaki suara oposisi yang lebih besar di parlemen. Sebenarnya kaum muda ini tidak menghendaki *PAP* bubar, tetapi

⁷⁰ *Regional Outlook, Southeast Asia 1992-93*, ISEAS, Singapura, 1992, hal. 28.

menurut mereka sudah tiba saatnya bagi pemerintah Singapura untuk memberikan kepada rakyatnya sesuatu yang lebih dari sekedar kemakmuran ekonomi.⁷¹

Partai-partai oposisi nampaknya juga cukup jeli melihat perkembangan yang sedang terjadi dalam masyarakat Singapura. Berbagai masalah menyangkut mengenai demokrasi dan kebebasan politik yang sangat dibatasi oleh pemerintah dijadikan sebagai isu utama selama masa kampanye untuk menarik perhatian dan dukungan dari massa pemilih. Isu-isu yang dikemukakan tersebut diharapkan pihak oposisi mampu mengakomodasi perubahan orientasi masyarakat, terutama yang disponsori oleh golongan muda yang menginginkan partisipasi politik yang lebih luas bagi rakyat Singapura. Masa-masa selama kampanye pemilu benar-benar dimanfaatkan oleh partai oposisi untuk menghimpun kekuatan pemberi suara yang sebagian besar merupakan generasi muda, sehingga diharapkan dapat meningkatkan persentase suara dan jumlah kursi partai oposisi dalam parlemen.

Hasil usaha partai-partai oposisi tersebut ternyata memang bisa dilihat dari kenaikan jumlah kursi partai oposisi di parlemen, yaitu dari satu kursi menjadi empat kursi.⁷² Walaupun jumlah ini masih jauh di bawah suara yang didapat Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party / PAP*) yang masih mendominasi dengan perolehan 77 kursi, namun hal ini nampaknya disadari benar oleh *PAP* sebagai suatu peringatan tersendiri. Apabila peningkatan jumlah kursi partai-partai oposisi tidak segera diantisipasi oleh *PAP*, hal ini dikhawatirkan akan berpotensi menjadi ancaman serius bagi *PAP* di masa-masa mendatang.

Ketidakberdayaan partai-partai oposisi di masa pemerintahan Lee Kuan Yew mulai mendapatkan suatu harapan baru dalam pemerintahan Goh Chok Tong. Harapan baru nampaknya mulai muncul bagi partai oposisi ketika terjadi perubahan budaya politik masyarakat. Partai oposisi dianggap lebih bisa mewakili dan mewujudkan keinginan mereka untuk lebih berpartisipasi dalam bidang politik dibanding dengan *PAP*. Dukungan rakyat terhadap partai oposisi mulai

⁷¹ *Tempo*, 10 September 1988.

⁷² *Far Eastern Economic Review, Southeast Asia 1992, Year Book*, Singapura, 1992, hal. 27.

meningkat sejalan dengan isu demokratisasi yang dihembuskan partai-partai oposisi.

Dengan adanya kenyataan yang terjadi di atas maka dapat dikemukakan suatu hipotesa sebagai berikut :

“Peningkatan jumlah golongan muda yang terdidik sebagai akibat dari keberhasilan pembangunan ekonomi di Singapura, serta perubahan budaya politik yang terjadi di Singapura pada akhirnya berimbas pada meningkatnya dukungan kepada partai oposisi, seperti yang tercermin dengan penambahan jumlah kursi partai oposisi dalam pemilu tahun 1991 di Singapura”.

1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan karya ilmiah, diperlukan adanya penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan atau menerangkan fenomena. Untuk memahami suatu fenomena, seorang peneliti juga harus menghubungkan fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Hal itu memerlukan data-data yang selanjutnya akan dianalisa.

Agar penelitian mendapatkan hasil yang optimal serta sesuai dengan apa yang diharapkan, diperlukan metode yang tepat. *The Liang Gie* menjelaskan metode sebagai berikut :

*“ Cara atau langkah yang berulang kembali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung atau awalnya ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data-data, sedangkan pada ujung akhirnya merupakan suatu cara atau langkah untuk memeriksa kebenaran daripada pernyataan yang dibuat mengenai gejala tersebut ”.*⁷³

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dalam melakukan kegiatan, ada dua langkah yang dilaksanakan, yaitu mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisa data tersebut.

1.6.1 Tahap Pengumpulan Data

Untuk menyelesaikan karya tulis ini, penulis melakukan penelitian tidak langsung, yang berarti bahwa data hasil pengamatan terhadap obyek yang diteliti,

⁷³ *The Liang Gie, Ilmu Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1979, hal. 83.

dikumpulkan melalui buku-buku terbitan, artikel atau buletin dan pemberitaan oleh media massa. Data yang dikumpulkan menjadi bersifat tidak langsung.

Dengan demikian, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*) dan studi literatur. Adapun penelitian kepustakaan ini telah penulis lakukan di :

1. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
3. Perpustakaan UNAIR di Surabaya
4. Perpustakaan CSIS di Jakarta

1.6.2 Metode Analisa Data

Setelah data-data terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisa data tersebut dengan menggunakan cara berpikir dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berpikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus untuk kemudian dirumuskan dalam satu rumusan umum. Dalam hal ini, penulis menggunakan cara berpikir induktif untuk menetapkan garis besar permasalahan dan hipotesa untuk memudahkan dalam menganalisa fenomena tersebut. Untuk menjawab permasalahan berupa pertanyaan “mengapa”, maka penulis juga menggunakan metode analisa data berupa metode eksplanasi, yang mana dapat menjelaskan segala permasalahan yang ada secara lebih jelas dan sistematis.

Langkah awal yang dilakukan adalah dengan melihat sejarah masa lalu Singapura di mana kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat dan negara Singapura benar-benar sangat mendesak. Selanjutnya, dengan tampilnya Partai Aksi Rakyat (*PAP*) sebagai pimpinan pemerintahan di Singapura pada tahun 1959, sedikit demi sedikit rakyat Singapura mulai mampu bangkit dari keterpurukan ekonominya. Ideologi *survival* dan *pragmatis* yang ditawarkan oleh *PAP* mampu diterima dengan baik oleh rakyat Singapura, sehingga timbul hegemoni ideologi dari *PAP* tersebut.

Penggunaan ideologi tersebut didasarkan pada kondisi yang ada, di mana masalah kelangsungan hidup bangsa hanya bisa diatasi dengan mengadakan

pembangunan ekonomi. Walaupun pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Singapura berdampak pada terbaikannya pembangunan politik, nampaknya sebagian besar rakyat Singapura mau menerima kenyataan tersebut. Kurangnya pembangunan politik di Singapura nampak dari pembatasan terhadap kebebasan pers, tekanan terhadap partai-partai oposisi dan pembatasan terhadap partisipasi politik rakyat.

Namun, seiring dengan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang tinggi di Singapura, telah memunculkan generasi baru yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan generasi pendahulunya. Generasi baru yang mulai muncul di Singapura mempunyai orientasi yang berbeda dibanding dengan pendahulunya, yang mana mereka tidak hanya tunduk pada satu partai pemerintah saja, melainkan menginginkan adanya peranan yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses perpolitikan di Singapura. Sejak munculnya generasi baru yang lebih berpendidikan tersebut nampaknya perkembangan perpolitikan di Singapura mulai bergeser. Hal tersebut terlihat dengan tampilnya partai oposisi untuk pertama kalinya di parlemen dalam pemilu sela tahun 1981, setelah selama 13 tahun sejak tahun 1968 – 1980 *PAP* mampu menyapu bersih kursi parlemen.

Keberadaan partai oposisi di parlemen ternyata mampu dipertahankan pada pemilu-pemilu berikutnya, bahkan pada pemilu tahun 1991 hasil yang dicapai oleh partai oposisi mampu mengejutkan banyak pihak. Penampilan partai oposisi tersebut merupakan penampilannya yang terbaik sejak pemilu tahun 1968 dengan tampilnya 4 wakil oposisi di parlemen dan meningkatnya persentase suara sah yang diterima partai oposisi menjadi 39%. Walaupun jumlah wakil oposisi di parlemen tersebut masih terlalu kecil dan tidak cukup signifikan dibanding dengan jumlah wakil *PAP* di parlemen, namun setidaknya-tidaknya hal itu merupakan suatu prestasi luar biasa bagi partai oposisi. Partai oposisi yang terlihat begitu lemah dengan kurangnya sumber daya manusia dan sumber keuangan partai yang dimiliki ternyata mampu menembus dominasi partai pemerintah selama puluhan tahun.

1.7 Pendekatan

Pengkajian permasalahan yang jelas dan tepat akan memberikan arah yang sesuai dengan tujuan kegiatan penelitian. Untuk itu pendekatan diperlukan agar pembahasan yang dilakukan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan. Menurut *Vernon van Dyke*, pendekatan adalah :

"Kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan yang mencakup standar atau tolok ukur yang dipakai untuk memilih masalah dan menentukan data mana yang akan dikesampingkan".⁷⁴

Sementara itu *The Liang Gie* memberikan batasan pendekatan sebagai pengetahuan yang teratur dan bulat mengenai sasaran ilmu tersebut.⁷⁵ Sebagai usaha untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diajukan dan bertitik tolak dari pengertian di atas, maka penulis menggunakan tiga pendekatan di dalam permasalahan ini, yaitu : (1) Pendekatan Sejarah Politik (*Political History Approach*), (2) Pendekatan Ekonomi Politik (*Political Economy Approach*) dan (3) Pendekatan Pribadi (*Personality Approach*).

Pendekatan sejarah politik tidak hanya memaparkan kejadian, tetapi juga menjelaskan penyebab kejadian tersebut, karena sejarah dapat menjelaskan kejadian lampau dan masa kini serta dapat memproyeksikan untuk masa yang akan datang. Sejarah politik merupakan gambaran fakta-fakta politik dalam setiap peristiwa, baik secara institusional maupun secara inkonstitusional (tidak melembaga) yang terjadi dalam kehidupan negara dalam hubungannya dengan kondisi eksternal dan internal suatu negara. Sejarah mempunyai proyeksi yang menarik dari garis masa lalu untuk dijadikan pedoman masa kini dan masa datang. Dengan demikian pengkajian proses terjadinya suatu peristiwa melalui pendekatan sejarah akan memberikan pedoman dalam menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan di masa datang.

Pendekatan sejarah politik dalam tulisan ini dipakai untuk melihat latar belakang kebijaksanaan politik masa lalu yang diterapkan oleh pemerintahan

⁷⁴ *Jurnal Ilmu politik*, Nomor 1, PT AIPI, Jakarta, 1986, hal. 3.

⁷⁵ *The Liang Gie*, *op.cit.*, hal. 95.

Singapura pimpinan Lee Kuan Yew sampai dengan kebijakan yang dilakukan Goh Chok Tong menjelang diadakannya Pemilu tahun 1991. Adanya kebijaksanaan yang diterapkan tersebut setidaknya telah memberikan dampak terhadap budaya politik yang ada dan berkembang di Singapura.

Pendekatan Ekonomi Politik ditujukan untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi politik. Penelaahan suatu peristiwa politik akan lebih berhasil apabila didukung oleh penelaahan suatu peristiwa ekonomi. Apalagi dengan keadaan yang terjadi di Singapura, faktor ekonomi memegang peran yang sangat besar dalam arah kebijakan politik. Setiap pertumbuhan ekonomi yang disusul dengan semakin modernnya suatu masyarakat akan ditunjang dengan peningkatan partisipasi politik. Hal ini mulai nampak di Singapura sejak pertengahan tahun 1980-an dimana jumlah golongan muda yang terdidik sebagai akibat peningkatan taraf hidup rakyat ikut bertambah. Golongan muda mempunyai orientasi baru yaitu menginginkan perlunya partisipasi politik yang lebih besar bagi rakyat Singapura.

Pendekatan personality digunakan karena profil Goh Chok Tong sendiri berbeda dengan Lee Kuan Yew yang selama 31 tahun memerintah sejak 1959 sampai dengan 1990. Lee Kuan Yew memiliki gaya kepemimpinan yang agak keras, sehingga jarang memberikan peluang terhadap aspirasi dan kritik dari rakyat terhadap pemerintah. Sebaliknya Goh Chok Tong dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang bersifat partisipatoris, akomodatif dan kooperatif. Disamping berdampak positif, namun karakteristik Goh seperti juga berakibat negatif karena telah memunculkan keberanian rakyat untuk mengkritik pemerintahannya dan memilih partai selain *PAP*. Kebebasan yang diterapkan oleh Goh ternyata mampu dimanfaatkan oleh partai oposisi untuk menghimpun massa yang lebih besar lagi guna mendukungnya dalam Pemilu tahun 1991.

BAB II

MASA KEPEMIMPINAN LEE KUAN YEW (1959-1990) DAN GOH CHOK TONG (1990-1991)

2.1 Masa Kepemimpinan Lee Kuan Yew (1959-1990)

Lee Kuan Yew mulai memerintah Singapura sejak kemenangan partainya yaitu Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party*) pada Pemilu tahun 1959.¹ Pada awal kepemimpinannya, Lee dihadapkan pada berbagai masalah diantaranya, kemiskinan, keterbelakangan dan banyaknya pengangguran. Namun, dengan kerja keras dan dukungan rakyat Singapura Lee Kuan Yew berhasil membawa Singapura menjadi sebuah negara yang paling maju di Asia Tenggara dengan pendapatan negara sebesar 92 milyar dolar AS pada tahun 1989 dan pertumbuhan ekonomi rata-rata 8% per tahun.² Walaupun tidak memiliki sumber kekayaan alam, Lee mampu memanfaatkan posisi Singapura yang strategis sebagai salah satu pelabuhan tersibuk di dunia.

Kebijakan Pembangunan yang menitikberatkan pada bidang ekonomi membutuhkan stabilitas sosial dan politik yang mantap agar program-program pembangunan ekonomi tersebut bisa berjalan dengan lancar. Sejarah masa lalu (pada awal *PAP* memerintah Singapura) yang diwarnai pertentangan dan ancaman dari faksi Komunis membuat pemerintah menggunakan cara-cara yang represif dalam mengendalikan keamanan nasional. Ketakutan dan kekhawatiran pemerintah terhadap Komunis yang sewaktu-waktu bisa muncul lagi membuat pemerintah menerapkan aturan yang terlalu ketat dan sangat membatasi kebebasan politik rakyat. Dan secara tidak langsung hal ini membawa konsekuensi lemahnya tingkat partisipasi politik. Salah satu dampak yang terlihat yaitu sulitnya partai oposisi menyaingi dominasi *PAP* dalam parlemen dan kabinet. Selain adanya tekanan pemerintahan *PAP* terhadap oposisi, ketidakmampuan partai oposisi dalam menawarkan program yang lebih baik dibanding *PAP* juga menyebabkan

¹ Hussin Mutalib, "Singapore's 1991 General Election" dalam *Southeast Asian Affairs 1992*, Institute of Southeast Asian Studies Heinemann Educational Books (Asia) LTD, Singapura, 1992, hal. 301.

² *Merdeka*, 8 Agustus 1990.

partai oposisi tidak pernah bisa hadir sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan. Bahkan oposisi tidak mampu meraih satu kursipun dalam parlemen selama empat kali pemilu sejak tahun 1968-1980.³ Baru pada tahun 1981 oposisi mampu menempatkan salah satu wakilnya dalam Parlemen, *JB. Jeyaretnam*, berkat kemenangannya pada pemilu tambahan (*by election*) tahun 1981 untuk mengisi kursi parlemen yang kosong akibat ditinggalkan *Devan Nair* yang diangkat menjadi Presiden Singapura.⁴ Keberadaan oposisi di parlemen bisa dipertahankan oleh partai oposisi dengan selalu menempatkan wakilnya dalam lembaga tersebut pada pemilu tahun 1984 dan 1988. Namun, jumlah oposisi yang minim dibanding *PAP* membuat oposisi belum mampu berbuat banyak dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

Pada tanggal 26 November 1990 Lee Kuan Yew mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Singapura setelah memerintah Singapura selama 31 tahun (1959-1990).⁵ Walaupun tidak mendapatkan tuntutan untuk mundur, namun kesadaran bahwa kekuasaan itu tidak akan bisa berlangsung selamanya dan perlunya ada regenerasi kepemimpinan, menyebabkan Lee Kuan Yew tetap memutuskan untuk mengundurkan diri. Goh Chok Tong yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi I Perdana Menteri ditunjuk menggantikan Lee Kuan Yew dan secara resmi memerintah Singapura mulai tanggal 28 November 1990.⁶

2.1.1 Pemerintahan Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party / PAP*) di Bawah Lee Kuan Yew

A. Berdirinya Partai Aksi Rakyat

Lee Kuan Yew bersama-sama dengan Rajaratnam, Goh Keng Swee, Toh Chien Chye dan beberapa teman yang lain pada tanggal 23 Oktober 1954 mengumumkan niatnya membentuk satu partai baru.⁷ Kemudian pada tanggal 21 November 1954, di daerah buruh yaitu di sebuah pelabuhan, tepatnya di gedung

³ *Ibid*

⁴ *Kompas*, 17 November 1984.

⁵ *Business News*, 28 November 1990.

⁶ *Editor*, 8 Desember 1990.

⁷ *Kompas*, 18 November 1984.

Victoria Hall secara resmi terbentuk Partai Aksi Rakyat (*People Action Party/PAP*).⁸ Untuk pertama kalinya, Lee Kuan Yew terpilih sebagai Sekjen Partai Aksi Rakyat.

Lee dan teman-temannya telah menanti sekitar lima tahun sejak tahun 1949, sebelum akhirnya mereka mendirikan *PAP*.⁹ Pada tahap awal pembentukannya Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party*) sesungguhnya merupakan partai yang rapuh dan tidak punya massa.¹⁰ Modal *PAP* waktu itu tidak lebih dari sejumlah intelektual muda yang bertekad memperjuangkan kemerdekaan Singapura sebagai negara yang berdaulat. Intelektual muda itu diantaranya, Lee Kuan Yew seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cambridge Inggris, ekonom Goh Keng Swee serta psikolog Toh Chin Chye, yang ketiganya merupakan pendiri *Malayan Forum* yaitu suatu kelompok diskusi mahasiswa asal Singapura di London pada tahun 1949.¹¹ Mereka bertemu secara teratur membicarakan gagasan kemerdekaan negara pulau itu. Selain ketiga orang itu masih ada seorang lagi yang juga dipandang sebagai perintis berdirinya *PAP*, yaitu wartawan *Singapore Standart* Sinnathanby Rajaratnam, yang pada waktu itu ia menjabat sebagai Ketua Serikat Wartawan Singapura.¹² Lee sendiri secara pribadi juga aktif menggalang basisnya diantara kaum buruh, sebagai penasihat hukum serikat-serikat buruh itu.

Untuk mencegah terjadinya penolakan dari pihak Partai Komunis Malaya, maka *PAP* dinyatakan sebagai gerakan kaum nasionalis yang mencari dukungan dari semua pihak yang menentang kolonialisme.¹³ Tujuan pokok *PAP* adalah memperoleh kemerdekaan nasional bagi Malaya, termasuk Singapura, tanpa menggunakan kekerasan. Dalam manifesto *PAP*, secara khusus disampaikan himbauan kepada kaum buruh ("Kita harus mengurangi ketidaksamaan kebudayaan dan menjamin agar kaum buruh dengan tangan dan otaknya

⁸ *Ibid.*

⁹ *Tempo*, 10 September 1988.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Kompas*, 18 November 1984.

¹² *Tempo*, 10 September 1988, hal. 34.

¹³ Alex Josey, *Lee Kuan Yew Perjuangan Untuk Singapura*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal. 168.

memperoleh buah sepenuhnya dari kerajinan dan usaha mereka”), “Kami bersedia bekerjasama dengan partai-parti politik lain yang benar-benar berminat untuk mencapai kemerdekaan yang nyata, bukan yang palsu bagi negeri kita,” demikian dinyatakan di dalam manifesto.¹⁴ Di dalam pidatonya Lee Kuan Yew mengatakan, tidak mungkin ada kompromi mengenai tuntutan atas kemerdekaan yang segera. Kami menolak konstitusi-konstitusi Singapura dan Federasi Malaya, karena kekuasaan dan kontrol tertinggi masih ada dalam kekuasaan Kolonial, dan bukan berada di tangan rakyat. Tidak dapat kami menerima konstitusi yang membatasi kedaulatan rakyat”.¹⁵ Dari apa yang disampaikan dalam manifesto *PAP* dan pidato Lee inilah awal dukungan rakyat kepada *PAP*.

B. Mengusahakan kemerdekaan Singapura

Lee Kuan Yew memerintah Singapura bersama Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party-PAP*) sejak tahun 1959, ketika *PAP* memenangkan Pemilu dengan meraih 53,4% suara dari jumlah suara yang masuk dan merebut 43 dari 51 kursi yang ada di Parlemen.¹⁶ Kemenangan ini tidak terlepas dari kepandaian Lee dan teman-temannya yang tergabung dalam *PAP* mensosialisasikan program-program dan tujuan partai kepada masyarakat. Lee mengatakan bahwa tujuan utama *PAP* adalah: mengakhiri kolonialisme dan mendirikan negara nasional Malaya merdeka yang terdiri atas “wilayah-wilayah yang sekarang dikenal sebagai Federasi Malaya dan Koloni Singapura”; menciptakan pemerintah kesatuan Malaya yang demokratis, yang berdasar atas hak pilih yang umum bagi orang dewasa yang dilahirkan di Malaya atau yang mengambil kebangsaan Malaya; meniadakan ketidaksamaan yang tidak adil dalam hal kekayaan dan kesempatan, yang “menjadi sifat sistem yang ada sekarang”; mendirikan suatu orde ekonomi yang akan memberikan hak kepada semua warga negara untuk bekerja” dan imbalan ekonomi yang penuh bagi kerja dan ketrampilan mereka; memberikan kehidupan yang layak dan jaminan sosial

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Muttalib., loc.cit.*

kepada semua orang yang tidak dapat lagi bekerja karena sakit, lemah atau tua usia; menanamkan di dalam diri rakyat Malaya semangat kesatuan nasional, semangat penghormatan diri dan pengendalian diri, dan menimbulkan di dalam diri mereka semangat usaha dalam menciptakan masyarakat yang makmur, mantap dan adil.¹⁷

Sebenarnya upaya Lee untuk memerdekakan Singapura sudah nampak pada waktu pemerintahan *David Marshall* dari Partai Buruh tahun 1955. Pada saat itu Singapura merupakan semacam wilayah otonomi dari pemerintahan kolonial Inggris. Salah satu program David adalah mengusahakan kemerdekaan Singapura.¹⁸ David kemudian membawa satu delegasi yang salah satu diantaranya Lee Kuan Yew, untuk pergi ke Inggris membicarakan niat kemerdekaan Singapura.¹⁹ Namun, niat itu ditolak untuk sementara oleh Inggris karena adanya kekhawatiran dari Inggris apabila Singapura merdeka maka akan menjadi pos Komunisme terdepan di Asia Tenggara.²⁰

Kegagalan program untuk memerdekakan Singapura membuat David Marshall mengundurkan diri dan digantikan oleh *Lim Yie Hock*, seorang tokoh dari Front Buruh Sosialis.²¹ Program pertama Lim adalah membersihkan Singapura dari unsur-unsur komunis.²² Serangkaian penangkapan dijalankan dan ribuan simpatisan komunis dalam tubuh *PAP* dipenjara.²³ Lee sendiri sebagai Sekjen *PAP* turut mengadakan konsolidasi partai dan membersihkan partai dari unsur-unsur Komunis.²⁴

Pada tahun 1963 Inggris menyerahkan kedaulatannya kepada Singapura dengan bentuk Federasi dengan Malaysia.²⁵ Lee mengharapkan bahwa dengan penyatuan dalam Federasi Malaysia akan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Namun,

¹⁷ Josey., *op.cit.* hal. 169.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Kompas*, 27 April 1987.

²⁰ *Kompas*, 16 Mei 1988.

²¹ *Merdeka*, 27 Januari 1984.

²² *Ibid.*

²³ *Tempo*, 10 September 1988.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Merdeka*, 8 Agustus 1990.

kebijaksanaan yang ditempuh *Tunku Abdul Rahman* sebagai Perdana Menteri Malaysia nampaknya hanya memberikan keuntungan bagi salah satu ras yaitu ras Melayu saja. Hal itu telah membuat Lee kecewa karena dengan mengutamakan ras Melayu saja, hanya akan menguntungkan Malaysia yang didominasi ras Melayu. Selain itu, Tunku juga menjalankan kebijakan perekonomiannya tanpa konsultasi dengan Singapura. Kekecewaan Lee memuncak dan memutuskan untuk memisahkan diri dari Federasi Malaysia pada tahun 1965.²⁶ Tidak lama setelah itu yaitu, pada tanggal 9 Agustus 1965 Singapura menjadi negara yang merdeka dan berdaulat penuh serta secara resmi menjadi Republik pada tanggal 22 Desember 1965.²⁷

2.1.2 Awal Pemerintahan Partai Aksi Rakyat.

A. Pertentangan dengan kaum Komunis.

Pada saat memproklamasikan sebagai gerakan Nasionalis yang bebas dan mencari dukungan dari semua pihak yang menentang Kolonialisme, termasuk dari kaum Komunis, Lee sudah menduga bahwa orang-orang Komunis dalam *PAP* akan melakukan usaha-usaha untuk merebut partai itu. Dugaan itu terbukti ketika dalam konferensi partai yang ketiga pada tahun 1957 orang-orang yang pro-Komunis berusaha menguasai Komite Eksekutif Sentral.²⁸ Anggota komite ini akan menjadi anggota Dewan Keamanan Dalam Negeri yang bertanggung jawab mengambil keputusan-keputusan mengenai keamanan dalam negeri Singapura.

Ketika hasil pemberian suara untuk pengurus diumumkan, ternyata enam kursi jatuh ke tangan orang-orang yang pro-Komunis (dengan jumlah 4.858 suara) dan enam kursi yang lain jatuh ke tangan orang-orang yang non-Komunis (5.380 suara).²⁹ Keberhasilan orang-orang pro-Komunis memperoleh kursi-kursi komite menurut Toh Chin Chye karena mereka telah memenuhi konferensi dengan orang-orang pro-Komunis yang bukan anggota *PAP*. Lee Kuan Yew dan Toh Chin

²⁶ *Merdeka*, 27 Januari 1984.

²⁷ *Kompas*, 16 Mei 1988.

²⁸ Josey., *loc.cit.*

²⁹ *Ibid.*, hal. 170

Chye, yang bertindak sebagai sekjen dan ketua partai menolak untuk menduduki jabatan tersebut karena sadar tidak bisa menguasai partai lagi.³⁰

Kepengurusan Komite Eksekutif Sentral lalu dikuasai oleh pihak pro-Komunis dengan ketuanya Tan Chong Kin dan T.T. Rajah sebagai sekjen. Tetapi tidak lama setelah itu lima orang dari orang-orang Komite Eksekutif Sentral yang pro-Komunis ditangkap. Mereka termasuk diantara 35 orang yang ditahan pemerintah Front Buruh karena kegiatan subversi Komunis yang telah menjadi semakin sering dan terang-terangan.³¹ Akhirnya Toh Chin Chye serta Lee Kuan Yew bisa menguasai Partai Aksi Rakyat kembali.

Untuk menjamin agar orang-orang Komunis tidak dapat merebut kekuasaan partai atau membahayakannya di masa depan, diadakanlah empat jenis keanggotaan, sesudah konferensi partai tahun 1957. Empat jenis keanggotaan itu adalah: anggota percobaan, anggota biasa, anggota kader percobaan dan anggota kader penuh.³² Hanya anggota-anggota yang telah memberikan sumbangan penting kepada partai dapat menjadi anggota kader penuh, dan dengan demikian dapat mengambil bagian dalam pemilihan komite. Kebijakan ini telah membatasi orang-orang pro-Komunis sehingga sulit untuk bisa menguasai partai kembali.

Ketika Lee berhasil memenangkan pemilu tahun 1959, para pimpinan Komunis, termasuk Lim Chin Siong masih mendekam di penjara. Lee Kuan Yew diminta oleh Gubernur Inggris yang terakhir, *Sir William Goode*, untuk membentuk pemerintahan, tetapi Lee menolak, sebelum Lim dan tahanan-tahanan PAP pro-Komunis yang lain dibebaskan.³³ Menurut Lee, jalan terbaik untuk memukul orang-orang Komunis adalah dengan argumen terbuka, bukan dengan menjebloskan penentang-penentang politik ke dalam penjara.³⁴ Keinginan Lee untuk membebaskan para pengikut Komunis akhirnya disetujui oleh *Sir William Goode* dan bahkan Lim Chin Siong diberi kedudukan junior dalam pemerintahan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hal. 171.

³⁴ *Ibid.*

yang baru dibentuk sebagai sekretaris politik Menteri Keuangan, Dr. Goh Keng Swee, seorang non-Komunis yang tak kenal kompromi.³⁵ Namun, dalam hal ini Lim tidak diberikan tugas-tugas eksekutif dan tidak boleh melihat surat-surat rahasia, sehingga peran Lim menjadi sangat terbatas.

Lee Kuan Yew dan teman-temannya dari faksi non-Komunis masih sangsi terhadap Lim, walaupun ia telah menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa ia telah meninggalkan partai Komunis dan menerima garis sosialisme demokrasi yang ditempuh *PAP*. Hal ini terbukti satu tahun kemudian, ketika orang-orang pro-Komunis membangun kekuatannya dalam serikat-serikat buruh dan pelan-pelan mengerogoti pengaruh dan prestise pemerintah melalui kaum buruh. Akhirnya, pada bulan Agustus 1961 orang-orang Komunis dengan dipimpin Lim Chin Siong meninggalkan *PAP* dan membentuk partai sendiri dengan nama Barisan Sosialis. Partai ini mampu menjadi suatu partai yang besar dengan memanfaatkan sisa-sisa pengikutnya dan kepandaianya dalam menggalang massa.

Perkembangan yang cukup pesat dari Barisan Sosialis tersebut mengkhawatirkan *Tunku Abdul Rahman*. Perdana Menteri Malaysia ini khawatir Komunis akan menjadi pihak yang berkuasa apabila Singapura merdeka. Sebenarnya Tunku sendiri tidak pernah punya keinginan untuk mengadakan penyatuan antara Malaysia dengan Singapura, karena menurutnya penyatuan itu berarti bahwa orang-orang Melayu akan dilanda oleh orang-orang Cina. Namun dengan adanya suatu perserikatan antara Serawak, Sabah, Brunei, Singapura dan Malaysia dalam suatu negara Federasi diharapkan oleh Tunku akan menciptakan suatu perimbangan yang hampir sama antara orang-orang Melayu dan non-Melayu. Tunku menduga bahwa dengan jalan ini orang-orang Komunis yang kebanyakan terdiri atas orang Cina secara politik akan dapat dihambat. Mengetahui akan bahaya tersebut, maka orang-orang Komunis menolak penyatuan tersebut. Mereka menghendaki federasi ini tanpa mengikutsertakan

³⁵ *Ibid.*, hal. 149.



Sabah, Serawak dan Brunei dengan harapan akan memberikan kemungkinan dominasi Cina atas Melayu yang berarti juga dominasi Komunis di Malaya.³⁶

Usaha pihak Komunis tersebut gagal karena tidak mendapat dukungan dari rakyat. Hal ini terlihat ketika pada tanggal 1 September 1962 diadakan suatu referendum untuk memberi pilihan kepada rakyat mengenai penyatuan Singapura dalam Federasi Malaysia. Dari hasil referendum tersebut 70% suara mendukung penyatuan Singapura ke dalam Federasi Malaysia dan hanya sekitar 30% saja yang menolak penyatuan tersebut.³⁷ Rakyat nampaknya lebih memilih kemajuan dalam bidang ekonomi sebagaimana yang diharapkan Lee Kuan Yew dibandingkan mengurus berbagai urusan politik yang dikemukakan oleh pihak Komunis.³⁸ Lee berharap penggabungan dengan Malaysia ini akan menguntungkan perekonomian Singapura, karena Inggris akan menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan mendirikan pangkalan karet dan timah yang digalinya dari Malaysia.³⁹

Dukungan dari rakyat ini merupakan pukulan telak bagi pihak Komunis. Perkembangan yang ada telah menunjukkan bahwa *PAP* lebih mendapat dukungan dibanding kaum Komunis di bawah Barisan Sosialis. Lim Chin Siong sebagai pemimpin Barisan Sosialis mulai berpikir untuk meninggalkan cara-cara konstitusional dalam mencapai kekuasaan. Barisan Sosialis makin lama makin beralih kepada kegiatan rahasia dan memberikan lebih banyak dukungan kepada bentuk-bentuk kekerasan dalam kegiatan anti Malaysia. Mereka mendapat bantuan dari A.M. Azahari, pemimpin Partai Rakyat dari Brunei. Rencananya ialah bahwa pemberontakan Azahari di Brunei akan didukung demonstrasi-demonstrasi Komunis dan lain-lain bentuk aksi langsung di wilayah-wilayah Malaysia, dan tentu saja termasuk juga Singapura. Pemberontakan meletus pada tanggal 8 Desember 1962, tetapi karena merasa tidak yakin akan berhasil, maka Azahari melarikan diri ke Manila, Philipina.⁴⁰

³⁶ *Tempo*, 1 September 1990.

³⁷ Josey, *op.cit.*, hal. 146.

³⁸ *Merdeka*, 27 Januari 1984

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Josey, *op.cit.*, hal 151.

Dua bulan kemudian, pada tanggal 1 Pebruari 1963 Dewan Keamanan Dalam Negeri Singapura bersidang.⁴¹ Pemerintah-pemerintah Inggris Raya, Singapura dan Malaysia diwakili dalam Dewan Keamanan ini. Sidang tersebut diadakan untuk membahas situasi keamanan di Singapura sesudah meletusnya kekerasan di Brunei.⁴² Sebuah buku putih menyatakan bahwa dukungan terbuka Barisan Sosialis terhadap pemberontakan bersenjata di Brunei dan hubungan erat partai tersebut dengan para pemimpin pemberontakan menunjukkan bahwa mereka siap untuk “dimana ada kesempatan” meninggalkan cara-cara konstitusional dan membahayakan pertahanan nasional dan keamanan Singapura dengan menggabungkan diri dengan kelompok-kelompok yang menempuh jalan kekerasan dan pertumpahan darah.⁴³ Semua anggota Dewan setuju untuk mengambil tindakan guna menyelamatkan pertahanan dan keamanan Singapura serta wilayah-wilayah yang diusulkan akan menjadi bagian dari Federasi Malaysia.⁴⁴ Akhirnya pemerintah menahan pimpinan Komunis, Lim Chin Siong dan orang-orang yang dianggap terlibat dalam pemberontakan di Brunei. Tindakan pemerintah ini merupakan upaya penyelamatan terhadap kondisi instabilitas politik yang dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan ekonomi yang sedang berjalan. Cara-cara kekerasan yang ditempuh oleh Komunis di atas telah membuat perasaan antipati yang lebih jauh kepada Komunis, baik dari pemerintahan *PAP* maupun dari rakyat Singapura.

Tanda-tanda mulai berkurangnya dukungan kepada Komunis terlihat ketika *PAP* mampu mengulang sukses tahun 1959 dengan memenangkan pemilu pada tahun 1963. *PAP* mampu memperoleh 37 kursi (46,4% suara) dan Barisan Sosialis hanya mampu mendapatkan 13 kursi dari total 51 kursi yang ada.⁴⁵ Selama dua tahun faksi Komunis berjuang di dalam parlemen dan pada tahun 1965 setelah kemerdekaan Singapura mereka keluar dari Parlemen.⁴⁶ Pada Pemilu

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Muttalib., *loc.cit.*

⁴⁶ Chan Heng Chee, *Demokrasi Dan Kapitalisme Perpektif Asia dan Amerika*, CIDES, Jakarta, 1994., hal. 16.

tahun 1968 Barisan Sosialis mengalami perpecahan internal dan akhirnya memutuskan untuk tidak ikut serta dalam Pemilu tahun 1968. Sejak saat itu *PAP* mampu mendominasi semua kursi karena keberhasilan *PAP* dalam program pembangunan ekonominya dan lemahnya partai-partai lain.⁴⁷

2.1.3 Dominasi Politik Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party*)

A. Ideologi Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party*)

Ideologi dapat dirumuskan sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh suatu masyarakat, dan mengenai cara-cara yang paling dianggap baik untuk mencapai tujuan.⁴⁸ Tujuan dan cara itu secara moral dianggap paling baik dan adil bagi penghayatnya untuk mengatur perilaku sosial warga masyarakat dalam berbagai segi kehidupan di dunia ini. Dengan rumusan itu dapat disimpulkan ada dua fungsi ideologi dalam masyarakat. *Pertama*, menjadi tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai bersama oleh suatu masyarakat.⁴⁹ Dengan demikian, ideologi menjadi pedoman dalam membuat keputusan politik dan menjadi patokan (alat ukur) untuk menilai keberhasilan pelaksanaan keputusan politik. *Kedua*, sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya menjadi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁰

Keberhasilan Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party / PAP*) mendominasi pemerintahan Singapura tidak terlepas dari ideologi yang dijalankan oleh *PAP*. Ideologi yang digunakan *PAP* adalah "*survival*" dan "*pragmatisme*". Berbagai masalah yang dihadapi bangsa seperti, ketidakmampuan ekonomi Singapura, ancaman kaum Komunis dan tantangan dari negara tetangga yang mengkhawatirkan penyebaran Komunis di Asia Tenggara yang disebabkan mayoritas penduduk Singapura yang etnis Cina.⁵¹ Adanya kenyataan tersebut

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1982., hal. 48.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Chua Beng Huat, "*Singapore*", dalam Norma Mahmood (ed), *Rethinking Political Development in Southeast Asia*, University of Malaya Press, Kuala Lumpur, 1994., hal. 126.

menuntut suatu kesadaran dan pengorbanan yang tinggi dari seluruh rakyat agar bersama-sama berjuang mengatasi problem bangsa tersebut.

Ketidakmampuan ekonomi di Singapura pada awal pemerintahan PAP ditunjukkan dengan adanya beberapa indikasi, seperti, keterbelakangan yang dialami oleh sebagian besar rakyat Singapura ditandai dengan kurangnya tenaga yang terampil serta berpendidikan tinggi, sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran yang cukup besar di Singapura.⁵² Indikasi lainnya adalah tidak adanya sumber-sumber kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan sehingga tidak bisa diharapkan untuk menghidupi kebutuhan rakyat.⁵³ Indikasi ketiga adalah kemiskinan dan kemelaratan rakyat yang ditandai dengan rendahnya pendapatan perkapita rakyat dan tingkat kesejahteraan mereka.⁵⁴

Selain masalah ketidakmampuan ekonomi, faktor lain yang merupakan tantangan terhadap kelangsungan hidup bangsa adalah ancaman dari negara-negara tetangga terdekatnya yaitu Indonesia dan Malaysia.⁵⁵ Mayoritas penduduk Singapura yang berasal dari ras Cina dianggap sebagai suatu ancaman oleh dua negara tetangga yang mayoritas penduduknya muslim tersebut. Anggapan tersebut disebabkan adanya kekhawatiran bahwa Singapura akan dijadikan sebagai pusat penyebaran Komunis di Asia tenggara.⁵⁶ Singapura juga dianggap sebagai negara Cina ketiga "*Third China*" setelah Republik Rakyat Cina dan Taiwan yang sewaktu-waktu dapat membahayakan kestabilan politik di kawasan Asia Tenggara.⁵⁷

Ancaman dari kaum Komunis merupakan hal terakhir dari masalah kelangsungan hidup di Singapura. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Komunis dalam rangka mempengaruhi rakyat dan merebut kekuasaan di Singapura dianggap telah membahayakan situasi kestabilan politik dan keamanan. Tindakan tersebut sudah menjurus pada berbagai kegiatan kekerasan dan bahkan lebih jauh lagi berupa pemberontakan. Pihak Komunis mampu mempengaruhi

⁵² *Merdeka*, 28 Januari 1984.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Huat dalam Mahmood (ed), *op.cit.*, hal. 126.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

kaum buruh yang rata-rata mempunyai pendapatan yang sangat rendah dan rentan terhadap setiap masalah yang menyangkut kebutuhan dasar untuk melakukan pemogokan dan demonstrasi kepada pemerintah.⁵⁸ Selain itu, Komunis juga terbukti turut berperan serta dan bekerja sama dalam pemberontakan di Brunei dan merencanakan pemberontakan yang sama di Singapura.⁵⁹ Hal tersebut nampaknya merupakan ancaman yang sudah sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup bangsa Singapura. Berbagai problem bangsa tersebut mau tidak mau menuntut untuk segera diselesaikan oleh pemerintah Singapura dengan dukungan penuh dari rakyat.

PAP menggunakan "pendekatan yang realistis dan praktis"⁶⁰ untuk mencapai tujuan-tujuan politik, ekonomi dan sosial. Beragamnya problem ekonomi yang dihadapi bangsa menyebabkan perjuangan demi kelangsungan hidup berjalan sangat berat. Tidak adanya sumber kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan membuat negara tidak memiliki sumber keuangan yang bisa diharapkan dapat menopang kelangsungan hidup bangsa. Jalan keluar yang ditempuh agar negara memiliki sumber keuangan yang cukup untuk pelaksanaan program-program pembangunan adalah dengan mengundang masuknya investor asing ke Singapura.⁶¹ Cara lain yang juga ditempuh yaitu dengan melanjutkan program Tabungan Nasional (*Central Provident Fund / CPF*). Maksud dari program ini adalah bahwa setiap warga masyarakat diharuskan menyisihkan pendapatannya untuk ditabung kepada negara dan baru bisa diambil setelah pensiun atau tidak bekerja lagi.⁶² Masuknya investor asing dan keberadaan *CPF* nampaknya mulai terlihat hasilnya dengan dimulainya proses industrialisasi di Singapura pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1970-an dan menurunnya jumlah pengangguran yang ada di Singapura.

Kestabilan politik, kemajuan ekonomi dan keterpaduan sosial di daerah yang selalu digoncang pergolakan dan krisis tidak dapat diciptakan dengan

⁵⁸ Josey, *op.cit.*, hal. 150.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 151.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 279.

⁶¹ *Merdeka*, 28 Januari 1984.

⁶² *Kompas*, 12 November 1984.

mudah. Oleh karena itu “permintaan besar” telah diajukan kepada rakyat dalam hal pengorbanan, usaha dan disiplin. Hal ini merupakan harga yang harus dibayar oleh seluruh rakyat Singapura demi industrialisasi, modernisasi dan keamanan. Berkat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang praktis dari pemerintah dan berkat daya tahan serta keuletan rakyat yang tinggi, maka Singapura telah berhasil memperoleh kemajuan ekonomi yang cukup fantastis selama tiga dekade masa pemerintahan *PAP*. Tujuan dan program-program yang dijalankan pemerintah telah berhasil menciptakan suatu masyarakat yang lebih makmur, adil dan merata, mendapatkan perumahan bersubsidi yang mencukupi dalam skala besar, dan dengan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi semua orang.

Seperti telah disebutkan oleh Gramscy pada bab I, bahwa ideologi *PAP* tidak hanya pada tingkat ide saja. Dalam tataran empiris ideologi *PAP* tersebut diwujudkan dengan menetapkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama.⁶³ Hal ini didorong oleh partai yang berkuasa (dalam hal ini adalah *PAP*) yang mempunyai kemampuan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Nilai-nilai moral para elit sangat signifikan untuk mempengaruhi perbaikan nasib hidup rakyat. Ideologi digunakan untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkesinambungan diperlukan untuk menata struktur sosial dan organisasi-organisasi yang ada. Keberhasilan ekonomi sekaligus akan memunculkan legitimasi terhadap konsep-konsep ideologi yang ditawarkan.⁶⁴ Nilai-nilai normatif (nilai-nilai yang dianggap benar) mengenai konsep-konsep ideologi yang dianut oleh para elit politik ditransformasikan kepada masyarakat berdasarkan pada kepentingan hegemoni ideologi. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang maju di Singapura dipakai sebagai alat untuk mendorong legitimasi politik kepada pemerintah.

⁶³ Chua Beng Huat, *Communitarian Ideology and Democracy in Singapore*, Murdoch University, Western Australia, 1996. hal. 3.

⁶⁴ *Ibid.*

Pemerintahan *PAP* mendapatkan legitimasi⁶⁵ dari rakyat Singapura untuk menentukan arah kebijakan ekonomi yang akan diambilnya. Legitimasi yang diberikan rakyat Singapura terhadap *PAP* tersebut diperoleh dengan dua cara, yaitu; cara materiil dan prosedural. Cara materiil yang dilakukan adalah dengan cara menjanjikan dan memberikan kesejahteraan materiil kepada masyarakat, seperti menjamin tersedianya kebutuhan dasar (*basic needs*) berupa, fasilitas pendidikan, perumahan, dan kesempatan kerja. Sedangkan cara prosedural dilakukan dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Selanjutnya, pemimpin partai pemenang pemilu diangkat sebagai Perdana Menteri dan diberi kewenangan untuk membentuk kabinet yang secara bersama-sama akan merumuskan suatu kebijakan umum.

Wujud dari ideologi "*pragmatisme*" yang dijalankan oleh *PAP* adalah berupa program-program pembangunan ekonomi yang dilakukannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tugas yang berat dihadapi oleh *PAP* dengan adanya kenyataan bahwa Singapura tidak memiliki sumber kekayaan alam yang bisa diandalkan sebagai penyumbang pendapatan negara.⁶⁶ Pada masa itu banyak sekali pemuda pencari kerja yang menanti terbukanya kesempatan kerja agar dapat memperoleh kehidupan yang layak. Selain itu, masalah kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar rakyat Singapura membuat *PAP* memprioritaskan masalah ini sebagai program utamanya. Alternatif yang paling memungkinkan adalah dengan mengundang investor asing masuk dan menjadikan Singapura yang mempunyai posisi strategis – terletak dalam posisi silang perdagangan dunia -- sebagai negara industri serta menjadikannya jalur perdagangan internasional.⁶⁷

⁶⁵ Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Artinya, apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat atau tidak. Apabila masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat maka kewenangan itu dikategorikan sebagai berlegitimasi. Maksudnya, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Dikutip dalam Ramlan Surbakti, *op.cit.*, hal. 92.

⁶⁶ *Merdeka*, 28 Januari 1984.

⁶⁷ Jon S. T. Quah, "*Singapore : Towards a National Identity*", dalam *Southeast Asian Affairs 1977*, Institute of Southeast Asian Studies, Heinemann Educational Books (Asia) LTD, Singapura, 1977. hal. 208.

Langkah pertama yang dilakukan oleh *PAP* adalah membenahi masalah kepadatan penduduk di Singapura dengan menggalakkan program KB.⁶⁸ Masalah ini sangat mengganggu karena peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat di Singapura. Angka kelahiran dari tahun 1960 sampai tahun 1965 adalah mencapai 48.100 orang per tahun. Jumlah pemuda pencari kerja yang berusia 20-30 tahun mencapai 36.000 orang.⁶⁹ Kepadatan penduduk dan tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya taraf hidup dan rawannya keamanan.

Langkah *PAP* selanjutnya adalah makin meningkatkan keberadaan lembaga tabungan masyarakat yang bernama CPF (*Central Provident Fund*).⁷⁰ Lembaga ini berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat sebagai modal bagi pembangunan Singapura. Melalui lembaga ini, masyarakat diwajibkan menabung melalui potongan gaji atau upah tiap bulannya dan tabungan itu baru boleh diambil ketika berumur 65 tahun atau pada saat pensiun (sudah tidak bekerja lagi). Dari dana ini Pemerintah berhasil menciptakan lapangan kerja bagi sebesar 12 ribu pencari kerja antara tahun 1961-1964.⁷¹

Dana Tabungan Nasional (*CPF /Central Provident Fund*) dikelola oleh Bank Pembangunan Singapura (*Development Bank of Singapore*) dan dipakai untuk membangun perumahan modern bagi rakyat serta fasilitas lain, seperti transportasi.⁷² Dalam bidang perumahan ada suatu badan yang mengelola yaitu *HDB (Housing Development Board)* dan telah berhasil menyediakan rumah bagi hampir 80% penduduk. Masalah transportasi dikelola oleh *MRTC (Mass Rapid Transportation Company)* yang telah menghasilkan berbagai jalan bagus yang membuat lancar hubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya.⁷³

Usaha untuk mengurangi pengangguran yang dilakukan oleh pemerintah melalui proses industrialisasi yang dilaksanakannya telah berhasil meningkatkan jumlah pekerja yang sebelumnya sangat menghantui pikiran Lee Kuan Yew. Dampak dari proses industrialisasi itu yaitu meningkatnya jumlah pekerja yang

⁶⁸ *Merdeka*, 28 Januari 1984

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Kompas*, 12 November 1984.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Quah., *op.cit.*, hal. 210.

⁷³ *Ibid.*

ada dalam tahun 1960 yang mencapai 433 ribu pekerja dan dalam tahun 1970 mencapai sekitar 854 ribu pekerja.⁷⁴ Perkembangan ini menjadikan Singapura sebagai negara dengan tingkat pengangguran yang relatif kecil. Pekerjaan dapat diperoleh di toko-toko, restoran-restoran, hotel-hotel atau di pabrik-pabrik. Dalam satu perusahaan, tidak jarang satu keluarga (anak dan orang tua) bekerja bersama. Hal ini menyebabkan peningkatan standar hidup rakyat Singapura.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh rakyat Singapura sangat memerlukan modal yang besar. Disamping modal yang didapat dari dalam yaitu berupa tabungan masyarakat (*Central Provident Fund*), pembangunan tersebut juga memerlukan modal dari luar berupa investasi asing. Untuk menarik modal asing tersebut maka diaturlah segala macam undang-undang yang menjadikan Singapura sebagai surga bagi penanam modal. Undang-Undang tersebut diantaranya, UU tentang Pengembangan Industri Singapura, UU Industri Pionir dan UU Perluasan Industri.⁷⁵

Selain itu, beberapa faktor lain juga telah membuat investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Singapura. Faktor itu diantaranya adalah,⁷⁶ baiknya fasilitas yang diberikan oleh Singapura dan bentuk pelabuhan yang amat diperlukan dalam melancarkan keluar masuknya barang. Hal berikutnya yaitu bahwa Singapura memiliki rakyat yang berpendidikan sehingga menghasilkan tenaga kerja yang trampil dan terdidik. Disamping itu, kemampuan berbahasa Inggris rakyat memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dengan para investor. Pemerintah Singapura juga ikut aktif melancarkan promosi bagi masuknya modal asing serta memberikan insentif yang menarik bagi para investor. Faktor terakhir yang menyebabkan investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Singapura adalah adanya dominasi yang terus menerus dari *PAP* dalam parlemen, sehingga memberikan jaminan stabilisasi politik yang mantap dan memberikan kepastian amannya hari depan modal asing tersebut".⁷⁷

⁷⁴ *Merdeka*, 28 Januari 1984.

⁷⁵ *Kompas*, 18 November 1984.

⁷⁶ *Merdeka*, 28 Januari 1984.

⁷⁷ Lee Boon-Hiock, "Singapore : Reconciling the Survival Ideology with the Achievement Concept", dalam *Southeast Asian Affairs 1978*, Institute of Southeast Asian Studies Heinemann Educational Books (Asia) LTD, Singapura, 1978., hal. 230.

Untuk mensosialisasikan program-programnya kepada masyarakat, pemerintah membentuk suatu badan yang akan berhubungan langsung dengan rakyat. Badan itu berupa organisasi masyarakat yang dikenal dengan Persatuan Rakyat (*People's Association*). Persatuan Rakyat didirikan dengan Akta Parlemen pada tanggal 1 Juli 1960 dan diketuai sendiri oleh Lee Kuan Yew.⁷⁸ Badan ini dibentuk dengan alasan sulitnya pemerintah berhubungan dengan rakyat. Ancaman komunis yang selalu menghasut rakyat membuat mereka takut untuk mendukung dan memihak pemerintah. Pembentukan badan yang tersebar di seluruh lapisan masyarakat ini sangat membantu Pemerintah mensosialisasikan program-programnya.

Langkah yang dilakukan oleh Persatuan Rakyat adalah dengan mendekati 45 perkumpulan sosial yang ada pada waktu itu.⁷⁹ Dengan bantuan dari perkumpulan itu, maka 28 Balai Rakyat yang ada diaktifkan kembali. Selain itu, Balai-Balai Rakyat yang baru, mulai dibangun dengan dilengkapi oleh sarana dan prasarana lingkungan seperti lampu jalan, saluran air dan bina marga. Sampai saat ini, Persatuan Rakyat telah terorganisasi rapi dan tersebar di setiap blok-blok pemukiman rakyat. Balai-Balai Rakyat ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan warga seperti, ruang permainan dan pendidikan untuk anak-anak, bermacam-macam lapangan olah raga, tempat kegiatan wanita dan kerajinan tangan dan banyak lagi lainnya yang semuanya diperuntukkan bagi kebutuhan warga.⁸⁰

B. Dominasi Partai Aksi Rakyat dalam Politik.

Keberhasilan *PAP* sebagai partai dominan di Singapura berkaitan erat dengan rekayasa politik yang diciptakannya, yaitu proses politik yang kurang kondusif untuk demokrasi politik. Salah satu indikatornya misalnya dapat dilihat dari penggunaan *ISA (Internal Security Act)*, yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menahan setiap individu yang dicurigai mengancam dan membahayakan keamanan nasional tanpa melalui proses pengadilan.⁸¹ Tidak

⁷⁸ *Kompas*, 18 November 1984.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Kompas*, 12 November 1984.

⁸¹ *Suara Karya*, 10 Agustus 1988.

mengherankan kemudian bahwa dominasi *PAP* selama tiga dasawarsa di dalam kehidupan kepartaian menempatkan *PAP* sebagai partai yang hampir mutlak monolit.

Kebijakan depolitisasi yang diterapkan pemerintahan *PAP* tidak terlepas dari pengalaman sejarah yang dialami *PAP* pada masa pergolakan diantara dua kelompok yang ada di dalam partai sejak tahun 1954-1961. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa di tubuh *PAP* terdapat pertentangan antara dua faksi yang mempunyai basis massa sendiri-sendiri. Faksi pertama adalah faksi Moderat atau faksi non-Komunis yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew, sedangkan faksi kedua adalah aliran kiri atau faksi pro-Komunis pimpinan Lim Chin Siong. Pengkhianatan yang dilakukan oleh faksi pro-Komunis pimpinan Lim dan kebutuhan akan terciptanya stabilitas politik yang mantap untuk mengundang investor asing bagi program pembangunan ekonomi telah menempatkan Lee dalam posisi yang sulit. Apakah demokratisasi menjamin stabilitas atau sebaliknya? Jalan yang paling aman untuk meminimalisasi resiko adalah lebih menekankan depolitisasi⁸² atau demokrasi formal⁸³ yang pada gilirannya menciptakan formula yang paling aman untuk stabilitas dengan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi.

Pilihan di atas juga didukung oleh adanya kenyataan proses integrasi nasional yang rawan. Pengalaman federasi dengan Malaysia merupakan salah satu trauma historis yang cukup dalam bagi pemimpin dan rakyat Singapura. Pertentangan antara Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman, dengan Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri Malaysia terlihat ketika pemahaman yang tumpang tindih antara kepentingan ras dan kepentingan ekonomi.⁸⁴ Tunku Abdul Rahman mengusulkan Federasi Malaysia ini salah satunya adalah agar ras Melayu tidak tersisihkan oleh ras Cina yang notabene didominasi oleh Komunis.

⁸² Depolitisasi disini dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk menekan atau meminimalisasikan kegiatan politik masyarakat. Jadi yang berperan dalam proses politik atau pengambilan kebijakan umum adalah pemerintah.

⁸³ Pemerintah Singapura menggunakan label "demokrasi parlementer" sebagai bentuk pemerintahannya agar tidak terlihat terlalu otoriter, walaupun pada kenyataannya pemerintahan Singapura tidak bisa dikatakan sebagai pemerintahan yang demokratis. Sehingga bisa dikatakan demokrasi yang ada di Singapura hanya sebagai demokrasi formal atau demokrasi aksara.

⁸⁴ Josey., *op.cit.*, hal. 149.

Tunku lebih menekankan prioritas kebijakan publiknya bagi ras Melayu dengan tujuan untuk mengangkat status ekonominya, sedangkan Lee menekankan kebijakan publik yang bertumpu pada konsep "*multiracialisme*" yaitu bahwa setiap individu memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama.⁸⁵ Kedudukan bagi semua ras adalah sama, yang membedakan adalah kemampuan, prestasi dan keahlian masing-masing orang (*meritokrasi*).⁸⁶ Pertentangan antara Lee Kuan Yew dan Tunku Abdul Rahman memuncak pada saat Lee memutuskan untuk memisahkan diri dari federasi ini pada tahun 1965. Tidak lama kemudian Singapura menjadi negara yang merdeka dan berdaulat penuh pada tanggal 9 Agustus 1965.

Beberapa hal yang menunjukkan bahwa pemerintah Singapura melakukan kebijakan depolitisasi terlihat dari beberapa pendekatan yang dilakukannya antara lain dengan pendekatan "*top down*". Pendekatan "*top down*" berarti bahwa segala inisiatif mengenai kebijaksanaan yang akan ditempuh berasal dari atas (maksudnya elit politik) yang akan ditujukan ke bawah (maksudnya masyarakat).⁸⁷ Menurut Goh, pendekatan top down ini tidak diartikan bahwa "semua datang dan dipaksakan dari atas", melainkan bahwa hal itu didasarkan pada kapasitas dan kapabilitas elit politik merekayasa sistem politik yang diupayakan berakar sampai ke bawah, dengan mengharapkan kesukarelaan masing-masing individu untuk berpartisipasi.

PAP menerjemahkan pendekatan "*top down*" tersebut menjadi suatu sistem politik yang efisien dan terkontrol mulai dari tingkatan teratas sampai yang paling bawah. Maksudnya adalah bahwa para anggota parlemen diharuskan untuk membentuk akses langsung yang praktis ke masing-masing konstituensinya yang jumlahnya puluhan. Hal ini mewajibkan setiap anggota Parlemen mengontak dengan rutin – satu sampai tiga malam setiap minggunya—konstituensinya untuk menyerap aspirasi yang ada sehingga setiap aspirasi yang muncul bisa terkontrol.⁸⁸ Kontak rutin ini bertujuan agar setiap warga mengenal lebih dekat

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Josey., *op.cit.*, hal. 278.

⁸⁷ *Kompas*, 26 Mei 1990.

⁸⁸ *Ibid.*

para wakilnya di parlemen dan sebaliknya, anggota-anggota parlemen juga dengan cepat akan bisa mendeteksi persoalan-persoalan yang terjadi di konstituensinya.

Untuk menjembatani hubungan antara rakyat dengan pemerintah, maka bisa dipergunakan Persatuan Rakyat (*People's Association/PA*) yang merupakan organisasi massa yang menyebar hampir di setiap pelosok negeri.⁸⁹ *PA* memiliki Dewan Manajemen sebagai pembuat kebijakan, yang diketuai langsung oleh Perdana Menteri dan seorang menteri sebagai deputinya. Karena yang berkuasa *PAP*, maka *PA* merupakan kepanjangan politik *PAP*. *PA* lebih berperan sebagai penyalur keinginan pemerintah terhadap warga daripada menyalurkan aspirasi warga terhadap pemerintah. Agar lebih memudahkan kontrol terhadap lapisan partisipan politik di bawah, *PA* membentuk pusat-pusat komunitas (*CC=Community Centre*). Di setiap konstituensi paling sedikit ada sebuah *CC* dan dalam perkembangannya, pada tahun 1988 jumlah *CC* ini tercatat sebanyak 162 buah.⁹⁰

Faktor lain dari kebijakan depolitisasi yang menyebabkan dominasi politik *PAP* adalah adanya tekanan terhadap oposisi dan pembatasan terhadap pemberitaan pers. Salah satu hal yang menyebabkan oposisi tidak bisa berkembang dengan baik adalah adanya UU Keamanan Dalam Negeri yang disebut *ISA (Internal Security Act)* yang membolehkan pemerintah melakukan penahanan terhadap seseorang yang dianggap membahayakan keamanan negara tanpa melalui lembaga peradilan.⁹¹ Keberadaan UU ini benar-benar membuat pihak oposisi tidak berkutik karena setiap pendapat yang berbeda dan bernada mengkritik kebijakan pemerintah dianggap telah melakukan tindakan subversif dan membahayakan keamanan negara. Banyak kaum oposisi yang telah terjerat oleh *ISA* ini tanpa bisa berbuat apa-apa. Salah satu korban dari adanya *ISA* ini adalah Mantan Jaksa Agung, *Francis Seow*, yang pada tanggal 6 Mei 1988

⁸⁹ Chan Heng Chee, *The Dynamics of One Party Dominance The PAP at The Grass-Roots*, Singapore University Press, 1978. Hal. 21.

⁹⁰ *Ibid*.

⁹¹ *Suara Karya*, 10 Agustus 1988.

ditahan selama 72 hari tanpa peradilan karena dianggap telah melakukan pembicaraan dengan pihak Amerika untuk melakukan tindakan subversif.⁹²

Adanya UU Pers yang melarang pers memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan ras dan segala hal yang dapat memecah persatuan bangsa telah membuat pers tidak bisa berkembang dan hanya sebagai alat pemerintah untuk memperkenalkan dan mempromosikan program-programnya. Resiko paling ringan pernah dialami oleh beberapa media massa, diantaranya "*Far Eastern Review, Time, Asiaweek dan Asian Wall Street Journal*" karena dianggap mendukung partai oposisi yang berakibat dibatasinya jumlah majalah mereka yang boleh beredar di Singapura. Demikian juga dengan Undang-undang atau aturan pemilu yang selalu berubah.⁹³ Hal ini menjadikan oposisi sulit untuk menyiapkan strategi yang tepat agar mendapatkan kursi dalam parlemen. Selain itu, sistem distrik yang tidak menghitung suara yang tersisa di masing-masing konstituensi membuat oposisi sulit untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Dalam strategi Pemilu, *PAP* menerapkan pembagian wilayah pemilihan yang disesuaikan dengan penambahan penduduk dan keseimbangan ras, sehingga dominasi *PAP* dijamin pada tingkat paling bawah. Jika wilayah suatu pemilihan terlalu banyak penduduk Melayu atau berpendidikan Cina yang kebanyakan kelas bawah itu, maka wilayah itu dipecah atau digabungkan dengan wilayah lainnya.⁹⁴ Hal itu menyebabkan suara yang menghendaki kehadiran oposisi tidak pernah terkumpul secara bulat dalam satu wilayah. Sebenarnya, dengan suara antara 25 sampai 30 persen yang diperoleh partai oposisi pada pemilu tahun 1984 dan tahun 1988 kelompok oposisi dapat memperoleh 18 kursi dalam parlemen. Namun, karena sistem yang dipakai adalah sistem distrik dan suara yang terkumpul tersebut tidak berada dalam satu wilayah konstituensi, maka yang diperoleh oposisi hanya satu sampai dua kursi saja.

Dominasi *PAP* dalam bidang politik selama masa pemerintahan Lee Kuan Yew tidak pernah bisa tersaingi oleh partai oposisi. Selain karena legitimasi

⁹² *Tempo*, 10 September 1988.

⁹³ *Kompas*, 22 Desember 1984.

⁹⁴ *Ibid.*

politik yang tinggi dari rakyat terhadap pemerintahan PAP, beberapa tindakan represif di atas juga dilakukan agar program dan kebijakan pemerintah bisa terjamin berjalan lancar. Pengalaman masa lalu, yaitu trauma terhadap pemberontakan Komunis telah menyebabkan pemerintah sangat khawatir terhadap munculnya gerakan-gerakan politik yang tidak sepaham dengan mereka. Akibatnya, tindakan represif merupakan satu-satunya jalan yang dianggap paling tepat dan aman untuk mengamankan dan menjamin terkendalinya stabilitas sosial dan politik nasional.

2.1.4 Munculnya Partai Oposisi Dalam Parlemen

Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party*) telah berhasil membawa Singapura dari problematik bangsa berupa kemiskinan, pengangguran yang merajalela, perumahan yang kurang layak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai dan tingkat pendidikan yang rendah. Kemajuan pembangunan ekonomi yang ditandai dengan keberhasilan proses industrialisasi dan modernisasi telah menghasilkan generasi baru yang lebih berpendidikan dibanding dengan generasi pendahulunya. Dengan lahirnya generasi baru yang lebih terdidik tersebut ternyata telah memunculkan suatu orientasi baru yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Orientasi baru tersebut diantaranya adalah mengenai ketidaksenangan kaum muda yang merupakan generasi baru Singapura terhadap pola pemerintahan yang otoriter, demokrasi yang tidak berkembang dan kebebasan politik yang sangat dibatasi. Hal ini merupakan sesuatu perkembangan yang wajar terjadi di mana-mana. Suatu bangsa yang telah terpenuhi kebutuhan fisiknya (termasuk Singapura), yaitu kebutuhan dasar untuk kehidupan sehari-hari maka dengan sendirinya bangsa tersebut mengalami pergeseran kebutuhan. Pergeseran kebutuhan itu diantaranya mengenai hal-hal yang menyangkut kualitas hidup kebersamaan, seperti soal kebebasan berpartisipasi dalam politik dan demokrasi.

Tanda-tanda meningkatnya tuntutan masyarakat tersebut mulai terlihat pada pertengahan tahun 1980-an ketika calon oposisi Chiam See Tong yang berasal dari Partai Demokratik Singapura (*SDP*) dan JB. Jeyaretnam yang berasal

dari Partai Pekerja (*WP*) mampu tampil sebagai wakil oposisi di Parlemen.⁹⁵ Sebenarnya, sejak tahun 1981 JB. Jeyaretnam telah mampu tampil sebagai satu-satunya wakil dari partai oposisi dalam parlemen yang ditandai dengan kemenangannya pada pemilu tambahan / sela di daerah pemilihan Anson.⁹⁶ Namun, ini diperkirakan hanya sebagai akibat kegagalan program perumahan *PAP* dan masih kurang terujinya calon *PAP*, *Pang Kim Hin*, di wilayah itu.⁹⁷ Pada saat itu, pemerintah akan melaksanakan pemindahan pemukiman penduduk di suatu daerah pemukiman, karena di daerah bekas pemukiman itu akan dibangun suatu proyek industri. Sekitar 100 keluarga akan dipindahkan ke suatu wilayah pemukiman rumah susun baru yang letaknya agak jauh dari tempat itu.⁹⁸ Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan ketidaksenangan warga sebab menjadikan tempat kerjanya lebih jauh. Mereka kebanyakan adalah buruh kecil, pegawai dan pedagang kaki lima yang taraf hidupnya masih rendah. JB. Jeyaretnam, seorang ahli hukum, yang memang handal dalam berdebat mampu mengobarkan ketidaksenangan rakyat di daerah Anson tersebut untuk tidak memilih calon dari *PAP*.

Pada pemilu tahun 1984 mulai nampak pergeseran jumlah pemilih dengan masuknya 250 ribu pemilih baru (seperenam dari jumlah penduduk Singapura seluruhnya) yang rata-rata merupakan generasi muda yang terdidik.⁹⁹ Golongan muda yang terdidik tersebut sebagian diantaranya berasal dari pendidikan Barat. Nampaknya ada kecenderungan dari mereka yang melihat bahwa kebebasan politik dan demokrasi seperti yang dianut oleh negara-negara Barat sekiranya juga bisa diadopsi oleh Singapura. Kebebasan dalam berpolitik dan ikut sertanya rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara nampaknya menjadi sesuatu yang didambakan oleh kaum muda tersebut. Kondisi perpolitikan yang begitu otoriter

⁹⁵ Lew Eng Fee, "Singapore in 1988: Uncertainties of A Maturing Polity", dalam *Southeast Asian Affairs 1989*, Institute of Southeast Asian Studies Heinemann Educational Books (Asia) LTD, Singapura, 1989 hal. 279.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Lee Boon-Hiock, "Singapore in 1984: A Time for Reflection and a Time for Change", dalam *Southeast Asian Affairs 1984*, Institute of Southeast Asian Studies Heinemann Educational Books (Asia) LTD, Singapura, 1984 hal. 300.

⁹⁹ Fee., *op.cit.*, hal 280.

di Singapura berusaha diubah oleh generasi muda dan salah satu alternatif yang dilakukannya adalah dengan mendukung oposisi dalam pemilu. Namun, mereka menyadari bahwa sebenarnya partai oposisi sendiri belum layak untuk memimpin Singapura mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh partai oposisi, misalnya; minimnya jumlah kader serta kurangnya kader yang tangguh, terbatasnya sumber keuangan partai sehingga tidak mempunyai jaringan yang kuat di seluruh negeri dan program-program atau isu-isu yang ditawarkan oleh oposisi masih bersifat lokal dan bersifat sesaat. Kondisi Partai Buruh yang hanya mempunyai 40 kader aktif telah membuat partai oposisi tidak mampu berbuat lebih banyak untuk menyaingi *PAP*.¹⁰⁰ Jadi, sebenarnya golongan muda tersebut tidak menghendaki *PAP* kalah, hanya menginginkan perlunya oposisi dalam parlemen.

Selain faktor tersebut di atas, ada faktor lain yang menyebabkan oposisi mampu hadir di parlemen pada pemilu tahun 1984 itu. Faktor tersebut adalah keberhasilan pihak oposisi dalam mempengaruhi massa untuk mendukungnya dengan melontarkan isu-isu yang tepat. Seperti dilakukan oleh wakil oposisi dari Partai Demokratik Singapura (*SDP*), Chiam See Tong, yang menang di daerah Potong Pasir. Chiam mengkritik kebijakan pemerintah yang menganjurkan wanita yang bukan sarjana untuk mempunyai anak dua saja dan tidak memiliki hak istimewa bagi sekolah anaknya.¹⁰¹ Hak istimewa ini adalah bahwa ibu yang sarjana boleh beranak tiga dan berhak memilih sekolah bagi anaknya, sesuai dengan program pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan generasi selanjutnya.¹⁰² Kritik yang dilontarkan selanjutnya adalah mengenai gugatan terhadap rencana pemerintah menaikkan batas usia mengambil kembali tabungan hari tua (*Central Provident Fund*) dari 55 tahun menjadi 65 tahun.¹⁰³ Isu ini amat peka bagi rakyat kecil yang sudah tua, terutama bagi mereka yang mengandalkan dana itu untuk modal berdagang kecil-kecilan setelah tidak kuat lagi bekerja.

¹⁰⁰ *Kompas*, 9 Agustus 1991.

¹⁰¹ Hiock, *op.cit.*, hal. 302.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Kompas*, 8 Januari 1988.

Pada Pemilu tahun 1988, pemerintah berhasil mengantisipasi berbagai isu yang akan digunakan oleh partai oposisi dan mampu mengurangi jumlah kursi bagi oposisi menjadi hanya satu buah saja.¹⁰⁴ Antisipasi yang dilakukan oleh pemerintahan *PAP* ini juga berkaitan dengan menurunnya perolehan suara *PAP* dalam Pemilu tahun 1984. Usaha-usaha yang lebih intensif dilakukan untuk lebih bisa menyerap aspirasi masyarakat, diantaranya dengan membangun berbagai "*feedback institutions*" yang dilakukan segera setelah hasil pemilu tahun 1984 diumumkan.¹⁰⁵

Wakil dari oposisi yang berhasil duduk sebagai satu-satunya anggota parlemen dalam pemilu tahun 1988 ini adalah sekjen *SDP*, *Chiam See Tong*, yang mampu mengalahkan calon *PAP* di wilayah Potong Pasir. Chiam mampu mengalahkan calon *PAP* cukup telak dengan perbandingan 11.804 banding 6.893 suara atau 62,3%.¹⁰⁶ Walaupun mampu mengurangi jumlah kursi bagi partai oposisi, namun secara umum dari segi persentase jumlah suara, *PAP* tetap mengalami penurunan yaitu dari 62,9 % menjadi 63,2%.¹⁰⁷ Kenyataan ini nampaknya mengindikasikan bahwa dominasi *PAP* selama masa pemerintahannya mulai mengalami kemerosotan. Keberhasilannya mengurangi jumlah kursi partai oposisi lebih disebabkan oleh faktor aturan pemilu yang menguntungkan *PAP*, yaitu dengan adanya sistem *GRC* (*Group Representing Constituencies*)¹⁰⁸. Adanya sistem *GRC* ini membuat oposisi yang mengalami kekurangan kader yang tangguh dan kredibel kesulitan untuk memenangkan satu wilayah konstituensi.

2.2 Masa Kepemimpinan Goh Chok Tong (1990-1991)

Goh Chok Tong resmi menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri Singapura pada tanggal 28 November 1990 menggantikan Lee Kuan Yew yang mengundurkan diri melalui suatu suksesi yang damai. Dalam pemerintahan yang

¹⁰⁴ Fee, *op.cit.*, hal. 279.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 282.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Hiock, *op. cit.*, hal. 300.

¹⁰⁸ Dalam sistem *GRC* ini, partai peserta Pemilu mengajukan 3 calonnya dalam satu wilayah konstituensi, dan 1 pemilih akan memberikan suaranya bagi ketiganya, sedangkan yang berhak menduduki kursi parlemen adalah ketiga-tiganya. Dikutip dalam Lew Eng Fee, *op.cit.*, hal. 283.

baru, PM Goh Chok Tong selain masih dikawal Lee Kuan Yew sebagai menteri senior, juga didampingi dua deputi PM, yaitu Ong Teng Cheong dan Lee Hsien Long.¹⁰⁹

Goh Chok Tong memiliki gaya kepemimpinan yang bersifat partisipatoris dan akomodatif. Gaya ini berbeda dengan gaya pendahulunya, Lee Kuan Yew, yang memiliki gaya kepemimpinan yang keras, sehingga jarang memberikan peluang terhadap aspirasi dan kritik dari rakyat. Gaya partisipatoris dan akomodatif Goh mulai jelas nampak pada beberapa kebijakannya yang ditunjukkan dengan pembentukan beberapa institusi, diantaranya; mendirikan suatu "feedback unit" yang berguna untuk menampung dan meminta pendapat rakyat, mendirikan "Government Parliamentary Committees (GPC)", menciptakan "Advisory Councils on Various Social Issues", mendirikan "Institute of Policy Studies" yang digunakan sebagai forum untuk debat, memperkenalkan *Nominated Members of Parliament (NMP)*, dan menampilkan debat di parlemen melalui siaran televisi.¹¹⁰ Pendirian beberapa institusi tersebut membuktikan bahwa Goh benar-benar ingin merubah pendapat umum mengenai keotoriteran rezim PAP. Sifat keras dan jarang mau mendengarkan pendapat orang lain yang menjadi ciri khas gaya Lee tidak nampak pada diri Goh Chok Tong. Sebaliknya, Goh mempunyai gaya kepemimpinan yang lebih terbuka, partisipatif dan akomodatif. Goh menyadari bahwa gaya kepemimpinan yang keras sudah bukan saatnya lagi untuk diterapkan di Singapura yang sebagian besar rakyatnya sudah berpendidikan tinggi dan lebih kritis dibanding pendahulunya. Goh menolak anggapan umum bahwa gaya yang dimiliki Lee Kuan Yew menunjukkan gaya dari keseluruhan anggota PAP, seperti dikatakan oleh Goh:

*"The prime minister's job is huge one. It has been made even larger by Mr Lee Kuan Yew. Any successor will find the shoes he has left too big. I do not intend to wear his shoes. I shall wear my own, and chosen my own stride. I intend to be my self, and set my own style... I therefore call on my fellow citizens to join me to run the next lap together."*¹¹¹

¹⁰⁹ *Pelita*, 3 Januari 1991.

¹¹⁰ Bilveer Singh, *Whither PAP's Dominance ? An Analysis of Singapore's 1991 General Elections*, Pelanuk Publications, Singapura, 1992., hal. 20.

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 22.

Tetapi bagaimanapun perbedaan gaya kepemimpinan tersebut kecil kemungkinan membawa perubahan-perubahan yang bersifat substansial dan elementer seperti masalah sistem politik, strategi pembangunan ekonomi, dan orientasi politik luar negeri. Hal ini dikarenakan masalah-masalah seperti itu merupakan hal yang prinsip dari kebijakan partai dan Goh sebagai bagian dari *PAP* tentunya akan meneruskan hal itu. Seperti pernah ditegaskan oleh Goh:

*"My mission is clear: To ensure that Singapore thrives and grows after Mr Lee Kuan Yew; to find a new group of men and women to help me carry on where he and his colleagues left off; and to build a nation of character and grace where people live lives of dignity and fulfilment, and care for one another. I will do this by building on what Mr Lee and the old guards have achieved. I have been part of MR Lee's team for the last thirteen years. My stress is on continuity, not a break with the past. The torch has passed from one generation of runners to the next. But the races continues."*¹¹²

Pernyataan Goh di atas menunjukkan bahwa falsafah dasar yang dianutnya akan tetap sama dengan yang dianut sebelumnya, dan bahwa pemerintahannya merupakan kelanjutan dari apa yang telah dilakukan pemerintahan Lee. Goh juga menambahkan bahwa kesinambungan akan menjadi pokok persoalan penting dalam pemerintahannya kelak.¹¹³ Selain itu, dalam tradisi perpolitikan Singapura, khususnya perpolitikan *PAP*, tidak pernah dikenal adanya "pengkhianatan" orang muda terhadap orang yang dituakan.¹¹⁴ Bagi Goh, Lee Kuan Yew adalah pemimpin besar yang telah meletakkan dasar-dasar yang benar untuk kejayaan Singapura. Siapapun tokoh *PAP* yang menjadi PM nampaknya tidak akan ada yang membantah keberhasilan dan kebijakan-kebijakan nasional Lee Kuan Yew. Bila kita simak pengasan Goh tersebut maka kecil kemungkinan terjadi perubahan-perubahan besar, baik yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan di dalam negeri maupun perilaku Singapura dalam pergaulan internasional.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Kompas*, 9 Januari 1991.

¹¹⁴ *Ibid.*

2.2.1 Proses Pergantian Pemerintahan

Pada tanggal 28 November 1990, Goh Chok Tong mengucapkan sumpah sebagai Perdana Menteri Singapura. Dua hari sebelumnya, Lee Kuan Yew menyerahkan surat pengunduran dirinya setelah berkuasa selama 31 tahun sebagai Perdana Menteri yang telah mengasuh, membesarkan dan menjadi insan bagi rakyat serta kemajuan ekonomi Singapura. Lee Kuan Yew melepaskan jabatan PM bukan karena kalah dari rival politiknya, namun semata-mata karena kemauannya untuk melakukan regenerasi kepemimpinan. Lee merasa sudah waktunya baginya untuk menyerahkan kekuasaannya kepada generasi selanjutnya dengan harapan bisa menyumbangkan kemampuannya bagi pemimpin Singapura penggantinya. Lee tidak ingin melihat Singapura menjadi hancur karena pemimpinnya tidak bisa membawa Singapura ke arah kemajuan seperti yang telah dirintisnya sebelumnya.¹¹⁵

Dengan adanya peristiwa pengambilan sumpah itu, berarti satu periode telah usai dalam sejarah Singapura dan akan melangkah pada periode berikutnya. Suksesi tahun 1990 merupakan suatu klimaks dari upaya panjang para pemimpin Singapura dalam mempersiapkan suksesi yang terencana (rekayasa). Lee menjelaskan tentang latar belakang keputusannya melakukan suksesi pada tahun 1990 sebagai berikut :

“Secara ekonomi Singapura boleh dikatakan telah mencapai tahap lepas landas. Jadi kami mempunyai dua pilihan (dalam alih kekuasaan). Menunggunya sampai (pesawat) kami mencapai ketinggian jelajah dan kemudian menyerahkannya atau menyerahkan kekuasaan sekarang (pada tahun 1990) sekalipun pesawat masih mendaki. Kalau kami mengambil alternatif pertama yaitu (jika harus) menunggu (pesawat) samapai mencapai ketinggian jelajah, kami mungkin akan menjadi jompo sehingga tidak ada waktu lagi bagi ko-pilot memperoleh kepercayaan dan mengambil alih kontrol secara penuh jadi pilot. Akhirnya tiba pada keputusan membiarkan ko-pilot menjadi pilot pesawat negeri ini dan kami yang tua-tua menjadi ko-pilotnya”¹¹⁶

Konsep alih kekuasaan berkaitan dengan kemajuan ekonomi merupakan sesuatu yang khas Singapura. Rekayasa suksesi ini mirip sekali dengan peralihan

¹¹⁵ *Suara Pembaruan*, 5 Agustus 1991.

¹¹⁶ *Tempo*, 1 Desember 1990.

eksekutif dalam sebuah perusahaan keluarga yaitu proses pemagangan berkelanjutan. Proses pemagangan itu dimulai pada tahun 1970-an dan dilakukan lebih intensif pada tahun 1980-an. Generasi kedua *PAP* seperti, Goh Chok Tong, Lee Hsien Loong, Tony Tan, Ong Ten Cheong dan lain-lain diberi kesempatan oleh para pemimpin generasi pertama secara gradual untuk memainkan peran-peran politik dengan menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan.¹¹⁷ Beberapa jabatan penting itu diantaranya adalah, Goh Chok Tong dan Ong Ten Cheong yang diangkat menjadi Deputy PM dan Tony Tan yang diangkat sebagai Menteri Pendidikan.¹¹⁸

Peralihan kepemimpinan ini merupakan keberhasilan *PAP* dalam melakukan rekayasa suksesi yang mulus, terencana dan tanpa gejolak. *PAP* tidak ingin melihat Singapura hancur karena generasi pertama pemimpinnya tidak merencanakan atau mengatur suksesi dengan baik.¹¹⁹ Rekayasa suksesi ini telah direncanakan dan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 1990 sebagai tonggak yang bersejarah. *PAP* melaksanakan rekayasa suksesi ini mengarah pada satu tujuan, yaitu bahwa pemimpin-pemimpin muda yang berbakat dan dibina beberapa tahun itu diharapkan nantinya dapat mempertahankan dan melestarikan sistem maupun pola-pola yang telah diciptakan para generasi pertama *PAP*.¹²⁰

Mengenai proses dipilihnya Goh Chok Tong sebagai pengganti Lee Kuan Yew dijelaskan sendiri oleh Goh :

“Saat itu ada tiga calon kuat, Goh Chok Tong, Menteri Pendidikan Tony Tan, dan Deputy PM Ong Teng Cheong. Pada suatu malam tahun 1984, di rumah Tony Tan, saya datang terlambat karena ada acara sehingga baru datang sekitar pukul 23.00. Waktu saya datang, tahu-tahu nama saya sudah dinominasikan. Tony Tan, Ong Teng Cheong dan Lee Hsien Loong setuju seratus persen jika saya adalah sebagai calon tunggal yang paling cocok.”¹²¹

Tony Tan enggan menduduki jabatan puncak itu karena dia *family man* yang lebih mengutamakan keluarga daripada pekerjaan, sehingga tidak mau

¹¹⁷ *Editor*, 8 Desember 1990.

¹¹⁸ *Kompas*, 9 Januari 1991.

¹¹⁹ *Suara pembaruan*, 5 Agustus 1991.

¹²⁰ *Far Eastern Economic Review, Asia 1991, Year Book, 1991.*, hal. 204.

¹²¹ *Kompas*, 9 Januari 1991.

menduduki jabatan PM, karena dengan jabatan itu keluarga akan lebih sering terabaikan.¹²² Ong Teng Cheong tidak terpilih karena menjalani pendidikan di sekolah-sekolah Cina sehingga dianggap kurang merakyat dengan kenyataan politik di negara multirasial itu. Lee Hsien Loong sendiri dianggap masih terlalu muda dan direncanakan akan menjadi pengganti Goh Chok Tong.¹²³

2.2.2 Tantangan Kepemimpinan Goh Chok Tong (1990-1991)

Goh Chok Tong menghadapi beberapa tantangan dalam mengawali masa kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri Singapura karena rakyat masih meragukan kemampuannya dalam memimpin Singapura. Keraguan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya; lamanya Lee Kuan Yew memerintah Singapura yang telah memberikan suatu kepercayaan tersendiri dari rakyat terhadap Lee bahwa dia merupakan orang yang sangat pantas untuk memerintah negeri ini. Wajar apabila rakyat masih meragukan kepemimpinan Goh sebab ia baru saja memerintah Singapura. Menurut Lee, Goh perlu diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya bagi kemajuan Singapura dan dia yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Goh mampu untuk berbuat itu. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Lee:

*"The straw polls show that older Singaporeans are more comfortable with me around. Foreign investors also feel better about their assets because I have been a key player in the past crises. In a few years, the team will be able to do without me and generate confidence on their own."*¹²⁴

Selain itu, keberadaan Lee dalam kabinet sebagai Menteri Senior dalam kabinet PM Goh Chok Tong ternyata menyebabkan posisi pemimpin generasi kedua PAP tersebut seakan-akan berada di bawah bayang-bayang kekuasaan seniornya.¹²⁵ Hal ini dikarenakan jabatan menteri senior masih sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah. Lee Kuan Yew sebagai menteri senior dalam kabinet diperlukan untuk memberikan saran-saran dan

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Singh, *op.cit.*, hal. 18.

¹²⁵ *Kompas*, 9 Januari 1991.

pengalamannya kepada para elit generasi kedua *PAP*. Jabatan Sekjen *PAP* yang seharusnya dipegang oleh Perdana Menteri ternyata juga masih dipegang oleh Lee Kuan Yew sampai dengan tanggal 4 Desember 1992, sehingga apabila Goh memenangkan Pemilu tahun 1991, maka dia akan tetap berada di bawah pengawasan Lee Kuan Yew.

Goh Chok Tong menyadari bahwa memang sangat sulit menyamai keberhasilan yang pernah dicapai oleh generasi pertama *PAP*, terutama tingkat kemajuan ekonomi, seperti yang dikatakannya:

“ Dalam kenyataan, kita tidak dapat mencapai prestasi seperti yang dilakukan oleh pemimpin generasi pertama karena mereka mengawali dari tingkat bawah. Mereka berhasil melakukan transformasi sosial yang luar biasa dan rakyat Singapura menikmati kemakmuran yang tinggi. Mereka mencapai pertumbuhan ekonomi 8% sampai 10% setiap tahun. Kita akan sulit meneruskan prestasi itu. Karena kita mengawali dari tingkat yang sudah maju secara ekonomi dan harapan rakyat Singapura telah berubah. Itulah yang harus kita hadapi sebagai pewaris kekuasaan”.¹²⁶

Namun, di sisi lain berbagai komentar yang menyatakan bahwa Goh masih tidak mempunyai kekuasaan penuh sebagai Perdana Menteri Singapura seperti disebutkan di atas ditepis secara langsung oleh Goh dengan mengatakan bahwa:

“Dalam perjalanan waktu, Lee Kuan Yew harus belajar bahwa yang membuat keputusan akhir bukanlah Lee, melainkan kami. Jika saya sependapat dengan pandangan Lee, saya akan terima, jika tidak sependapat maka kita akan perdebatkan”.¹²⁷

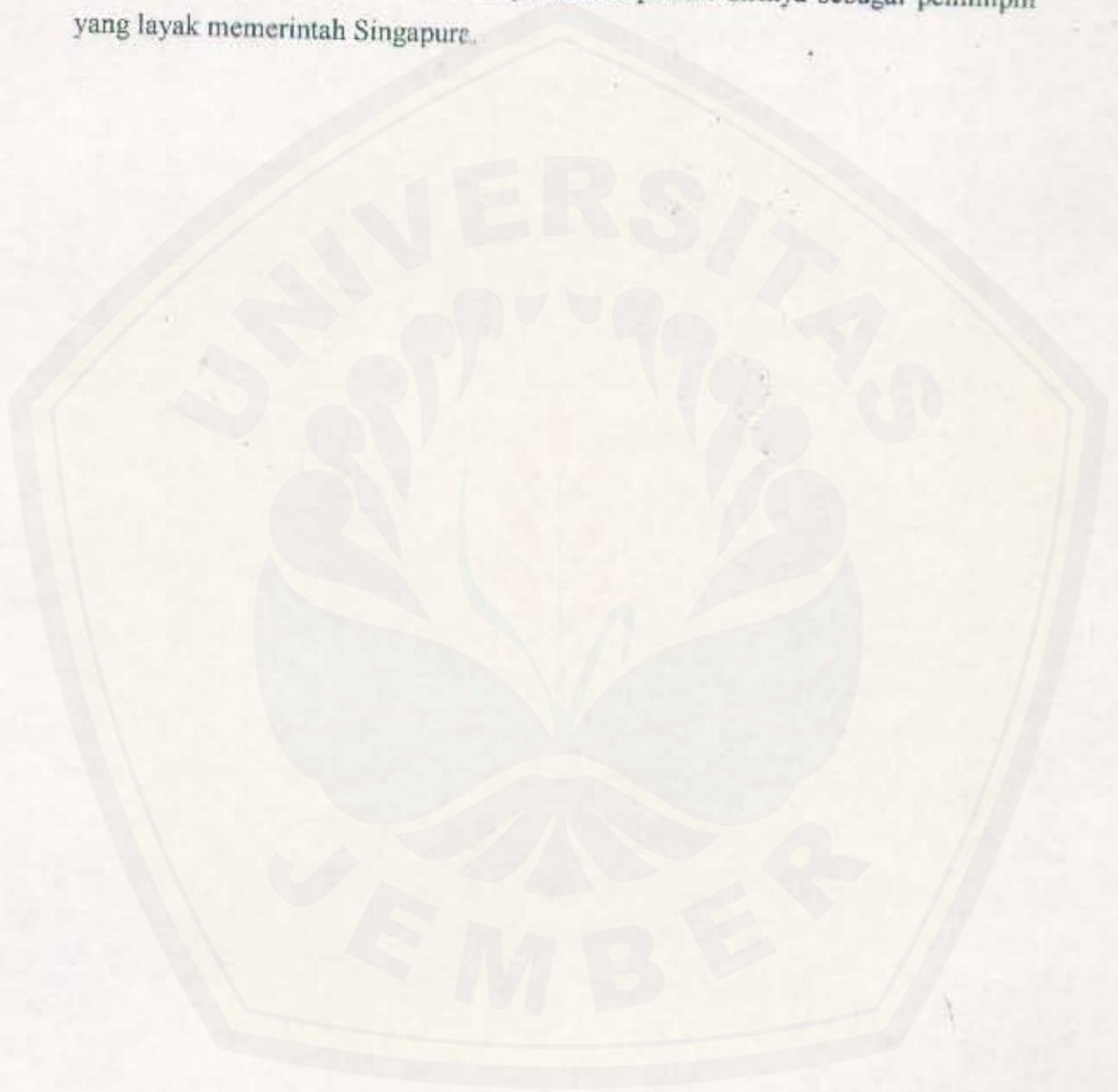
PM Goh berusaha menghimpun kepercayaan dan dukungan rakyat agar bisa diterima oleh rakyat dengan berbagai usaha yang dilakukannya. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Goh adalah dengan berdialog langsung dengan rakyat sehingga bisa mendengar secara langsung keluhan dan keinginan rakyat terhadap pemerintahan yang baru. Keberhasilannya berdialog langsung dengan rakyat sedikit demi sedikit telah mengikis keraguan rakyat mengenai kemampuannya. Selain itu, kesuksesan Goh untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi,

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Suara karya*, 7 Desember 1990.

kemakmuran yang tinggi dan menciptakan suatu persatuan nasional merupakan nilai tambah tersendiri bagi keberhasilan pemerintahan PM Goh Chok Tong.

Untuk lebih memantapkan posisinya sebagai Perdana Menteri dan menepis keraguan setiap orang terhadap kemampuan dan kredibilitasnya, Goh segera mengumumkan percepatan pelaksanaan pemilu. Tingkat perekonomian Singapura yang tinggi diyakini Goh akan mampu menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang layak memerintah Singapura.



BAB III

PEMILU TAHUN 1991 DI SINGAPURA

3.1 Percepatan Pelaksanaan Pemilu

Perdana Menteri Goh Chok Tong menyatakan akan mempercepat penyelenggaraan pemilu menjadi tanggal 31 Agustus 1991, dari rencana sebelumnya pada akhir tahun 1993.¹ Percepatan pelaksanaan pemilu ini, menurut Goh Chok Tong disebabkan dia butuh dukungan yang jelas dari rakyat terhadap dirinya, program-programnya dan gaya kepemimpinannya yang terbuka dan partisipatif. Penunjukan Goh Chok Tong sebagai Perdana Menteri yang tidak melalui proses pemilu menyebabkan posisi Goh secara politis kurang kuat. Dan hal itu akan menghambat Goh dalam menjalankan roda pemerintahan Singapura. Untuk lebih memperkuat posisinya secara politis tentunya Goh harus bisa membuktikannya dengan dukungan penuh dari rakyat. Satu-satunya jalan adalah dengan menyelenggarakan pemilu, seperti diungkapkan oleh Goh:

*"I want the political strength to pursue my style of consultative government and my programme... Every vote that you withhold from me, or worse, you give to the opposition, will weaken my political position after the election. Every vote that you give me will increase my political weight, in the country, in the cabinet and in Parliament."*²

Pemilu kali ini diadakan setelah sembilan bulan masa pemerintahan Goh Chok Tong. Berdasarkan permintaan Goh, Presiden Wee Kim Wee pada hari Rabu (14 Agustus 1991) membubarkan parlemen dan tanggal 21 Agustus ditetapkan sebagai hari pencalonan yaitu batas terakhir masing-masing partai mengajukan calonnya yang akan bertanding dalam pemilu.³

Penyelenggaraan pemilu yang diadakan lebih awal kali ini mempunyai dua macam alasan yaitu bagi Goh Chok Tong secara pribadi dan bagi PAP secara umum. Alasan pribadi Goh sendiri adalah sebagai ujian terhadap kemampuannya untuk mendapatkan dukungan secara penuh dari rakyat dengan memperkenalkan

¹ *Pelita*, 15 Agustus 1991.

² Raj Vasil, "Singapore 1992: Continuity and Change", dalam *Southeast Asian Affairs*, Institute of Southeast Asian Studies Heinemann Educational Books (Asia) LTD, Singapura, 1993., hal. 298.

³ *Kompas*, 15 Agustus 1991.

gaya kepemimpinan yang lebih terbuka dan partisipatif. Gaya yang keras dan otoriter dari Lee dianggap sudah bukan saatnya lagi diterapkan di Singapura. Rakyat dinilai sudah tidak bisa lagi ditekan dan dikekang dengan cara-cara lama seperti ketika menghadapi perlawanan Komunis pada tahun 1960-an. Rakyat tentunya mengharapkan kepemimpinan yang lebih terbuka dan partisipatif terhadap setiap aspirasi yang datang dari rakyat. Harapan Goh ini disampaikan dalam pidato memperingati Hari Nasional Singapura pada tanggal 11 Agustus 1991:

*"When I call for General Elections soon, I hope you will give me that clear mandate. I was chosen by my colleagues in Cabinet and in Parliament to be prime minister. I want your endorsement. I hope that you will endorse my style of government, my way of doing things, and my programme... My colleagues told me that grassroots leaders have told them that peoples are supportive of my new open, consultative style and they think I can improve the chances of success if we go for an early general elections to get a strong mandate. They feel that the mood is right. I feel that the mood is right."*⁴

Secara umum, alasan yang menyebabkan PM Goh Chok Tong mempercepat pelaksanaan pemilu tahun 1991 adalah bahwa pemerintah PAP ingin menjadikan keberhasilan dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebagai bahan kampanye. Perkembangan ekonomi Singapura yang sangat menggembirakan dengan pertumbuhan sebesar 8,3 % per tahun diharapkan dapat semakin mengangkat pamor keberhasilan PAP di mata masyarakat.⁵ Hal ini juga ditunjang dengan adanya bonus tiga bulan gaji Juli lalu bagi para pekerja karena besarnya cadangan devisa Singapura yang mencapai 48,5 milyar dollar Singapura dan hanya kalah oleh Taiwan dan Jepang di wilayah Asia.⁶

⁴ Bilver Singh, *Whiter PAP's Dominance ?, An Analysis of Singapore 1991 General Elections*, Pelanduk Publication, Singapore, 1992., hal. 31.

⁵ Far Eastern Economic Review, *Asia 1991, Year Book.*, hal. 207

⁶ *Kompas*, 31 Agustus 1991.

Percepatan penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan telah disusunnya rencana pembangunan jangka panjang yang tercantum dalam "*The Next Lap*"⁷ yang meliputi program baru yang ditawarkan di bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan. Di bidang pendidikan, pemerintah memperkenalkan program *Edusave* (subsidi pendidikan) yaitu memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak yang berumur 6 sampai 16 tahun berupa pengurangan biaya pendidikan dimana program ini memerlukan dana sekitar S \$ 5 miliar.⁸ Pemerintah juga membangun sejumlah gedung-gedung seperti, empat politeknik, merubah Badan Pelatihan Industri dan Kejuruan menjadi Institut Pendidikan Tehnik yang baru dengan diawali dengan mendirikan *SOU (Singapore Open University)*.⁹ Dalam bidang kesehatan, pemerintah merencanakan program berupa *medifund* (dana kesehatan) yang diperkirakan akan menghabiskan biaya sekitar S \$ 5 miliar.¹⁰ Program ini memberikan pelayanan kesehatan yang ditujukan bagi masyarakat Singapura yang kurang mampu. Sementara, di bidang perumahan pemerintah ingin meningkatkan prosentase kepemilikan rumah sendiri bagi warga dari 90% menjadi 95%.¹¹ Pemerintah juga merencanakan program baru yang akan mengijinkan masyarakat membeli flat yang lebih murah melalui Badan Pengembangan Perumahan (*HDB=House Development Board*). Program yang terakhir adalah berupa subsidi 10% dari dana tabungan nasional (*CPF=Central Provident Fund*) untuk diberikan pada kelompok kurang mampu.¹² Karena program ini ditujukan untuk semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka dampak secara politis yang diharapkan oleh Goh tentunya adalah dukungan oleh rakyat bagi dirinya. Program itu sendiri

⁷ *The Next Lap* merupakan suatu buku yang berisi rencana program-program pembangunan jangka panjang 25 tahun mendatang bagi Singapura. Bidang-bidang pembangunan yang dimasukkan dalam rencana ini terdiri dari 7 poin utama yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, Dewan Kota -- wewenang dan tanggung jawabnya, Peningkatan pelayanan perumahan melalui *House Development Board*, Politik -- partisipasi dan konsultasi serta bantuan PAP terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan. Tujuan *The Next Lap* adalah untuk semakin memantapkan perekonomian di Singapura dan berusaha mensejajarkan diri dengan pola hidup dunia barat yang telah lebih dahulu maju, meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan, mengusahakan kepemilikan rumah pribadi bagi warga serta membangun rasa kebangsaan dan persatuan yang lebih erat antar tiap ras yang ada di Singapura. Dikutip dalam Bilveer Singh, *op.cit.*, hal. 65.

⁸ *Ibid.*, hal. 33.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Kompas*, 31 Agustus 1991.

diperkirakan akan menelan dana lebih dari S \$ 10 milyar (sekitar Rp 11 Trilyun) atau hampir 25% dari cadangan mata uang asing.¹³ Goh mengharapkan rakyat Singapura bisa mendukungnya agar dia mampu melaksanakan program-program tersebut.

Hal berikutnya yang menyebabkan Goh mempercepat pemilu adalah bahwa PAP memperkirakan partai oposisi sedang dalam kondisi tidak siap dan J.B. Jeyaretnam calon dari oposisi dipastikan tidak dapat ikut pemilu karena masih menjalani hukuman penjara hingga 10 November 1991 akibat tuduhan penyalahgunaan dana dalam partainya.¹⁴ Ketidaksiapan oposisi dan ketidakhadiran Jeyaretnam dalam pemilu diperkirakan akan sangat menguntungkan PAP karena partai ini merupakan partai yang paling siap dalam menghadapi pemilu, sehingga PAP masih akan dapat mendominasi perolehan suara dan kursi di parlemen.

Alasan terakhir yang membuat pemilu dipercepat juga dipengaruhi oleh adanya kondisi eksternal, dimana ekonomi dunia pada sepertiga terakhir tahun 1991 diperkirakan akan resesi.¹⁵ Memburuknya ekonomi dunia dipicu oleh memburuknya situasi perekonomian dunia yang diakibatkan oleh pergolakan politik di Eropa, terutama Uni Sovyet, Yugoslavia, serta situasi pasca Perang Teluk.¹⁶ Kondisi tersebut tentunya juga akan mempengaruhi ekonomi Singapura yang sangat tergantung dari kestabilan perekonomian dunia. Hal ini nampak dari penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi di Singapura, dari 11 % di tahun 1988 menjadi 8,3 % di tahun 1990 dan awal tahun 1991.¹⁷ Penurunan ini diperkirakan juga akan tetap terjadi pada akhir tahun 1991, dimana pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya sekitar 6,5 %.¹⁸ Apabila Pemilu dilaksanakan pada saat kondisi yang kurang baik dikhawatirkan akan menyebabkan berkurangnya dukungan kepada pemerintahan Goh Chok Tong. Hal itu disebabkan adanya

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Pelita*, 19 Agustus 1991.

¹⁵ Singh., *loc.cit.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Far Eastern Economic Review 1991., *op.cit.* hal. 207.

¹⁸ *Ibid.*

anggapan bahwa pemerintah tidak mampu menanggulangi resesi ekonomi yang terjadi.

Sementara itu, pihak oposisi merasa sangat terkejut dengan jadwal pemilu yang dimajukan dua tahun lebih awal.¹⁹ Walaupun Goh sudah memberikan indikasi bahwa pemilu akan dipercepat, namun mereka tidak menduga bahwa pelaksanaannya akan secepat itu. Oposisi mengecam keputusan tersebut yang dikatakan tidak adil dan menyebutnya sebagai siasat partai yang memerintah untuk mengalahkan para penentangannya (oposisi).²⁰ Jangka waktu pelaksanaan kampanye yang hanya selama sepuluh hari dianggap terlalu pendek dan tidak memberikan kesempatan bagi pihak oposisi untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu.²¹

Pihak oposisi juga menuduh bahwa keputusan mempercepat pemilu itu diambil oleh Goh agar Jeyaretnam yang merupakan tokoh oposisi pertama yang duduk di parlemen pada pemilu sela tahun 1981 tidak bisa tampil dalam pemilu tahun 1991.²² Jeyaretnam tidak bisa ikut dalam pemilu karena tuduhan ketidakberesan pendanaan partainya, sehingga didiskualifikasi dari parlemen selama lima tahun sejak 1986 dan baru berakhir 10 November 1991.²³

Berbagai tuduhan yang dilontarkan pihak oposisi tidak membuat Goh menunda pelaksanaan pemilu yang telah direncanakannya, seperti yang dikatakannya, "Itu kesalahan mereka karena tidak memperhatikan tanda-tanda politis. Sebelumnya saya sudah memberikan isyarat".²⁴ Ucapan Goh nampaknya bisa dibenarkan karena jika dilihat dari segi kematangan para tokoh oposisi yang rata-rata sudah berkecimpung di arena politik sekitar 20 tahun lalu, seharusnya mereka mampu mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Bagaimanapun, rencana dipercepatnya pemilu tersebut bukan diputuskan tanpa pemikiran yang mendalam, karena keputusan ini muncul setelah Goh yakin mengenai banyaknya

¹⁹ *Bisnis Indonesia*, 16 Agustus 1991.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Suara Karya*, 16 Agustus 1991.

²² *Antara*, 12 Agustus 1991.

²³ *Pelita*, 19 Agustus 1991.

²⁴ *Kompas*, 31 Agustus 1991.

dukungan yang akan diberikan kepadanya, terutama setelah penyampaian pidato dalam peringatan Hari Kemerdekaan, 11 Agustus 1991.²⁵

Adanya berbagai hambatan yang dialami oleh partai-partai oposisi di atas, seperti mendadaknya pelaksanaan pemilu dan masa kampanye yang pendek tidak membuat partai oposisi merasa kalah sebelum bertanding. Partai-partai oposisi berusaha mengajukan calon-calonnya yang dianggap dapat bersaing dengan calon-calon *PAP*. Walaupun persiapan yang dilakukan partai oposisi sangat singkat, namun setidaknya-tidaknya pihak oposisi juga telah mengantisipasi percepatan pelaksanaan pemilu tahun 1991 ini. Hal ini nampak dari kekompakan partai-partai oposisi dalam menghadapi pemilu kali ini dan dalam mengajukan calon-calon oposisi yang tidak akan bertanding satu sama lain karena akan memecah perolehan suara bagi oposisi.²⁶ Di setiap wilayah pemilihan, baik untuk wilayah pemilihan tunggal (*SMC*) maupun wilayah perwakilan beregu (*GRC*) hanya terdapat satu partai oposisi. Misalnya, di *GRC Cheng San*, yang diwakili oleh calon-calon dari Partai Solidaritas Nasional (*NSP / National Solidarity Party*) yang terdiri dari Pok Lee Chuan, Ch'ng Chin Siah, Gertrude M.D.G. dan Ch'ng Wee Hong.²⁷ Sementara, calon oposisi di *GRC Marine Parade*, diwakili oleh calon-calon dari Partai Keadilan Singapura (*Singapore Justice Party / SJP*) yang terdiri dari Suib Abdul Rahman, Then Chin Beng, Aminudin Ami, dan K.S.M. Rajasekaran.²⁸ Begitu pula di wilayah pemilihan tunggal (*SMC*), tidak ada calon-calon oposisi yang bertanding satu sama lain di satu konstituensi. Misalnya, wilayah pemilihan *Bukit Gombak* diwakili oleh satu calon oposisi dari Partai Demokratik Singapura (*SDP*), *Ling How Dong*, yang akhirnya berhasil meraih satu kursi bagi oposisi.²⁹

Dari persiapan dan strategi oposisi untuk tidak saling bertanding satu sama lain di atas, nampaknya oposisi berusaha mengoptimalkan hasil yang ingin

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Kompas*, 30 Agustus 1991.

²⁷ Singh., *op.cit.*, hal. 55.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hussin Muttalib, "Singapore's 1991 General Election" dalam *Southeast Asian Affairs 1992*, Institute of Southeast Asian Studies Heinemann Educational Books (Asia) LTD, Singapura, 1992., hal. 304.

diperoleh. Hanya anggota-anggota oposisi yang tangguh dan kredibel saja yang dicalonkan dalam perebutan kursi parlemen. Dengan demikian, persentase suara secara umum bagi partai oposisi diharapkan dapat meningkat. Dan hal yang lebih penting lagi adalah dengan keunggulan partai oposisi di masing-masing konstituensi, yang pada akhirnya akan menambah jumlah kursi oposisi di parlemen.

Taktik untuk tidak saling bertanding di satu konstituensi di atas nampaknya sedikit banyak menunjukkan hasil yang positif bagi oposisi. Hasil positif ini terlihat di beberapa konstituensi yang dimenangkan oleh partai oposisi.³⁰ Pemilih yang memberikan suaranya bagi oposisi bisa secara bulat menyalurkannya pada satu partai oposisi, sehingga suara yang diterima partai oposisi tidak terpecah untuk beberapa partai. Hal ini didukung oleh strategi selanjutnya yang diterapkan oleh *SDP* dengan mengatakan bahwa pemilu kali ini hanya sebagai pemilu sela, karena sudah tidak mempengaruhi hasil pemilu dengan masih tetap tampilnya *PAP* sebagai partai pemenang pemilu.³¹

3.2 Ketentuan Baru Pemilu

Singapura menganut sistem pemerintahan parlementer, dimana kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri.³² Perdana Menteri, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri kabinet dan bertanggung jawab terhadap parlemen. Keberadaan presiden di Singapura hanya sebagai simbol saja yang tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan apapun dalam pemerintahan.³³ Dalam perkembangannya, adanya dominasi satu partai dan ketiadaan partai oposisi di parlemen Singapura menyebabkan kurang dinamisnya suasana perpolitikan di Singapura. Anggota parlemen dan pemerintah berasal dari partai yang sama yaitu Partai Aksi Rakyat (*PAP*), sehingga kritik dari anggota parlemen terhadap pemerintah sangat kurang dan bahkan cenderung menyetujui langkah-langkah atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini

³⁰ Singh, *op.cit.*, hal. 56.

³¹ *Kompas*, 22 Agustus 1991.

³² *Ibid.*

³³ *Kompas*, 31 Agustus 1991.

menjadikan pemerintah cenderung otoriter dengan penentu kebijakan berada di tangan Perdana Menteri.

Kekuasaan *PAP* yang begitu dominan dalam pemerintahan juga terlihat dalam penentuan aturan pemilu di Singapura. Sistem pemilu di Singapura menggunakan sistem Distrik, yang mana sisa suara di masing-masing wilayah pemilihan menjadi tidak diperhitungkan lagi.³⁴ Sistem Distrik yang digunakan dalam pemilu di Singapura menerapkan pembagian wilayah pemilihan yang disesuaikan dengan penambahan penduduk dan keseimbangan ras.³⁵ Apabila suatu wilayah mempunyai terlalu banyak penduduk Melayu atau golongan berpendidikan Cina, maka wilayah itu akan dipecah atau digabungkan dengan wilayah lainnya.³⁶ Selain itu, pemerintah juga menentukan aturan-aturan yang sekiranya dapat menguntungkan *PAP* dan menyulitkan partai oposisi yang memang mempunyai kader yang sangat minim. Hal ini menjadikan partai oposisi sulit untuk meraih kursi parlemen, walaupun hanya satu buah kursi saja.

Seperti yang terjadi pada pemilu tahun 1991 ini pemerintahan *PAP* menerapkan peraturan pemilu yang baru. Peraturan pemilu yang baru tersebut adalah adanya penambahan jumlah wakil untuk masing-masing wilayah perwakilan beregu (*GRC-Group Representing Constituencies*) dari 3 orang menjadi 4 orang.³⁷ Dalam sistem pembagian wilayah pemilu, pemerintah Singapura menerapkan wilayah pemilihan berdasarkan dua cara yaitu, menurut wilayah pemilihan tunggal (*SMC-Single Member Constituencies*) dan wilayah perwakilan beregu (*GRC-Group Representation Constituencies*).³⁸ Untuk wilayah pemilihan tunggal (*SMC*) terdiri dari 21 wilayah, sedangkan wilayah pemilihan beregu (*GRC*) sebanyak 15 wilayah.³⁹ Di dalam wilayah pemilihan tunggal berarti bahwa dalam satu wilayah tersebut akan dipilih satu orang yang akan duduk di parlemen. Sementara itu, di dalam setiap *GRC*, masing-masing

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Kompas*, 22 Desember 1988.

³⁷ *Kompas*, 16 Agustus 1991.

³⁸ *Antara*, 10 Agustus 1991.

³⁹ *Ibid.*

kelompok terdiri dari empat orang dimana pemenangnya akan menempatkan semua anggota kelompoknya untuk mewakili wilayah tersebut.⁴⁰

Sistem *GRC (Group Representing Constituencies)* ini bertujuan untuk menjamin agar kelompok minoritas terwakili di dalam parlemen, karena dalam satu kelompok harus terdapat minimal satu orang wakil dari kelompok minoritas.⁴¹ Seperti telah dijelaskan dalam Bab I, Singapura yang berpenduduk 2,7 juta jiwa ini merupakan negara multirasial yang terdiri dari ras Cina 75,4%, Melayu 13,6%, India 8,5%, sedang lainnya 2,3% dimana masing-masing mempunyai bahasa, agama, pandangan hidup dan budaya yang berbeda.⁴² Kelompok minoritas yang dimaksud di sini adalah orang yang bukan berasal dari ras Cina.

Peraturan pemilu yang baru ditetapkan oleh pemerintah ini diprotes oleh partai-partai oposisi. Mereka menganggap bahwa dengan adanya penambahan jumlah anggota untuk masing-masing *GRC* dan pengurangan wakil dari wilayah pemilihan tunggal akan sangat menguntungkan partai pemerintah (*PAP*).⁴³ Pada pemilu tahun 1988 terdapat 15 *GRC* yang terdiri dari 3 orang untuk masing-masing kelompok, sehingga sisanya sebanyak 36 orang mewakili wilayah pemilihan tunggal.⁴⁴ Keterbatasan jumlah kader yang dimiliki serta keinginan untuk menampilkan calon-calon yang mampu bersaing dengan calon *PAP* membuat pihak oposisi hanya mengajukan calonnya di 5 *GRC* dan 20 *SMC*.⁴⁵

Adanya jumlah calon dari partai oposisi yang hanya bertanding untuk memperebutkan 40 kursi saja menjadikan *PAP* yang mengajukan 81 calonnya secara otomatis telah memenangkan pemilu sehingga tetap berhak memerintah Singapura.⁴⁶ Diantara 41 calon *PAP* yang tidak mendapat lawan dan telah meraih kemenangan di distrik masing-masing tanpa bertanding dalam pemilu kali ini adalah, mantan PM Lee Kuan Yew, puteranya deputi PM Lee Hsien Loong,

⁴⁰ *Kompas*, 16 Agustus 1991.

⁴¹ *Antara*, 10 Agustus 1991.

⁴² *Merdeka*, 31 Agustus 1991.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Suara Pembaruan*, 11 September 1991.

⁴⁵ *Merdeka*, 31 Agustus 1991.

⁴⁶ *Regional Outlook, Southeast Asia 1992-93*, Institute of Southeast Asian Studies., hal. 27.

Menteri Keuangan Richard Hu serta Menteri Informasi dan Kebudayaan George Yeo.⁴⁷

3.3 Pemilu Tahun 1991 dan Prosesnya

3.3.1 Strategi Partai dalam Pelaksanaan Pemilu

Partai Aksi Rakyat memastikan diri memenangkan pemilu tahun 1991, setelah pendaftaran nama-nama calon anggota partai yang akan bertanding memperebutkan kursi di parlemen ditutup pada tanggal 21 Agustus. Kepastian ini didapatkan setelah partai oposisi hanya mengajukan 40 calonnya dari 81 kursi di parlemen hingga batas akhir pendaftaran calon-calon ditutup. Sisa 41 kursi yang ada secara otomatis dimenangkan *PAP* yang mengajukan 81 calonnya di semua konstituensi, tanpa harus bertanding.⁴⁸

Kampanye secara resmi dimulai sejak pukul. 12.00 tanggal 21 Agustus dan akan berakhir tanggal 30 Agustus 1991. Selama masa kampanye, masing-masing partai politik berusaha mempengaruhi pemikiran rakyat dengan memberikan janji-janji mengenai apa yang akan mereka lakukan apabila mereka terpilih menjadi anggota parlemen. Meskipun janji-janji ini sering disuarakan dan jarang bisa direalisasikan, partai-partai politik tetap melanjutkan tradisi ini pada setiap pemilu, termasuk pemilu kali ini. Partai pemerintah dan partai oposisi harus selalu siap dalam posisinya masing-masing untuk berjaga-jaga terhadap serangan lawan politiknya dan menyiapkan serangan balasan agar tidak kehilangan suara dalam hari pemilihan.

A. Metode Kampanye

Selama masa kampanye, partai pemerintah *PAP* memakai cara kunjungan dari rumah ke rumah dan lebih sering menggunakan metode dialog daripada rapat umum dengan banyak orang di lapangan terbuka.⁴⁹ Kunjungan dari rumah ke rumah sangat esensial dan penting bagi *PAP* untuk memperkenalkan program-program baru mereka (*Edusave, Medifund dan SOU*) kepada para pemilih. Cara

⁴⁷ *Bisnis Indonesia*, 22 Agustus 1991.

⁴⁸ *Pelita*, 22 Agustus 1991.

ini sangat membantu dalam memberikan sentuhan secara pribadi karena para pemilih bisa bertemu secara langsung dengan calon anggota parlemen yang mewakili konstituensinya.

PAP menggunakan metode dialog karena cara ini dianggap lebih efektif dibandingkan dengan metode kampanye terbuka. Goh mengatakan bahwa metode dialog lebih bisa menampung umpan balik dari massa pemilih sebab tidak hanya *PAP* saja yang menyampaikan pandangan dan pendapatnya, tetapi juga sebaliknya.⁴⁹ Dia juga menambahkan, "Dialog lebih penting daripada pengerahan massa."⁵⁰ Dalam metode dialog ini bisa diketahui keinginan dari pemilih, sehingga terjadi "*two way communication*" atau komunikasi dua arah. Para pemilih bisa bertanya secara langsung kepada calon anggota parlemen, seperti "Apa yang sudah Anda lakukan dan apa rencana Anda di masa yang akan datang."⁵¹ Pernyataan Goh di atas didukung oleh S. Dhanabalan, Menteri Pembangunan Nasional:

"A rally is one-way communication, speaker stands out on stage, he speaks what he wants to say. The only kind of communication he gets back from the other side is, maybe some hand claps or laughter, jeers or boos. You are not really addressing the kind of problems that people want answer to.

So we have decided, and this is a part of Mr Goh Chok Tong's style... to find out what you want to hear, what is it that is bothering you, what is the question you want to answer to.

And a dialogue gives an opportunity for a two-way communication. Though this may not draw large crowds by the thousands... it achieves more."⁵²

Bentuk kampanye yang dilakukan *PAP* ini kali ini ternyata mendapat kritikan dari oposisi. Mereka menganggap bahwa dengan metode dialog, *PAP* telah melakukan suatu tindakan yang tidak bijaksana karena membatasi jumlah orang yang ingin hadir dalam pelaksanaan kampanye.⁵³ Sebenarnya *PAP* juga tetap menggunakan metode rapat terbuka dengan jumlah massa yang besar,

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Suara Pembaruan*, 28 Agustus 1991.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Singh., *op.cit.*, hal. 61.

⁵³ *Ibid.*, hal. 62.

namun hal itu hanya terjadi di beberapa konstituensi diantaranya, di wilayah pemilihan Eunus, Bukit Gombak dan Ulu Pandan.⁵⁴

Sementara, pihak partai oposisi masih menggunakan metode rapat umum secara terbuka terbuka dalam masa-masa kampanye. Metode ini dianggap masih cukup efektif untuk mempengaruhi massa dengan jumlah yang besar. Selama masa kampanye, secara keseluruhan partai oposisi telah mengadakan 38 kali kampanye secara terbuka dengan massa yang lebih banyak dibandingkan dengan kampanye dialog di ruang tertutup yang diadakan *PAP*.⁵⁵

Metode kampanye yang digunakan oleh partai oposisi dengan partai pemerintah, masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Metode kampanye secara terbuka dengan mengerahkan massa secara besar-besaran yang dilakukan oleh partai oposisi mempunyai kelebihan bahwa setiap orang yang berkeinginan mengikuti kampanye bisa hadir dalam kampanye itu. Partai oposisi nampaknya yakin dengan pendapat yang mengatakan bahwa sifat dan keinginan individu bisa berubah apabila berada dalam kerumunan massa (suara individu akan dikalahkan oleh suara massa). Kelemahan dari metode ini yaitu adanya kemungkinan aspirasi massa yang tidak terakomodasi oleh partai pelaksana kampanye. Hal ini disebabkan metode ini merupakan metode komunikasi satu arah atau "*one-way communication*"⁵⁶ yang tidak akan mengadakan acara tanya jawab seperti metode dua arah.

Di lain pihak, metode dialog yang digunakan *PAP* juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah bahwa dalam metode ini aspirasi massa pemilih bisa terakomodasi karena terjadi komunikasi dua arah atau "*two-way communication*". Sedangkan keterbatasan tempat yang ada merupakan kelemahan dari metode dialog ini. Tidak semua pemilih bisa menghadiri acara ini, padahal banyak orang yang ingin mengetahui program partai dan jawaban dari pertanyaan pemilih. Kelemahan ini nampaknya menjadi salah satu sebab berkurangnya suara *PAP*, karena *PAP* terlihat lebih mementingkan kaum

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Singh., *op.cit.*, hal. 64.

⁵⁶ *Ibid.*

berpendidikan Inggris yang dianggap lebih bisa diajak berdialog dibanding dengan golongan berpendidikan Cina.

B. Strategi Pemilu Partai Aksi Rakyat (PAP)

Pelaksanaan kampanye yang berlangsung selama sepuluh hari bukanlah untuk menjawab pertanyaan mengenai siapa yang akan memerintah Singapura, tetapi lebih cenderung pada berapa banyak anggota partai oposisi mampu tampil di parlemen dan berapa persentase suara yang akan diterima oleh PAP. Kepastian mengenai siapa yang akan memerintah Singapura sudah terjawab sejak Hari Nominasi ditutup pada tanggal 21 Agustus dengan kemenangan 41 calon PAP tanpa harus bertanding. Dalam Pemilu kali ini PAP berharap akan dapat memperbaiki persentase suaranya setelah pada pemilu tahun 1988 hanya memperoleh 61,8 % suara (mengalami penurunan dari 62,9 % suara pada tahun 1984).⁵⁷ Di lain pihak, partai oposisi tidak hanya ingin meningkatkan persentase suaranya, tetapi juga berharap akan dapat menambah jumlah anggotanya yang duduk dalam parlemen.⁵⁸

Pelaksanaan kampanye pada pemilu tahun 1991 ini dimulai dengan isu pokok yang dihembuskan oleh Goh Chok Tong. Goh mengatakan bahwa dalam pemilu kali ini dia akan mempertaruhkan dirinya pribadi dengan gaya kepemimpinannya yang terbuka dan partisipatif serta program-program barunya untuk diangkat sebagai isu pokok Pemilu.⁵⁹ Adanya rencana program pembangunan jangka panjang yang termuat dalam *The Next Lap* merupakan salah satu isu pokok yang diangkat oleh Goh Chok Tong. Program-program baru itu berupa *Medifund* (dana kesehatan) dan *Edusave* (dana pendidikan) yang memerlukan dana sekitar US \$ 10 milyar atau seperempat cadangan devisa negara.⁶⁰ Program *Edusave* memungkinkan warga yang berpendapatan rendah mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas.⁶¹ Subsidi ini diberikan kepada

⁵⁷ Muttalib dalam *Southeast Asian Affairs 1992*, *loc.cit.*

⁵⁸ *Ibid.*, hal 298.

⁵⁹ *Kompas*, 31 Agustus 1991.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Suara Karya*, 31 Agustus 1991.

pelajar berusia antara 6-16 tahun. Subsidi untuk anak sekolah tingkat rendah saat ini mencapai sekitar 2.000 dollar dan untuk sekolah menengah sekitar 3.000 dollar dalam tahun 1990.⁶² Sementara itu untuk program *Medifund*, pemerintah akan menarik dana sekitar 300-500 juta per tahun dari dana cadangan negara untuk mendapatkan simpanan dana *Medifund* sebesar 5,0 milyar dollar.⁶³ Dana ini terutama ditujukan bagi kelompok yang terjepit. Kelompok masyarakat ini adalah mereka yang tidak cukup mampu membayar biaya perawatan kesehatan dan sangat membutuhkan subsidi sepenuhnya dari pemerintahan.⁶⁴ Sementara itu Lee Hsien Loong menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha sebisa mungkin untuk menekan harga-harga dan ongkos-ongkos yang dibayar masyarakat, antara lain untuk parkir, sekolah dan rumah sakit.⁶⁵ Program-program baru yang ditujukan bagi perbaikan kesejahteraan rakyat diharapkan dampaknya secara politis akan lebih meningkatkan suara dari massa pemilih.⁶⁶ Pada kenyataannya program dari *PAP* tersebut telah menghilangkan isu yang biasanya diangkat oleh kaum oposisi.⁶⁷

Kritikan yang diangkat oleh oposisi adalah mengenai gaya kepemimpinan Goh yang lebih terbuka dan partisipatif. oleh tokoh oposisi utama dari *SDP* (*Singapore Democratic Party*), Chiam See Tong, dengan mengatakan bahwa Goh tidak cukup hebat untuk dijadikan sebagai isu Pemilu. Chiam juga menyatakan bahwa pernyataan Goh yang menyebutkan bahwa dia akan memberikan sikap pemerintahan yang konsultatif dan lebih terbuka jika rakyat mendukungnya adalah sesuatu yang ganjil, karena sikap pemerintahan seperti itu sebenarnya merupakan hak warga.⁶⁸ Ditambahkan oleh Chiam bahwa jika anggota oposisi lebih banyak lagi di parlemen dan jumlahnya seimbang, baru rakyat dapat menjamin adanya sikap konsultatif dan keterbukaan itu.⁶⁹ Oleh karena itu rakyat diharapkan untuk menyalurkan aspirasinya dengan memilih oposisi karena akan

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Media Indonesia*, 19 Agustus 1991.

⁶⁵ *Kompas*, 30 Agustus 1991.

⁶⁶ *Bisnis Indonesia*, 22 Agustus 1991.

⁶⁷ *Kompas*, 26 Agustus 1991.

⁶⁸ *Ibid.*, 30 Agustus 1991.

⁶⁹ *Ibid.*

dapat menentukan nasibnya sendiri dan tidak lagi tergantung dari pemerintah yang selama ini didominasi satu partai.

Dari tanggapan Chiam terhadap upaya Goh menjadikan gaya kepemimpinannya sebagai isu diatas nampaknya terjadi perbedaan pandangan dari masing-masing pihak mengenai hal itu. Goh lebih menekankan bahwa dengan gaya kepemimpinannya yang terbuka dan partisipatif diharapkan aspirasi rakyat akan lebih bisa diakomodasi dan tertampung dalam rencana program kebijakan negara. Sedangkan Chiam menganggap bahwa hal itu tetap tidak akan memecahkan masalah, karena aspirasi tersebut telah disaring terlebih dahulu dan yang akan diambil tentunya pendapat yang kiranya menguntungkan *PAP* secara politis. Solusi yang terbaik menurut Chiam adalah adanya oposisi dengan jumlah yang berimbang karena oposisi akan menempatkan diri sebagai pembela kepentingan rakyat.⁷⁰ Pandangan Goh dan Chiam di atas apabila dicermati memang masing-masing mempunyai dasar yang kuat. Tetapi yang menarik dari perbedaan ini adalah adanya kecenderungan terjadinya kebebasan bersuara yang lebih besar dalam pemilu kali ini, terbukti dengan leluasanya oposisi menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Seperti yang diungkapkan kembali oleh Chiam dalam kritiknya bahwa Goh mengadakan pemilu hanya untuk memperkuat kedudukannya di dalam *PAP* dan tidak melakukan sesuatuupun bagi masa depan negara ini. Isu persaingannya dalam memperebutkan pengaruh di dalam partai dengan putera mantan PM. Lee Kuan Yew, Brigadir General. Lee Hsien Loong, dibuat sebagai dasar dari pernyataan Chiam tersebut. Brigadir General Lee Hsien Loong yang mengetahui dirinya tersangkut dalam isu ini segera mengklarifikasi pernyataan Chiam dengan mengatakan:

"...there was no internal contest in the Party. We have settled the succession. Mr Goh is our leader, we are his team, and we want your support. If you vote against Mr Goh, it is a vote against all of us".⁷¹

⁷⁰ Singh., *op.cit.*, hal. 79.

⁷¹ *Ibid.*

Ucapan dari BG. Lee Hsien Loong tersebut nampaknya secara politis berusaha melindungi posisi Goh secara pribadi dan *PAP* secara umum. Walaupun ada kemungkinan terjadi persaingan secara diam-diam dalam tubuh *PAP*, namun masing-masing anggota tetap melihat kesatuan partai sebagai hal yang lebih utama. Prinsip inilah yang menjadi salah satu faktor penyangga tetap eksisnya *PAP* memerintah Singapura.

C. Strategi Pemilu Partai Oposisi

Pada pemilu kali ini, Chiam sebagai tokoh utama oposisi yang juga Sekjen *SDP* (*Singapore Democratic Party*) mengemukakan bahwa isu yang sebenarnya dalam pemilu kali ini adalah masalah kebebasan dan demokrasi. Chiam menegaskan, oposisi yang kuat dan efektif saat ini diperlukan untuk melawan sistem otoriter yang sedang berjalan di Singapura dan demi berjalannya sistem yang lebih demokratis.⁷² Kebebasan dan demokrasi tidak mungkin tercapai apabila *PAP* masih mendominasi Parlemen.

Pernyataan Chiam untuk menjadikan kebebasan dan demokrasi sebagai isu utama didukung oleh oposisi yang lain diantaranya, *WP* (*Worker's Party*) dengan slogannya "*Power to The People*".⁷³ Berdasarkan slogan ini *WP* menyatakan bahwa rakyat harus diberi kekuasaan untuk mempengaruhi dan menentukan takdir mereka sendiri. Sementara itu, *Ashleigh Seow*, calon *SDP* untuk wilayah pemilihan Ulu Pandan juga menambahkan bahwa sudah tiba saatnya untuk memberikan kesempatan kepada rakyat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini diperkuat dengan pernyataannya:

*"The 1960s, 70s and early 80s showed us that a one-party parliament did not listen to the public. Government was distant. Policy was decided and enforced without feedback or consultation. The presence of opposition MPs changed that. Our society became slightly more open and responsive. It was not a gift from the PAP but a necessity. The Government had to listen to the people as the Opposition was making your voice heard."*⁷⁴

⁷² *Kompas*, 22 Agustus 1991.

⁷³ Singh., *op.cit.*, hal. 68.

⁷⁴ Salah satu isi "*SDP election pamphlet for Ashleigh Seow*", dikutip dalam Bilveer Singh., *op.cit.*, hal. 72.

Oposisi nampaknya berusaha meyakinkan para pemilih bahwa selama ini mereka hidup dalam ketakutan dan kegelisahan. Mereka takut akan terjadi instabilitas politik dan ekonomi apabila *PAP* tidak lagi mampu mendominasi pemerintahan Singapura.⁷⁵ Kehadiran oposisi dikhawatirkan akan mengganggu arah pembangunan dan kebijakan yang telah disusun pemerintah. Pembatasan terhadap kebebasan masyarakat tersebut sekarang dianggap sudah tidak mempunyai tempat lagi dalam masyarakat yang demokratis dimana hak asasi manusia sangat dihargai. Segala kebutuhan dasar dan kemajuan ekonomi memang telah dicapai oleh rakyat. Namun, yang diperlukan oleh rakyat saat ini adalah kebutuhan untuk turut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Oposisi ternyata menyadari bahwa sekalipun mereka berusaha dengan maksimal, mereka tidak akan bisa memenangkan Pemilu kali ini.⁷⁶ *PAP* terlalu kuat untuk dikalahkan. Dalam segi apapun mereka kalah dibandingkan *PAP* baik itu, sumber daya manusia, sumber keuangan partai, ideologi partai, pengaruh dalam masyarakat, dan pengalaman dalam pemerintahan. Namun, bukan berarti mereka akan menyerah dalam mencari dukungan massa pemilih.

Kepandaian oposisi memanfaatkan situasi nampak dalam kecerdikan Chiam menggunakan strategi "*by election*"⁷⁷ dalam pemilu kali ini. Chiam nampaknya mengetahui bahwa terdapat suatu perubahan pandangan dalam masyarakat Singapura, yaitu adanya keinginan untuk turut serta berpartisipasi dalam proses politik. Namun, rakyat terlihat masih tetap menghendaki *PAP* sebagai partai yang memerintah Singapura. Adanya dua fenomena ini disikapi oleh Chiam dengan strategi "*by election*" yaitu dengan sengaja melepas 41 kursi untuk diperoleh *PAP*.⁷⁸ Di satu sisi hal ini memang disebabkan oleh kurangnya sumber daya oposisi, namun di sisi lain ini merupakan strategi yang sangat tepat bagi oposisi. Jumlah sebesar 41 kursi (separo lebih 1) cukup untuk memastikan

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 69.

⁷⁶ *Kompas*, 31 Agustus 1991.

⁷⁷ *By Election* atau Pemilu sela (Pemilu tambahan) dikatakan sebagai Pemilu yang tidak berpengaruh terhadap siapa yang akan berkuasa. Dalam Pemilu *by elections* ini rakyat hanya akan memilih tambahan wakil-wakil untuk mengisi kursi yang kosong dalam Parlemen.

⁷⁸ *Regional Outlook*, *loc. cit.*

bahwa *PAP* tetap akan memerintah Singapura, sehingga keinginan rakyat agar *PAP* tetap memerintah sudah tercapai.⁷⁹ Selanjutnya, dengan 40 kursi yang tersisa oposisi berusaha semaksimal mungkin mendapatkan kursi yang ada. Keinginan rakyat mengenai partisipasi yang lebih meningkat dan aspirasi yang lebih luas bisa direalisasikan dengan memberikan suaranya kepada oposisi. Anggapan bahwa pemilu kali ini hanya sebagai pemilu tambahan (*by elections*) karena sudah tidak mempengaruhi lagi terhadap siapa yang akan memerintah Singapura telah berperan besar dalam “mendongkrak” perolehan kursi oposisi dalam parlemen.

Isu lain yang cukup menonjol dalam pemilu kali ini terjadi pada masa pertengahan kampanye, dimana oposisi mengangkat masalah kelompok minoritas Melayu.⁸⁰ Isu ini pertama kali dilontarkan oleh seorang calon dari Partai Buruh (WP) yang keturunan Melayu yaitu Mohammad Jufrie Mahmood.⁸¹ Jufrie menuduh calon *PAP* untuk daerah pemilihan Eunos yang juga keturunan Melayu, Sidek Sanif, telah “menggadaikan” prinsip moral dan agamanya untuk menggembirakan *PAP*.⁸² Menurut Jufrie, Sidek dianggap telah “menjual diri” kepada pemerintah karena menyetujui dihapuskannya peraturan “bebas biaya sekolah” bagi masyarakat Melayu di tingkat sekolah menengah (*tertiary education*) dan mendapatkan kedudukan sebagai gantinya.⁸³ Dia juga menyerukan agar Sidek menyadari bahwa agama tidak bisa dipisahkan dengan politik.⁸⁴ Jufrie juga mengancam program pendidikan pemerintah, yang dianggapnya sangat padat, sehingga mengabaikan pendidikan agama. Dia menunjuk pada semakin banyaknya anak sekolah yang menghabiskan waktunya di pusat pelacuran Ocylong.⁸⁵

Tuduhan tersebut dibantah langsung oleh Goh Chok Tong dan menuduh Jufrie telah bermain “politik rasial” dengan menyebut kepentingan Melayu tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat yang lain.⁸⁶ Pernyataan Goh ini didukung

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Suara Pembaruan*, 30 Agustus 1991.

⁸¹ *Ibid*.

⁸² *Kompas*, 31 Agustus 1991.

⁸³ *Ibid*.

⁸⁴ *Suara Pembaruan*, 30 Agustus 1991.

⁸⁵ *Ibid*.

⁸⁶ *Ibid*., 29 Agustus 1991.

oleh 16 Badan Melayu-Islam yang disampaikan secara terbuka pada saat diadakan dialog bersama di Taman Bacaan Pemuda Pemudi Melayu Singapura, di *Bedok Reservoir Road*.⁸⁷ Menurut Goh, apa yang dilontarkan oleh Jufrie tersebut sangat membahayakan bagi persatuan dan kesatuan negara multirasial itu dan bahkan menyebut Jufrie sebagai ekstremis dan komunalis.⁸⁸ Namun demikian, Goh mengatakan bahwa dia tidak mempunyai niat untuk menahan Jufrie berdasarkan UU Keamanan Dalam Negeri (*ISA=Internal Security Act*) atau UU Keharmonisan Agama (*RHA=Religious Harmony Act*) selama tindakan Jufrie masih berada dalam "batas" yang wajar.⁸⁹ Tetapi apabila Jufrie melanggar "batas" yang telah ditentukan pemerintah tersebut, Goh memastikan Jufrie akan ditangkap. Kebijakan Goh ini memperlihatkan bahwa dia lebih lunak dibanding "pendahulunya", dimana dia tidak mengambil tindakan secara langsung untuk menangkap Jufrie dengan alasan membahayakan keamanan negara. Hal tersebut nampaknya memperlihatkan satu perbedaan penampilan antara Goh dengan Lee Kuan Yew. Apabila Lee masih memerintah Singapura, maka kemungkinan besar Jufrie telah dimasukkan ke dalam penjara karena secara nyata telah mengangkat isu komunal yang dapat membahayakan keamanan negara. Namun, ternyata Goh tidak melakukan penangkapan terhadap Jufrie, sehingga nampak bahwa gaya kepemimpinan Goh lebih lunak dan partisipatif serta tidak represif seperti Lee Kuan Yew.

Sebenarnya upaya untuk menarik simpati kelompok Melayu, tidak sebanding dengan jumlah penduduk Melayu yang hanya 15% dari total 2,7 juta jiwa penduduk Singapura.⁹⁰ Hal ini disadari benar oleh Jufrie yang mengatakan bahwa, "Sangatlah bodoh jika oposisi hanya mengandalkan suara kelompok Melayu."⁹¹ Jufrie kemudian menegaskan akan berhenti melontarkan isu-isu masalah ras Melayu dalam kampanye karena banyak pihak yang menentangnya, seperti dikatakannya di depan sekitar 15.000 pendukung *WP (Worker's*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Kompas*, 30 Agustus 1991.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Suara Pembaruan*, 29 Agustus 1991.

⁹¹ *Ibid.*, 30 Agustus 1991.

Party), "Kita tidak mendapat dukungan dari surat kabar dan media, jadi sebaiknya kita berhenti (membuka peluang)."⁹² Namun Jufrie menuntut agar "diberi saluran" untuk membicarakan isu tersebut dengan PM Goh Chok Tong.⁹³ Melihat tindakan yang dilakukan Jufrie di atas nampaknya ada suatu upaya khusus untuk menarik simpati massa yang lebih banyak, tidak hanya dengan mengandalkan suara dari kaum Melayu saja. Jufrie kelihatannya berusaha memanfaatkan momen politik yang sedang berlangsung agar bisa membuka akses secara langsung dengan Goh Chok Tong. Dengan akses yang ada tersebut Jufrie nampaknya mengharapkan terjadi kompromi politik yang selanjutnya bisa lebih menguntungkan pihak oposisi.

Wilayah pemilihan Eunos yang sebagian besar dihuni oleh keturunan Melayu memang paling banyak mendapat perhatian dengan adanya isu yang dilontarkan oleh Jufrie Mahmood. Di wilayah ini, empat calon dari WP yaitu Jufrie Mahmood, Lee Siew Choh, Wee Han Kim dan Neo Chon Aik akan berhadapan dengan empat calon *PAP* yang terdiri dari Tay Eng Soon, Sidek Saniff, Chew Heng Ching dan Charles Chong. Mengingat isu Melayu tersebut, PM Goh Chok Tong menyatakan bahwa hasil pemungutan suara di Eunos akan menjadi indikator, apakah warga Singapura memilih politik rasialisme atau tidak.⁹⁴

Memasnya isu komunal dan rasial sejak pertengahan kampanye sampai menjelang akhir kampanye telah menjadi fenomena tersendiri yang sangat menarik. Hal ini mengindikasikan bahwa komunalisme telah menjadi suatu isu yang sangat penting selama kampanye pemilu. Namun demikian, nampaknya isu ini tidak cukup berpengaruh besar terhadap perolehan suara partai di masing-masing konstituensi. Isu ini hanya berpengaruh secara lokal saja di wilayah pemilihan Eunos, tempat Jufrie melontarkan isu ini pertama kali.

⁹² *Kompas*, 29 Agustus 1991.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Suara Pembaruan*, 29 Agustus 1991.

3.3.2 Pelaksanaan Pemilu Tahun 1991

31 Agustus 1991 adalah hari yang menentukan bagi kelangsungan pemerintahan Goh setelah sembilan bulan memimpin Singapura. Karena, apabila hasil dari pemilu itu menunjukkan jumlah suara di bawah 60% untuk *PAP*, maka Goh akan kehilangan kepercayaan diri dan kemungkinan hanya akan bertahan untuk memimpin Singapura selama satu periode saja.⁹⁵ Seperti dikatakan oleh Goh bahwa pemilu kali ini bukan hanya sekedar untuk berebut kursi saja, melainkan juga telah mempertaruhkan "legitimasi"nya sebagai Perdana Menteri.⁹⁶ Hal yang lebih dalam lagi adalah masalah kepercayaan diri Goh yang ingin direfleksikannya dalam bentuk prosentase hasil pemungutan suara. Goh mengatakan bahwa dia akan kehilangan kepercayaan diri dan "kehilangan muka" jika prosentase suara pendukung *PAP* jatuh sampai 55%.⁹⁷ Akibat yang ditimbulkan dari jatuhnya suara *PAP* akan lebih parah lagi yaitu kepemimpinannya tidak lagi efektif. Dalam beberapa pemilu terakhir, perolehan suara *PAP* mengalami penurunan prosentase, sehingga Goh berniat untuk meningkatkan kembali jumlah suara yang turun tersebut.

Pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 1991 sebanyak 847.716 orang dari jumlah pemilih seluruhnya 1.692.384 berhak menggunakan hak pilihnya untuk menentukan sikap mereka terhadap Goh (*PAP*) dan partai oposisi.⁹⁸ 25 daerah pemilihan yang terdiri dari 20 wilayah pemilihan tunggal dan 5 wilayah pemilihan beregu akan terlibat dalam pemilu pemilu kali ini karena di wilayah pemilihan yang lain, pihak oposisi tidak mengajukan calonnya.⁹⁹

⁹⁵ *Kompas*, 30 Agustus 1991.

⁹⁶ *Ibid.*, 31 Agustus 1991.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Merdeka*, 31 Agustus 1991.

⁹⁹ *Kompas*, 31 Agustus 1991.

Pemilu di Singapura kali ini menggunakan sistem distrik¹⁰⁰ yang dibagi menjadi 21 wilayah pemilihan tunggal dan 15 wilayah pemilihan beregu.¹⁰¹ Sejumlah 40 kursi akan diperebutkan oleh partai-partai yang ikut terlibat dalam pemilu di Singapura. *PAP* mengajukan 81 orang calon untuk semua daerah pemilihan, sedangkan pihak oposisi hanya mengajukan 38 calon serta 7 calon dari kelompok independen untuk 20 wilayah pemilihan tunggal (*SMC*) dan 5 wilayah pemilihan beregu (*GRC*).¹⁰² Calon-calon yang diajukan oleh partai-partai oposisi tersebut terdiri dari; Partai Solidaritas Nasional (*NSP*) 8 calon, Partai Demokratik Singapura (*SDP*) 9 calon, Partai Pekerja (*WP*) 13 calon, Partai Keadilan Singapura (*SJP*) 4 calon, Partai Kebangsaan Melayu Singapura (*PKMS*) 4 calon dan kelompok independen 7 calon.¹⁰³ Walaupun *PAP* sudah pasti memenangkan Pemilu tahun 1991 ini dengan memperoleh 41 kursi tanpa harus bertanding, namun bukan berarti pelaksanaan Pemilu ini tidak menarik lagi. Tidak tampilnya calon-calon oposisi di 41 konstituensi justru berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh partai oposisi dengan mengemukakan strategi yang menganggap bahwa pemilu ini dianggap sebagai pemilu sela, karena sudah tidak mempengaruhi lagi mengenai siapa yang akan memerintah Singapura.¹⁰⁴

¹⁰⁰ Sistem Distrik yang digunakan dalam Pemilu di Singapura menerapkan pembagian wilayah pemilihan yang disesuaikan dengan penambahan penduduk dan keseimbangan ras. Apabila suatu wilayah mempunyai terlalu banyak penduduk Melayu atau golongan berpendidikan Cina, maka wilayah itu dipecah atau digabungkan dengan wilayah lainnya. Dikutip dalam *Kompas*, 22 Desember 1988. Dalam wilayah *SMC* / *Single Member Constituency* satu orang pemilih memberikan suaranya kepada satu orang wakil wilayah tersebut yang akan duduk dalam Parlemen. Sementara, dalam wilayah *GRC* / *Group Representing Constituencies* satu orang pemilih memberikan suaranya kepada 4 orang wakil wilayahnya, dan partai yang menang dalam wilayah konstituensi

ini mendapat 4 kursi dalam Parlemen. Sisa suara di masing-masing wilayah pemilihan tersebut tidak akan diperhitungkan lagi (untuk dijumlahkan dengan kekurangan suara di konstituensi lain) dan dianggap hilang. Dikutip dalam, *Kompas*, 23 Agustus 1991.

¹⁰¹ *Ibid.*, 16 Agustus 1991.

¹⁰² *Ibid.*, 23 Agustus 1991.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Regional Outlook*, *loc.cit.*

BAB IV

HASIL PEMILU TAHUN 1991 DI SINGAPURA SERTA IMPLIKASINYA BAGI PARTAI OPOSISI DAN PARTAI AKSI RAKYAT

4.1 Hasil Pemilu Tahun 1991 di Singapura

Pemilu tahun 1991 di Singapura telah memperlihatkan hasil yang cukup mengejutkan dibanding hasil-hasil pemilu sebelumnya, sejak Singapura merdeka. Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan partai-partai oposisi meraih 39% suara dari total jumlah suara yang sah dan terutama dengan keberhasilannya menempatkan empat wakilnya dalam kursi parlemen.¹ Perolehan kursi yang diraih oleh partai oposisi tersebut mengalami peningkatan dibanding pemilu tahun 1988, yaitu dari 1 kursi menjadi 4 kursi. Sementara, jumlah suaranya juga mengalami peningkatan sebanyak 2,2% dari 36,8% suara yang diraih dalam pemilu sebelumnya yaitu tahun 1988.²

Tabel 1.
Hasil Perolehan Suara Partai Aksi Rakyat Sejak Pemilu Pertama

Tahun	Kursi Parlemen	Calon PAP Tanpa oposan	% suara sah (PAP)	Kursi PAP	Kursi Oposisi
1959	51	-	54,1	43	8
1963	51	-	46,9	37	14
1968	58	51	86,7	58	-
1972	65	8	70,4	65	-
1976	69	16	74,1	69	-
1980	75	37	77,7	75	-
1984	79	30	64,8	77	2
1988	81	11	63,2	80	1
1991	81	41	61,0	77	4

Sumber: Kompas, 1 September 1991.

Dari tabel 1 di atas, nampak bahwa hasil pemilu tahun 1991 ini merupakan hasil yang terburuk bagi PAP sejak tahun 1968, baik dilihat dari segi persentase

¹ Garry Rodan, "Preserving the One Party state in Contemporary Singapore" dalam Kevin Hewison, Richard Robison, Garry Rodan (eds.), *Southeast Asia in The 1990s, Authoritarianism, Democracy and Capitalism*, St. Leonards, 1993., hal. 97.

² *Ibid.*

suara, maupun jumlah kursi. Pada pemilu tahun 1968 *PAP* mampu meraih 86,7% dari jumlah suara yang sah dan berhasil menyapu bersih seluruh kursi parlemen. Keberhasilan *PAP* untuk tidak menyisakan satu kursipun bagi partai oposisi dalam pemilu tahun 1968 tersebut antara lain disebabkan tidak adanya partai yang tangguh yang mampu menyainginya dalam perebutan kursi parlemen.³ Mundurnya Barisan Sosialis dari parlemen pada tahun 1965 dan perpecahan internal partai menyebabkan bubarnya Barisan Sosialis sebagai satu-satunya partai yang mampu menyaingi *PAP*, sehingga Barisan Sosialis tidak dapat ikut serta pada pemilu tahun 1968.⁴ Selain itu, diterimanya ideologi "*survival* dan *pragmatisme*"⁵ oleh sebagian besar rakyat mampu menghasilkan legitimasi politik yang tinggi terhadap pemerintahan *PAP* yang berwujud pada dukungan penuh rakyat kepada *PAP* dalam pemilihan umum.⁶

Keberhasilan *PAP* juga terkait dengan kemampuannya memenuhi kebutuhan materi rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang ada dari berbagai program pembangunan ekonomi yang dijalankan. Pembangunan ekonomi di Singapura tersebut nampaknya dijalankan dengan mengesampingkan pembangunan pada bidang politik. Hal tersebut terlihat dengan adanya kebijakan depolitisasi dari pemerintah. Munculnya kebijakan ini dilatarbelakangi oleh pengalaman historis bangsa, yaitu dengan adanya ancaman Komunis pada sekitar tahun 1950-an sampai tahun 1960-an. Pelaksanaan kebijakan ini antara lain dengan melarang pemogokan buruh, membatasi kebebasan pers, penggunaan ISA

³ Chan Heng Chee, *Demokrasi dan Kapitalisme: Perspektif Asia dan Amerika*, CIDES, 1994., hal. 16.

⁴ *Ibid.*

⁵ Penerapan ideologi *survival* oleh pemerintahan *PAP* didasarkan pada kejelian *PAP* melihat kondisi negara yang sedang terjadi pada saat awal pemerintahan sendiri oleh *PAP*. Tiga hal yang benar-benar sangat mendesak untuk segera diatasi tersebut yaitu, ketiadaan sumber daya alam, ancaman Komunis dan ancaman eksternal. Kemiskinan, keterbelakangan, banyaknya pengangguran dan ketiadaan sumber kekayaan alam menunjukkan ketidakmampuan ekonomi negara yang nampaknya merupakan hal yang perlu segera diatasi oleh pemerintah. Selain itu, adanya upaya-upaya dari Komunis yang menghasut rakyat dan bahkan dengan cara kekerasan berusaha menguasai pemerintahan juga dianggap sebagai hal yang mendesak untuk segera diselesaikan. Hal terakhir yang melandasi ideologi tersebut adalah tantangan dari negara tetangga yang mengkhawatirkan terhadap penyebaran Komunis dari Singapura yang penduduknya mempunyai mayoritas etnis Cina. Dikutip dalam Chua Beng Huat, "*Singapore*", dalam Norma Mahmood (ed), *Rethinking Political Development in Southeast Asia*, University of Malaya Press, Kuala Lumpur, 1994., hal. 126.

⁶ *Ibid.*

(*Internal Security Act*) untuk menangkap orang-orang yang dianggap menentang pemerintah dan membahayakan keamanan negara, meredam munculnya organisasi sosial politik yang kuat dan dapat membahayakan kedudukan pemerintah serta beberapa kebijakan lain yang pada intinya sangat membatasi kebebasan berpolitik bagi rakyat.⁷ Beberapa faktor diatas telah menyebabkan dominasi *PAP* dalam setiap pemilu cukup tinggi yaitu dengan persentase suara diatas 70% dan sapu bersih kursi parlemen yang berhasil dipertahankan sampai pemilu tahun 1980.

Pada pertengahan tahun 1980-an dominasi *PAP* dalam parlemen menunjukkan kecenderungan menurun. Pada pemilu tahun 1984, perolehan persentase suara *PAP* berada di bawah 70% dan tidak lagi mampu menyapu bersih seluruh kursi parlemen. Pada pemilu tahun 1984 tersebut *PAP* harus kehilangan 2 kursinya dan mengalami penurunan persentase suara sebanyak 12,5% dari 77,7% di tahun 1980 menjadi 64,8% pada tahun itu. Selanjutnya, pada pemilu tahun 1988 *PAP* harus mengalami penurunan persentase suara kembali menjadi 63,2%, walaupun jumlah kursi yang lepas berkurang tinggal 1 kursi saja. Penyebab turunnya persentase suara dan perolehan kursi *PAP* pada pemilu tahun 1984 dan 1988 tersebut diakibatkan oleh beberapa hal antara lain; adanya perluasan pemilih baru yang berasal dari kaum muda yang lebih berpendidikan yang mana mempunyai orientasi dan pemikiran yang berbeda dalam memandang proses perpolitikan negara dibanding dengan generasi pendahulunya.⁸ Selain itu, beberapa kebijakan tidak populer yang dijalankan oleh pemerintahan *PAP* juga menjadi salah satu sebab berkurangnya dukungan rakyat kepada *PAP* dalam pemilu tahun 1984 dan 1988.⁹

Bertambahnya jumlah generasi muda yang lebih berpendidikan di Singapura merupakan salah satu akibat dari pertumbuhan industrialisasi dan

⁷ Dikutip dalam Skripsi Vici Henry Lihardo, *Partisipasi Politik Dalam Pembangunan Politik Ekonomi Singapura*, Universitas Gadjah Mada, 1994., hal. 58.

⁸ Lew Eng Fee, "Singapore in 1988: Uncertainties of Maturing Polity", dalam *Southeast Asian Affairs 1989*, Institute of Southeast Asian Studies, Heinemann Educational Books (Asia) LTD, Singapura, 1989., hal. 282.

⁹ *Ibid.*

kemajuan ekonomi yang diperoleh Singapura di bawah pemerintahan *PAP*. Dalam proses pertumbuhan industrialisasi di Singapura, perhatian pemerintahan Singapura pada masa Lee Kuan Yew terhadap bidang pendidikan terlihat cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan prioritas yang diberikan pemerintah pada bidang pendidikan di Singapura. Bidang ini mendapatkan prioritas utama, selain bidang ekonomi, yaitu sekitar 10% dari anggaran pengeluaran negara pada tahun 1959 – 1978 dan meningkat menjadi sekitar 15-20% pada tahun 1980-1987.¹⁰ Hasil dari usaha tersebut adalah meningkatnya jumlah pelajar yang ada di Singapura. Pada tahun 1987 jumlah pelajar di Singapura tercatat sebesar 534.000 murid dan tinggal 11% saja dari total penduduk yang berusia 10 tahun atau lebih yang tidak berpendidikan.¹¹ Meningkatnya jumlah pelajar ini juga berakibat pada bertambahnya jumlah pemilih baru yang berpendidikan. Pada pemilu tahun 1984 terdapat 215.000 pemilih baru yang berusia antara 21 – 24 tahun¹² dan 60% dari total pemilih tersebut tidak mempunyai kenangan tentang masa-masa sulit yang dihadapi oleh bangsa Singapura pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an.¹³ Jumlah pemilih baru dari generasi muda tersebut kembali mengalami peningkatan hingga mencapai angka 70% pada tahun 1989.¹⁴ Nampaknya, keberhasilan pemerintah Singapura dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang diantaranya ditandai dengan meningkatnya jumlah generasi muda yang berpendidikan tinggi, ternyata tidak selalu berakibat positif bagi pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemilu tahun 1991, yang mana salah satu faktor penyebab berkurangnya dukungan suara bagi *PAP* berasal dari generasi muda terdidik yang menjadi pemilih baru, yang ironisnya, mereka merupakan produk langsung dari *PAP* (lahir pada masa pemerintahan *PAP* dan tidak mengalami masa-masa sulit dimana kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup

¹⁰ Jon ST. Quah, "*Infrastructure and Services For The Region*", dalam Chan Heng Chee (ed), *Modern Singapore*, Singapore, 1988., hal. 113.

¹¹ *Ibid.*

¹² Fee, *op.cit.*, hal. 281.

¹³ Huat dalam Mahmood (ed), *loc.cit.*

¹⁴ *Ibid.*

rakyat dan negara merupakan masalah yang paling mendesak untuk segera diselesaikan).¹⁵

Beberapa kebijakan yang tidak populer dari pemerintah juga menjadi sebab berkurangnya dukungan rakyat terhadap *PAP*, seperti kebijakan dua kelas yang menganjurkan wanita yang bukan sarjana untuk mempunyai dua anak saja dan membolehkan bagi wanita yang sarjana untuk mempunyai anak lebih dari tiga.¹⁶ Kebijakan tersebut nampaknya bisa dilihat sebagai bukti perhatian pemerintah yang lebih besar pada golongan yang lebih kaya dibanding dengan golongan yang lebih rendah pendapatannya. Dari generasi muda Singapura mulai tumbuh perasaan ketidaksenangan mengenai campur tangan yang terlalu dalam dari pemerintah terhadap urusan pribadi masyarakat.¹⁷ Hal ini terlihat dari berbagai pernyataan yang dikemukakan oleh kaum muda, yang pada intinya mengkritik intervensi pemerintah yang terlalu jauh dalam bidang-bidang yang menyangkut kehidupan pribadi masyarakat.¹⁸

Generasi muda Singapura juga mulai melihat bahwa dominasi satu partai dalam suatu negara adalah tidak sehat. Hal ini bisa dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh *Strait Times* yang menunjukkan bahwa 68% generasi muda menghendaki adanya oposisi dalam parlemen, 77% diantaranya menyebutkan perlunya pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan sebagai alasan utamanya.¹⁹ Dari fenomena tersebut nampaknya bisa dilihat bahwa dengan perkembangan jumlah generasi muda yang berpendidikan telah memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi *PAP* yaitu berkurangnya dukungan suara kepada *PAP*. Para pemilih muda tersebut menghendaki pemberian kesempatan memilih yang lebih luas bagi mereka untuk menampung segala bentuk aspirasi dan partisipasi yang berkembang dalam masyarakat. Tuntutan kaum muda tersebut nampaknya tidak hanya pada persoalan untuk

¹⁵ Fee, *op.cit.*, hal. 282.

¹⁶ Lee Boon Hiock, "Singapore in 1984: A Time for Reflection and a Time For Change", dalam *Southeast Asian Affairs 1984*, Institute of Southeast Asian Studies, Heinemann Educational Books (Asia) LTD, 1984., hal. 302.

¹⁷ Huat dalam Mahmood (ed), *loc.cit.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Fee., *op.cit.*, hal. 282.

mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar, melainkan telah meningkat pada keinginan untuk bisa berperan serta dalam proses pengambilan keputusan.

Berkurangnya dominasi *PAP* semakin jelas terlihat pada pemilu tahun 1991 ini, ketika *PAP* tidak saja mengalami penurunan persentase suara, tetapi juga harus kehilangan kursi yang lebih banyak. Jumlah suara bagi *PAP* menurun sebanyak 2,2% dari 63,2% di tahun 1988 menjadi 61,0% di tahun 1991.²⁰ Sementara, jumlah kursi yang lepas bertambah dari 1 kursi di tahun 1988 menjadi 4 kursi di tahun 1991.²¹ Mengenai sebab-sebab berkurangnya jumlah suara *PAP* pada pemilu tahun 1991 ini akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

Dari 1.692.384 pemilih yang berhak memberikan suaranya, tercatat 847.716 orang saja yang bisa menyalurkan hak pilihnya.²² Hal ini dikarenakan dari 81 konstituensi yang ada, 41 konstituensi diantaranya hanya terdapat calon tunggal dari Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party / PAP*), sehingga tinggal 40 konstituensi yang masih melangsungkan pemungutan suara. Sebanyak 783.612 atau sekitar 92,5% surat pemilihan tercatat sebagai suara yang sah dalam pemilu tahun 1991 ini.²³ Dari 92,5% pemilih sah tersebut, 61% diantaranya memberikan suaranya bagi *PAP* dan sebanyak 39% memilih partai-partai oposisi.²⁴

Perolehan persentase suara bagi *PAP* pada pemilu tahun 1991 ini ternyata tidak lagi dominan seperti pada akhir tahun 1960-an sampai dengan awal tahun 1980 (seperti yang ditunjukkan pada tabel 1) karena hanya berhasil meraih 61,0% suara. Masing-masing partai peserta pemilu nampaknya juga telah mendapat dukungan dari para pemilih. Partai-partai tersebut tidak hanya sekedar partai tanpa pendukung yang hanya tercatat sebagai peserta pemilu saja. Walaupun perolehan kursi pada pemilu kali ini hanya didapatkan oleh tiga partai, yaitu *PAP*, *SDP* dan *WP*, namun hasil yang ditunjukkan oleh partai-partai selain ketiga partai tersebut mulai mengalami peningkatan dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Misalnya,

²⁰ *Kompas*, 2 September 1991.

²¹ *Ibid.*

²² *Kompas*, 1 September 1991.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Bisnis Indonesia*, 3 September 1991.

hasil yang diperoleh Partai Solidaritas Nasional (*National Solidarity Party / NSP*) yang meningkat sekitar hampir 50% dibanding pemilu sebelumnya yang hanya mendapatkan dukungan sebesar 41.435 suara.²⁵ Jumlah kursi dan persentase suara yang diperoleh partai-partai peserta pemilu tahun 1991 tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Perolehan Suara Partai-Partai pada Pemilu Singapura 31 Agustus 1991²⁶

Partai	Calon	Perolehan Suara	%	Perolehan Kursi
Partai Aksi Rakyat (<i>PAP</i>)	40	477.760	61,0	36
Partai Pekerja (<i>WP</i>)	13	112.010	14,3	1
Partai Demokrasi Singapura (<i>SDP</i>)	9	93.856	12,0	3
Partai Solidaritas Nasional (<i>NSP</i>)	8	57.306	7,3	0
PKMS	4	12.862	1,6	0
Partai Keadilan Singapura (<i>SJP</i>)	4	15.222	1,9	0
Kelompok Independen	7	14.596	1,9	0

Sumber: *Suara Pembaruan*, 2 September 1991.

Selanjutnya, untuk lebih memperinci perolehan persentase suara di masing-masing wilayah pemilihan, baik di wilayah pemilihan tunggal (*Single Member Constituency / SMC*) maupun di wilayah pemilihan beregu (*Group Representing Constituencies / GRC*) dan membandingkan hasilnya dengan pemilu sebelumnya tahun 1988 akan ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Persentase Suara *PAP* dalam Pemilu Tahun 1988 dan 1991

Tabel 3a.

Wilayah Pemilihan Beregu	1991 (%)	1988 (%)
Bedok	62,0	54,9
Marine Parade	77,2	73,8
Eunos	52,4	50,9
Tampines	59,5	61,0
Cheng San	64,1	Tidak Bertanding

²⁵ Fee, *op.cit.*, hal. 284.

²⁶ *Suara Pembaruan*, 2 September 1991.



Tabel 3b.

Wilayah Pemilihan Tunggal	1991 (%)	1988 (%)
Ayer Rajah	75,2	69,6
Boon Lay	73,3	72,0
Braddel Heights	52,3	58,8
Bukit Batok	51,8	55,9
Bukit Gombak	48,6	53,5
Bukit Merah	61,9	69,8
Buona Vista	79,4	61,8
Changi	53,0	59,4
Chua Chu Kang	68,4	59,3
Hougang	47,2	59,0
Jurong	64,3	75,2
Leng Kee	76,6	65,0
Mountbatten	78,0	78,2
Nee Soon Central	49,7	57,6
Nee Soon South	52,8	64,9
Potong Pasir	30,4	36,9
Ulu Pandan	56,4	69,1
Yuhua	56,2	63,0
Bukit Timah	72,6	Tidak Bertanding
Tanglin	68,5	Tidak Bertanding

Sumber: Bilveer Singh, *Whither PAP's Dominance ? An Analysis of Singapore's 1991 General Elections*, Pelanduk Publications, Singapura, 1992., hal. 87-88.

Dari tabel 3a dan 3b di atas nampak bahwa di beberapa konstituensi, PAP masih mampu meraih suara yang cukup tinggi di atas 70%. Di wilayah pemilihan beregu (GRC) *Marine Parade*, Goh Chok Tong bersama rekannya, *Othmand Harun*, *Lim Chee Onn* dan *Mathias Yao* masih terlalu kuat dibandingkan dengan kandidat dari Partai Keadilan Singapura (SJP) dengan meraih 51.685 suara atau sekitar 77,2%.²⁷ Enam konstituensi lain juga memperoleh suara di atas 70% diantaranya;²⁸ wilayah pemilihan tunggal (SMC) *Ayer Rajah* (75,2%), *SMC Boon Lay* (73,3%), *SMC Buona Vista* (79,4%), *SMC Leng Kee* (76,6%), *SMC Mountbatten* (78,0%) dan *SMC Bukit Timah* (72,6%). Selain itu, di sejumlah konstituensi lainnya PAP juga mendapatkan suara yang cukup besar di atas 60%

²⁷ *Suara Pembaruan*, 1 September 1991.

yaitu; di *SMC Chua Chu Kang* (68,4%), *SMC Jurong* (64,3%), *SMC Tanglin* (68,5%), *SMC Bukit Merah* (61,9%), *GRC Bedok* (62,0%), *GRC Cheng San* (64,1%). Dominasi *PAP* di beberapa konstituensi di atas nampaknya masih belum tergoyahkan oleh partai-partai oposisi. Disamping kurangnya pendukung partai oposisi di daerah-daerah tersebut, faktor-faktor yang menguntungkan *PAP* seperti, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta kredibilitas calon-calon *PAP* juga lebih berpengaruh terhadap pandangan masyarakat di wilayah tersebut.²⁹ Sebagai contoh, di *GRC Marine Parade* di mana Dewan Kota yang dikuasai oleh *PAP* mampu mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, sehingga menyebabkan dukungan masyarakat di wilayah tersebut terhadap *PAP* juga cukup tinggi.³⁰ Hal tersebut ditambah dengan kredibilitas calon-calon *PAP* di *GRC Marine Parade* yang diwakili oleh PM Goh Chok Tong, Othman Haron Eusofe, Lim Chee Onn dan Mathias Yao.³¹ Kredibilitas itu antara lain bisa dilihat dari kapasitas kemampuan dan pengalaman dalam bidang politik yang dimiliki keempat calon *PAP* tersebut, terutama Goh Chok Tong, yang nampaknya jauh lebih unggul dibanding calon-calon dari partai Keadilan Singapura (*Singapore Justice Party / SJP*).³²

Sementara itu, di beberapa konstituensi yang lain *PAP* mengalami hasil yang kurang memuaskan karena hanya meraih kemenangan tipis, dan bahkan di 4 konstituensi mengalami kekalahan. Kemenangan tipis *PAP* di atas 50% terjadi di 5 konstituensi diantaranya; *SMC Braddel Heights* (52,3%), *SMC Bukit Batok* (51,8%), *SMC Changi* (53,0%), *SMC Nee Soon South* (52,8%), dan *GRC Eunos* (52,4%). Hasil yang lebih buruk diperoleh *PAP* di beberapa konstituensi dengan kegagalannya memenangkan suara di empat wilayah pemilihan tunggal (*SMC*) yaitu di *SMC Potong Pasir*, *SMC Bukit Gombak*, *SMC Nee Soon Central* dan *SMC Hougang*. Di *SMC Potong Pasir*, calon oposisi yang juga sebagai sekjen Partai Demokrasi Singapura (*SDP*), *Chiam See Tong* untuk ketiga kalinya berhasil

²⁹ Bilveer Singh, *Whither PAP's Dominance? An Analysis of Singapore's 1991 General Elections*, Pelanduk Publications, Singapura, 1992., hal. 85.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hal. 56.

³² Singh, *op.cit.*, hal. 56.

menduduki kursi parlemen. Pada pemilu tahun 1991 ini Chiam mampu mengalahkan calon dari *PAP*, *Andy Gan*, dengan perolehan suara yang cukup tinggi yaitu sebesar 69,6%. Perolehan suara Chiam tersebut mengalami peningkatan dibanding 63,1% suara yang diraihinya pada pemilu tahun 1988.³³ Beberapa hal yang nampaknya menjadi sebab meningkatnya dukungan suara kepada Chiam See Tong ini diantaranya adalah keberhasilan Chiam See Tong dalam memimpin Dewan Kota Potong Pasir yang ditunjukkan dengan kemampuannya mengakomodasi dan memenuhi berbagai kebutuhan rakyat.³⁴ Selain itu, masih kurangnya pengalaman dari calon *PAP* di wilayah Potong Pasir, *Andy Gan*, yang baru pertama kali dicalonkan menjadi anggota parlemen juga makin memperkuat posisi Chiam See Tong dalam pemilu tahun 1991 ini.³⁵ Sementara calon *SDP* lainnya, *Cheo Chai Chen*, yang mewakili oposisi di *SMC Nee soon Central* juga berhasil menang tipis melawan calon *PAP*, *Ng Pock Too* dengan memperoleh 50,3% suara. Calon *PAP* lainnya dari *SMC Bukit Gombak*, *Dr. Seet Ai Mee*, yang juga merupakan pejabat menteri pembangunan masyarakat harus mengakui keunggulan wakil dari *SDP*, *Ling How Doong*, dengan perbandingan 12.037 : 11.383 suara.³⁶ Wakil oposisi terakhir yang mampu memperoleh kursi dalam pemilu tahun 1991 ini adalah calon dari Partai Pekerja (*WP*), *Low Thia Kiang*, yang berhasil mengalahkan calon *PAP*, *Tang Guan Seng* di *SMC Hougang* dengan persentase suara 52,8%.³⁷ Dari hasil pemilihan di 40 konstituensi tersebut nampaknya perolehan suara *PAP* masih cukup tinggi dibandingkan suara yang diperoleh partai-partai oposisi. Hal ini dapat dilihat dari persentase suara *PAP* yang masih di atas 60% dalam pemilu tahun 1991 ini.³⁸ Namun disisi lain, hasil pemilu kali ini menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dari partai-partai oposisi, terbukti dengan kekalahan tipis partai oposisi di 5 konstituensi dan kemenangan di 4 konstituensi.

³³ *Suara Pembaruan*, 1 September 1991.

³⁴ Singh, *op.cit.*, hal. 106.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Merdeka*, 2 September 1991.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Suara Pembaruan*, 2 September 1991.

Hasil Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1991 di Singapura telah memberikan suatu indikasi tersendiri bahwa posisi partai oposisi mulai menunjukkan tanda-tanda menguat. Walaupun secara umum, kenaikan persentase suara yang diraih partai-partai oposisi tersebut relatif kecil yaitu sekitar 2,2% (dari 36,8% tahun 1988 menjadi 39% tahun 1991), namun setidaknya-tidaknya hal itu sangat berpengaruh bagi Goh Chok Tong secara pribadi. Hal ini dikarenakan Goh Chok Tong telah berusaha semaksimal mungkin mengantisipasi isu utama kampanye pemilu yang diangkat oleh partai oposisi, yaitu mengenai kebebasan dan demokrasi. Goh Chok Tong nampaknya merasa bahwa dengan gaya kepemimpinan yang terbuka dan partisipatif seperti yang dimilikinya, mampu menunjukkan bahwa dia memahami dan mampu mengakomodasi keinginan sebagian besar rakyat Singapura yang menghendaki suatu pemerintahan yang demokratis. Disamping itu, Goh Chok Tong juga mengharapkan bahwa program-program berupa "*Edusave, Medifund dan Open University*" yang telah direncanakannya mampu meningkatkan dukungan suara rakyat kepada PAP³⁹. Namun, nampaknya harapan Goh Chok Tong tersebut tidak mendapat dukungan penuh dari rakyat, terbukti dengan turunnya persentase suara yang diraih PAP serta lepasnya 4 kursi ke tangan oposisi.

Perubahan gaya kepemimpinan dari otoriter dan paternalistik yang dimiliki oleh Lee Kuan Yew menjadi gaya kepemimpinan yang terbuka dan partisipatif dari Goh Chok Tong sebenarnya membawa akibat yang baik bagi PAP. Dalam konteks ini, gaya kepemimpinan Goh yang lebih terbuka dan partisipatif sedikit banyak mampu meredam penurunan suara yang lebih besar lagi bagi PAP. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya isu yang menyangkut mengenai gaya pemerintahan, seperti yang dikeluhkan oleh kaum muda pada pemilu tahun 1984 dan 1988.

³⁹ Program *Edusave* (subsidi pendidikan) merupakan program pemerintah berupa bantuan pendidikan kepada anak-anak yang berumur 6 sampai 16 tahun yang berbentuk pengurangan biaya pendidikan dimana program ini memerlukan dana sekitar S \$ 5 miliar. Pemerintah juga membangun sejumlah gedung-gedung seperti, empat politeknik, merubah Badan Pelatihan Industri dan Kejuruan menjadi Institut Pendidikan Teknik yang baru dengan diawali dengan mendirikan *SOU (Singapore Open University)*. Dalam bidang kesehatan, pemerintah merencanakan program berupa *medifund* (dana kesehatan) yang diperkirakan akan menghabiskan biaya sekitar S \$ 5 miliar. Program ini memberikan pelayanan kesehatan yang ditujukan bagi masyarakat Singapura yang kurang mampu. Dikutip dalam Bilveer Singh., *op.cit.*, hal. 33.

Dengan terpenuhinya aspirasi kaum muda terhadap gaya pemerintahan yang lebih terbuka, nampaknya dukungan terhadap *PAP* dari kaum muda yang semula sangat mempermasalahakan hal ini mulai menguat. Namun, hal tersebut tidak cukup mampu untuk mencegah peningkatan dukungan suara bagi partai-partai oposisi. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor lain yang lebih mempengaruhi pandangan massa pemilih, yaitu tuntutan terhadap perluasan aspirasi rakyat yang semakin besar, serta ketidakpuasan rakyat terhadap pelayanan pemerintah di beberapa wilayah tertentu⁴⁰ diantaranya wilayah Hougang, Bukit Batok dan Nee Soon Central.⁴¹

4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Pemilu Tahun 1991

4.2.1 Keefektifan Strategi Pemilu Partai Oposisi

Salah satu penentu keberhasilan partai oposisi dalam pemilu kali ini adalah strategi pemilu sela (*by election*) yang pertama kali dilontarkan oleh sekjen Partai Demokratik Singapura (*SDP*), Chiam See Tong.⁴² Strategi yang diterapkan oleh *SDP* dengan menganggap bahwa pemilu kali ini hanya sebagai pemilu sela saja nampaknya benar-benar mempengaruhi pemikiran masyarakat. Partai-partai oposisi mampu menimbulkan citra di kalangan masyarakat bahwa partai oposisi tidak bermaksud untuk menumbangkan pemerintahan yang ada.⁴³ Strategi pemilu sela yang diangkat oleh Chiam di atas juga didukung oleh strategi partai oposisi lainnya, yaitu dengan tidak mengajukan calon-calonnya di 41 konstituensi dari total 81 konstituensi yang ada sampai batas terakhir hari pencalonan tanggal 21 Agustus 1991.⁴⁴ Kemenangan *PAP* di 41 konstituensi yang tidak diikuti pihak oposisi sebelum hari pemungutan suara tiba telah memberikan kepastian bahwa Partai Aksi Rakyat (*PAP*) akan tetap memerintah negara pulau tersebut untuk periode selanjutnya.⁴⁵ Adanya citra positif dari masyarakat kepada partai oposisi nampaknya menjadi modal tersendiri bagi partai oposisi untuk meraih dukungan

⁴⁰ *Pelita*, 8 September 1991.

⁴¹ Singh, *loc. cit.*

⁴² *Far Eastern Economic Review, Asia 1992, Year Book, 1992*, hal. 186.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Regional Outlook, Southeast Asia 1992-93, ISEAS, Singapura, 1993*, hal. 27.

⁴⁵ *Ibid.*

suara yang lebih banyak dari masyarakat. Partai oposisi telah menghilangkan keraguan dan kekhawatiran masyarakat yang menganggap bahwa partai oposisi bermaksud akan menumbangkan pemerintahan yang ada dengan tampil sebagai pemenang pemilu.⁴⁶

Kekhawatiran rakyat tersebut nampaknya cukup beralasan melihat lemahnya kondisi partai oposisi yang ditunjukkan dari kurangnya kader-kader yang tangguh, kecilnya sumber keuangan partai dan pengaruhnya di masyarakat serta tidak adanya pengalaman memerintah negara Singapura.⁴⁷ Rakyat hanya menginginkan keberadaan oposisi di parlemen untuk mengawasi penyalahgunaan kekuasaan dalam kebijakan yang diambil pemerintah dan sebagai wadah untuk menampung aspirasi yang tidak terakomodir oleh pemerintah.⁴⁸ Rakyat masih sangat percaya bahwa PAP merupakan partai terbaik di Singapura untuk saat ini dan oleh karena itu hanya partai inilah yang pantas untuk memimpin Singapura.⁴⁹ Jadi, rakyat nampaknya lebih mantap untuk memberikan dukungan kepada partai oposisi apabila PAP benar-benar masih bisa dipastikan sebagai pemenang pemilu dan tetap menjadi penguasa Singapura untuk periode selanjutnya.

4.2.2 Isu-Isu yang diangkat Oposisi

Beberapa isu dilontarkan oleh partai-partai oposisi dalam sepuluh hari masa kampanye pemilu sejak tanggal 21 sampai dengan 30 Agustus 1991.⁵⁰ Isu yang sempat meramalkan masa-masa kampanye diantaranya adalah isu mengenai ras atau komunalisme.⁵¹ Isu ini pertama kali dilontarkan oleh seorang calon dari Partai Buruh (WP) yang keturunan Melayu yaitu Mohammad Jufrie Mahmood.⁵² Jufrie menuduh calon PAP untuk daerah pemilihan Eunos yang juga keturunan Melayu, Sidek Sanif, telah "menggadaikan" prinsip moral dan agamanya untuk

⁴⁶ *Pelita*, 16 September 1991

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Fee, *op.cit.*, hal 281.

⁴⁹ *Suara Pembaruan*, 11 September 1991.

⁵⁰ *Kompas*, 22 Agustus 1991

⁵¹ Hussin Mutalib, "Singapore's 1991 General Election" dalam *Southeast Asian affairs 1992*, Institute of Southeast Asian Studies Heinemann Educational Books (Asia) LTD, Singapura, 1992., hal. 299.

⁵² *Ibid.*

menggembirakan PAP.⁵³ Menurut Jufrie, Sidek dianggap telah “menjual diri” kepada pemerintah karena menyetujui dihapuskannya peraturan “bebas biaya sekolah” bagi masyarakat Melayu di tingkat sekolah menengah (*tertiary education*) dan mendapatkan kedudukan sebagai gantinya.⁵⁴ Dia menyerukan agar Sidek menyadari bahwa agama tidak bisa dipisahkan dengan politik.⁵⁵ Jufrie juga mengancam program pendidikan pemerintah, yang dianggapnya sangat padat, sehingga mengabaikan pendidikan agama. Dia menunjuk pada semakin banyaknya anak sekolah yang menghabiskan waktunya di pusat pelacuran Ocylong.⁵⁶

Tuduhan tersebut dibantah langsung oleh Goh Chok Tong dan menuduh Jufrie telah bermain “politik rasial” dengan menyebut kepentingan Melayu tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat yang lain.⁵⁷ Menurut Goh, apa yang dilontarkan oleh Jufrie tersebut sangat membahayakan bagi persatuan dan kesatuan negara multirasial itu dan bahkan menyebut Jufrie sebagai ekstremis dan komunalis.⁵⁸ Pernyataan Goh ini didukung oleh 16 Badan Melayu-Islam yang disampaikan secara terbuka pada saat diadakan dialog bersama di Taman Bacaan Pemuda Pemudi Melayu Singapura, di *Bedok Reservoir Road*.⁵⁹ Dengan adanya dukungan dari 16 Badan Melayu Islam di atas, nampaknya menunjukkan bahwa isu-isu yang menyangkut mengenai ras atau komunal berusaha dihindari oleh masyarakat karena dianggap bisa memecah persatuan dan kesatuan dari bangsa Singapura yang multi etnis tersebut. Dampak secara langsung terhadap penambahan suara oposisi tidak begitu terlihat, bahkan sebaliknya, isu ini berdampak negatif bagi partai oposisi. Hal ini terlihat dengan menurunnya perolehan suara oposisi di *GRC Eunos* tersebut sebesar 1,5% dari pemilu sebelumnya menjadi 47,6%.⁶⁰

⁵³ *Kompas*, 31 Agustus 1991.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Suara Pembaruan*, 30 Agustus 1991.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, 29 Agustus 1991.

⁵⁸ *Kompas*, 30 Agustus 1991.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 300.

Diantara isu yang berkembang, isu yang cukup berpengaruh dalam meningkatkan perolehan suara dan kursi partai-partai oposisi antara lain adalah isu mengenai kebebasan dan demokrasi yang dikemukakan oleh calon-calon dari *SDP dan WP*.⁶¹ Partai-partai oposisi menjanjikan terbentuknya pemerintahan yang lebih baik yang akan mampu menampung serta mengakomodasi setiap keluhan dan keinginan rakyat secara baik.⁶² *SDP* menggunakan cara dengan menekankan perlunya sistem dua partai agar masyarakat bisa lebih bebas dan lebih leluasa untuk menentukan pilihan pada partai yang dipandang lebih baik.⁶³ Sementara itu, *WP* mengatakan bahwa dengan lebih banyak oposisi di parlemen dapat memberi kebebasan yang lebih besar bagi rakyat Singapura.⁶⁴ Isu yang diangkat tersebut nampaknya semakin membangkitkan gairah masyarakat untuk memilih partai oposisi, terutama di wilayah-wilayah di mana keluhan dan keinginan masyarakat masih belum terakomodir oleh pemerintah.

Indikator dukungan rakyat terhadap partai oposisi nampak di beberapa konstituensi yang dimenangkan oleh partai oposisi, salah satunya di wilayah pemilihan tunggal Nee Soon Central.⁶⁵ Di wilayah ini, Dewan Kota yang dikuasai oleh *PAP* kurang mampu mengakomodasi keinginan rakyat yang menghendaki pembangunan taman umum, pangkalan taksi, pembangunan *Mass Rapid Transport Stations (MRTS)*, penanganan sarana dan prasarana perumahan dan beberapa masalah lain yang mana menunjukkan ketidakmampuan Dewan Kota memenuhi aspirasi rakyat yang berkembang.⁶⁶ Pilihan mereka kemudian beralih kepada partai oposisi yang menjanjikan lebih banyak kebebasan kepada rakyat untuk turut berpartisipasi dalam proses penentuan kebijakan. Dari fenomena di atas, terdapat adanya suatu hal yang cukup menarik. Di satu sisi, rakyat menyadari bahwa partai oposisi akan sulit untuk berbuat lebih baik dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh *PAP*. Namun di sisi lain, mereka tetap memberikan suaranya kepada partai oposisi. Dalam hal ini, nampaknya keinginan dari rakyat

⁶¹ Singh, *op.cit.*, hal. 78.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Singh, *op.cit.* hal. 299.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 106.

⁶⁶ *Ibid.*

adalah adanya perhatian pemerintah *PAP* yang lebih besar lagi terhadap kebutuhan dan keinginan mereka. Rakyat berharap bahwa keberadaan mereka lebih diperhitungkan oleh pemerintah karena suara mereka sebenarnya sangat berarti bagi kelangsungan dominasi *PAP* dalam pemerintahan Singapura. Apabila pemerintah tidak ingin kehilangan dukungan suara dan kursi parlemen yang lebih banyak, maka yang nampaknya diharapkan oleh rakyat adalah meningkatnya kepedulian pemerintah terhadap segala aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Beberapa isu lokal yang diangkat oposisi juga cukup mempengaruhi perolehan suara bagi oposisi. Isu-isu tersebut diantaranya adalah isu "*bread and butter*"⁶⁷ dan isu Dewan Kota.⁶⁸ Isu "*bread and butter*" berkaitan dengan permasalahan ekonomi yang sedang terjadi yaitu peningkatan biaya hidup yang disebabkan oleh kenaikan pajak, biaya sekolah dan biaya transportasi.⁶⁹ Pihak oposisi mengatakan bahwa peningkatan pajak dan biaya hidup serta kesenjangan antara yang kaya dan miskin akan semakin lebar jika mereka tidak mempunyai cukup oposisi di dalam parlemen untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah.⁷⁰ Nampaknya pihak oposisi mampu memanfaatkan kesempatan untuk mencari dukungan rakyat yang sebesar-besarnya pada saat situasi yang kurang menguntungkan bagi pemerintah, di mana tekanan dan keluhan masyarakat mengenai kenaikan biaya hidup begitu keras ditujukan pada pemerintah.

Isu lokal lain yang mempengaruhi hasil pemilu tahun 1991 ini adalah isu mengenai Dewan Kota yang berkaitan erat dengan masalah kebebasan berpendapat bagi warga. Manajemen dari beberapa Dewan Kota yang kurang baik serta ucapan-ucapan atau tanggapan yang disampaikan oleh calon anggota parlemen menjadi hal yang sangat sensitif dan diperhitungkan oleh penduduk

⁶⁷ Istilah "*bread and butter*" yang bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah "mentega dan roti" sebenarnya mengandung makna kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini kebutuhan ekonomi yang dimaksud adalah semakin besarnya beban yang ditanggung masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang disebabkan oleh kenaikan biaya hidup yang meliputi; peningkatan pajak, biaya kesehatan dan biaya pendidikan. Dikutip dalam *Regional Outlook, Southeast Asia 1992-93*, ISEAS, 1993., hal. 27.

⁶⁸ Mutalib, *op.cit.*, hal. 302.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Mutalib, *op.cit.*, hal. 303.

lokal.⁷¹ Meskipun secara intensif tiap minggu mengadakan acara “Pertemuan dengan Rakyat”, sesungguhnya hal tersebut tidak memecahkan masalah mengenai apa yang rakyat butuhkan dan bahkan yang lebih parah lagi bahwa anggota parlemen dari *PAP* kurang bisa mendekati masyarakat.⁷² Akibatnya, berbagai keluhan dan keinginan masyarakat menjadi bertumpuk dan berharap dengan pilihannya kepada oposisi maka hal itu bisa terselesaikan.

Adanya dua isu lokal “*bread and butter*” serta isu mengenai Dewan Kota diatas nampaknya juga tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan yang terjadi yaitu, adanya perubahan kebudayaan politik terutama dari generasi muda yang berpendidikan. Perubahan kebudayaan politik rakyat Singapura dapat dilihat dari pergeseran budaya politik yang berkembang dalam masyarakat. Budaya politik Konfusius yang dianut oleh generasi tua yang mana di dalamnya berisi ajaran kepatuhan terhadap satu partai (monolit) pemerintah nampaknya lambat laun mulai mengalami pengikisan nilai-nilainya.⁷³ Hal ini seiring dengan munculnya generasi muda yang mempunyai orientasi baru yang berbeda yaitu keinginan yang menghendaki perlunya kehadiran partai-partai lain dalam ikut menjalankan roda pemerintahan.⁷⁴ Munculnya orientasi yang berbeda dari generasi muda tersebut nampaknya dipicu oleh dua hal yaitu; *pertama*, bahwa generasi baru ini lahir pada saat Singapura mencapai kemajuan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga mereka tidak merasakan bagaimana beratnya perjuangan politik yang telah dilakukan *PAP* dalam mengentaskan rakyat Singapura dari kelaparan, kemiskinan, keterbelakangan dan berbagai tantangan yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Jadi, nampaknya perasaan yang mendalam mengenai besarnya jasa *PAP* dan hutang budi rakyat kepada partai yang telah menyelamatkan kelangsungan hidup rakyat di masa lalu tersebut tidak begitu bisa dirasakan oleh generasi baru.

Kedua, terpenuhinya kebutuhan dasar dan tercapainya pertumbuhan serta kemajuan ekonomi masyarakat yang tinggi telah menyebabkan masyarakat mulai mengalami perubahan tuntutan hidup dari yang semula berkisar pada masalah

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Singh, *op.cit.*, hal. 104.

⁷³ Muttalib, *op.cit.* hal. 302.

⁷⁴ *Ibid.*

pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang ekonomi berkembang ke dalam bidang politik. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh globalisasi dunia, yang mana membawa dampak berupa pergeseran nilai-nilai yang dimiliki kaum muda Singapura. Pergeseran nilai-nilai tersebut nampak dari perbedaan orientasi antara kaum muda dan kaum tua, serta semakin beragamnya tuntutan yang diinginkan oleh generasi muda. Orientasi yang berbeda dari generasi muda tersebut menjadi penting secara politis karena berdasarkan data yang ada, jumlah generasi muda yang berpendidikan dan berusia di bawah 35 tahun pada pemilu tahun 1984 saja telah mencapai lebih dari 50% dari total jumlah pemilih.⁷⁵ Selanjutnya pada tahun 1989, jumlah dari pemilih yang berasal dari generasi muda tersebut telah mencapai 70% dari total jumlah pemilih.⁷⁶ Bertambahnya jumlah generasi muda yang mempunyai orientasi berbeda dengan pendahulunya dan merupakan pemilih baru dalam pemilu Singapura telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan perolehan suara dari partai oposisi.

Selain dari jumlahnya yang semakin besar, juga terdapat kecenderungan dari generasi muda di Singapura untuk berpikir secara lebih terbuka dan demokratis. Indikatornya terlihat dari munculnya keinginan-keinginan baru dari generasi muda yang merupakan akibat yang wajar dari proses industrialisasi dan modernisasi.⁷⁷ Generasi muda yang tumbuh dalam suasana kemajuan ekonomi nampaknya mempunyai pemikiran yang berbeda dibanding pendahulunya yang hanya patuh dan tunduk terhadap penguasa yang monolit, namun mulai memunculkan aspirasi baru berupa keinginan berpartisipasi politik secara lebih aktif dalam proses politik negara.⁷⁸ Walaupun kebutuhan dasar mereka sehari-hari mampu terpenuhi, namun munculnya ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah tidak bisa dicegah lagi karena *decision makers* masih mutlak berada di tangan pemerintah.⁷⁹ Mereka menginginkan hal lain yang lebih dari sekedar kebutuhan ekonomi yaitu terpenuhinya aspirasi politik mereka.⁸⁰ Dengan turut berperannya

⁷⁵ Rodan dalam Hewison (ed), *op.cit.*, hal. 86.

⁷⁶ Huat dalam Mahmood (ed), *op.cit.*, hal. 126.

⁷⁷ *Bisnis Indonesia*, 3 September 1991.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Kompas*, 5 September 1991.

⁸⁰ *Ibid.*

mereka dalam penentuan kebijakan publik, nampaknya mereka mengharapkan kepuasan tersendiri dari hal itu. Bagaimanapun upaya pemerintah untuk memberi kepuasan kepada rakyatnya, tetap saja masih ada pihak yang merasa kurang puas dari pelayanan pemerintah itu. Munculnya keinginan dan tuntutan terhadap kesempatan partisipasi politik yang lebih besar dari masyarakat dalam proses perpolitikan negara nampaknya mulai berkembang di Singapura setelah kebutuhan dasar di bidang ekonomi berhasil dipenuhi pemerintah.⁸¹

4.2.3 Kesalahan Strategi Partai Aksi Rakyat (*PAP*)

Ada persepsi umum bahwa strategi yang dijalankan *PAP* tidak efisien, sehingga hasil dari pelaksanaan strategi yang dijalankan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Strategi yang diterapkan oleh Goh Chok Tong adalah dengan melakukan pendekatan terhadap kelas menengah yang berpendidikan barat melalui berbagai mekanisme konsultatif.⁸² Hal ini terlihat dengan sering diadakannya diskusi-diskusi antara para tokoh-tokoh politik *PAP* dengan kalangan menengah yang berpendidikan Inggris, tanpa .⁸³ Perhatian Goh Chok Tong terhadap golongan tersebut terlihat sangat besar dan bahkan cenderung berlebihan. Contoh pengakomodasian yang berlebihan dari pemerintah terhadap golongan muda berpendidikan Inggris antara lain adalah berupa privatisasi yang ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan golongan kelas menengah ke atas seperti, sekolah gratis dan insentif untuk mendukung pernikahan pada usia yang cukup.⁸⁴ Kebijakan pemerintah tersebut telah menimbulkan rasa sakit hati golongan berpendidikan Cina yang lebih rendah pendapatannya, karena merasa diabaikan oleh pemerintah.⁸⁵ Secara politis, hal itu berdampak pada berkurangnya dukungan golongan berpendidikan Cina terhadap *PAP*. Sebenarnya, kebijakan untuk mengakomodasi kepentingan golongan berpendidikan Inggris di atas dilakukan oleh Goh , karena dia tidak ingin mengulangi kesalahan dalam dua

⁸¹ Muttalib, *op.cit.*, hal. 303.

⁸² Rodan, dalam Hewison (ed), *op.cit.*, hal. 96.

⁸³ Muttalib, *op.cit.*, hal. 305.

⁸⁴ Rodan dalam Hewison (ed), *op.cit.* hal. 98.

⁸⁵ *Ibid.*

pemilu sebelumnya di tahun 1984 dan 1988, dimana suara *PAP* yang lepas tersebut sebagian besar berasal dari golongan muda yang berpendidikan Barat.⁸⁵

Tuntutan kaum muda berpendidikan Barat⁸⁶ terhadap perubahan gaya pemerintahan dan partisipasi politik rakyat yang lebih besar merupakan hal yang jauh-jauh hari sudah diantisipasi oleh Goh Chok Tong.⁸⁷ Hal ini nampak dari perubahan gaya pemerintahan di Singapura dari gaya otoriter dan paternalistik yang dimiliki Lee Kuan Yew menjadi gaya yang terbuka dan partisipatif seperti yang dimiliki Goh Chok Tong. Namun, nampaknya wujud dari pelaksanaan gaya partisipatif tersebut lebih bermakna bagi kaum muda berpendidikan Barat yang dianggap oleh Goh Chok Tong lebih bisa diajak untuk memikirkan nasib bangsa di masa depan, dibanding dengan kaum muda yang berpendidikan Cina atau lokal.⁸⁸ Sebagai contoh, dalam pelaksanaan dialog-dialog ilmiah di mana

⁸⁵ *Ibid.* hal. 96.

⁸⁶ Kelas menengah berpendidikan Barat berbeda dengan kelas menengah berpendidikan Cina. Perbedaan ini dapat dilihat dari dua hal, *pertama*, tingkat pendapatan kelas menengah berpendidikan Barat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang berpendidikan Cina. Dikutip dalam *Far Eastern economic Review, Singapore: Politics / Social Affairs, Year Book, Singapore, 1992.*, hal. 186. Walaupun keduanya sama-sama disebut sebagai kelas menengah, namun dalam konteks yang lebih luas lagi golongan berpendidikan Barat tersebut bisa dimasukkan ke dalam golongan kelas menengah ke atas atau golongan elit. Secara lebih sederhana perbandingan ini bisa dilihat adanya kenyataan bahwa kaum muda berpendidikan Barat cenderung mempunyai pendapatan yang lebih tinggi karena mampu bersekolah ke luar negeri, sedangkan kaum muda berpendidikan Cina hanya bersekolah di sekolah lokal. Memang hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan utama, namun setidaknya bisa memberikan gambaran pada umumnya. *Kedua*, orientasi kalangan menengah berpendidikan Barat yang lebih mampu secara ekonomi tersebut nampaknya lebih tertuju pada keinginan terhadap perubahan gaya kepemimpinan ke arah yang lebih demokratis dan partisipasi aktif masyarakat yang lebih tinggi dalam proses politik. Keinginan ini muncul setelah mereka melihat perkembangan dari dunia barat yang sudah demokratis, sehingga ada suatu upaya untuk mengadopsi apa yang mereka ketahui dari tempat di mana mereka belajar ke dalam negara mereka sendiri yaitu Singapura. Golongan ini nampaknya tidak begitu mepedulikan masalah-masalah kenaikan biaya hidup karena tidak cukup berpengaruh bagi mereka, mengungat tingkat pendapatan mereka yang cukup tinggi. Dikutip dalam *Merdeka*, 9 September 1991. Sedangkan munculnya aspirasi golongan berpendidikan Cina terhadap peranan yang lebih besar bagi rakyat dalam proses pengambilan kebijakan publik lebih didasarkan pada ketidakpuasan mereka terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan golongan ini. Pada tahap awal pembangunan, golongan berpendidikan Cina yang ada di dalam kelas pekerja dan pedagang kecil, yang pada umumnya bergerak di retail dan sektor penjualan dalam skala besar merasa diuntungkan oleh perluasan lapangan kerja, tingkat pembelanjaan konsumen dan maraknya perumahan. Akan tetapi pada masa pembangunan ekonomi yang lebih sarat dengan kemajuan teknologi yang dimulai sejak tahun 1980-an, perbedaan siapa yang lebih diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi itu semakin jelas terlihat dalam tataran kelas. Dikutip dalam Garry Rodan dalam Kevin Hewison (ed), *op.cit.*, hal. 97.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Muttalib, *op.cit.*, hal. 302.

pesertanya terkesan lebih eksklusif karena terdiri dari kelas menengah ke atas yang berpendidikan luar negeri.⁸⁹

Walaupun dukungan terhadap partai oposisi sebagian juga berasal dari kelas menengah berpendidikan Barat yang menginginkan perlunya kehadiran oposisi di parlemen, namun suara dari kaum muda yang berpendidikan Cina juga tidak bisa diabaikan dalam mempengaruhi berkurangnya persentase suara *PAP*. Strategi Goh dengan lebih memperhatikan kaum muda berpendidikan Barat nampaknya kurang mendapatkan hasil yang maksimal karena Goh kurang memperhitungkan suara dari segmen masyarakat yang berpendidikan Cina.⁹⁰ Padahal jumlah dari kaum muda yang berpendidikan Cina tersebut juga cukup besar, sehingga hilangnya dukungan suara dari kaum muda terdidik Cina terhadap *PAP* sangat berpengaruh bagi perolehan persentase suara *PAP* secara keseluruhan.

Sebagian besar pendukung oposisi yang berasal dari generasi muda berpendidikan Cina yang banyak terdapat dalam kelas pekerja, selain menyuarakan perlunya peningkatan partisipasi politik juga menuntut perlunya pemerintah meninjau kembali kebijakan mengenai kenaikan pajak dan biaya hidup.⁹¹ Dengan kata lain, terdapat suara anti *PAP* yang cukup besar dari generasi muda terdidik Cina yang banyak terdapat dalam kelas pekerja. Padahal kelas pekerja tersebut sudah lama dianggap sebagai pendukung tradisional *PAP*.⁹² Kegagalan *PAP* dalam mengantisipasi perubahan⁹³ yang terjadi berupa keinginan terhadap peningkatan aspirasi politik rakyat serta pemenuhan kebutuhan hidup dari golongan kelas pekerja terlihat dengan ketidakmampuan *PAP* mencegah peningkatan dukungan mereka kepada partai oposisi.⁹⁴

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*, hal. 98.

⁹² Chan Heng Chee, *The Dynamics of One Party Dominance The PAP at The Grass-Roots*, Singapore University Press, Singapore, 1978., hal. 21.

⁹³ Perubahan yang dimaksud di atas yaitu apabila selama dua pemilu sebelumnya (1984 dan 1988) suara yang mendukung oposisi lebih banyak berasal dari kelas menengah berpendidikan Barat yang menyuarakan pentingnya perubahan gaya pemerintahan dan partisipasi masyarakat yang lebih besar, nampaknya pada pemilu tahun 1991 pendukung oposisi tersebut tidak hanya berasal dari golongan ini, melainkan juga berasal dari golongan menengah yang berpendidikan Cina.

⁹⁴ *Ibid.*

Ketidakpuasan rakyat di wilayah-wilayah yang rata-rata masyarakatnya secara sosio-ekonomi masih berpendapatan rendah disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah di wilayah-wilayah tersebut.⁹⁵ Salah satu faktornya adalah ketidaktanggapan pemerintah terhadap keluhan masyarakat mengenai kenaikan biaya hidup yang meliputi, peningkatan pajak, kenaikan harga beberapa jasa pelayanan seperti kesehatan, transportasi, perumahan dan pendidikan.⁹⁶ Selain itu, juga terdapat masalah-masalah sosial yang cukup krusial. Privatisasi dalam bidang pendidikan seperti sekolah gratis dan insentif untuk mendukung pernikahan pada usia dini yang lebih ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan golongan-golongan yang lebih kaya dikhawatirkan membuat jurang perbedaan antara kaya dan miskin semakin lebar.⁹⁷ Kedua isu di atas sedikit banyak juga turut mempengaruhi citra yang kurang baik terhadap *PAP* di kalangan kelas menengah ke bawah.

4.2.4 Faktor yang Menguntungkan Partai Aksi Rakyat (*PAP*)

Disamping faktor kebijakan *PAP* yang mengakibatkan penurunan suara bagi *PAP* seperti disebutkan di atas, terdapat faktor-faktor lain yang menguntungkan *PAP*, sehingga menyebabkan *PAP* masih mampu meraih total kursi di atas 90% dan persentase suara lebih dari 60% yang pada akhirnya membawa kemenangan bagi *PAP* dalam pemilu tahun 1991 ini.⁹⁸ Faktor-faktor tersebut antara lain adanya kenyataan bahwa pemilu kali ini diadakan pada saat yang tepat. Saat yang tepat di sini dimaksudkan bahwa pemilu kali ini dilaksanakan pada saat di mana banyak faktor yang dianggap akan memberikan nilai lebih bagi *PAP*. Beberapa faktor yang memberikan keuntungan bagi *PAP* antara lain perkembangan ekonomi Singapura yang menggembirakan dengan pertumbuhan sebesar 8,3% per tahun, bonus tiga bulan gaji sejak juli tahun 1991 bagi para pekerja,⁹⁹ dan pengaruh kondisi eksternal dengan memburuknya ekonomi dunia yang dipicu oleh pergolakan politik di Eropa, terutama pasca

⁹⁵ Singh, *op.cit.*, hal. 105.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Rodan dalam Hewison (ed), *op.cit.*, hal. 98.

⁹⁸ Singh, *op.cit.*, hal. 85.

⁹⁹ *Kompas*, 31 Agustus 1991.

keruntuhan Uni Sovyet dan Perang Teluk.¹⁰⁰ Dampak secara politis dari keruntuhan Uni Sovyet bagi rakyat Singapura yaitu rakyat Singapura bisa melihat bahwa adanya pergantian kekuasaan di suatu negara bisa berpotensi mengakibatkan keruntuhan negara tersebut.¹⁰¹ Apabila hal ini dikaitkan dengan situasi di Singapura, nampaknya bisa dikatakan bahwa kekhawatiran rakyat akan semakin tinggi apabila dalam pemilu tahun 1991 ini *PAP* mengalami kekalahan. Dengan berkaca pada kondisi Uni Sovyet, nampaknya keinginan rakyat untuk tetap mempertahankan *PAP* sebagai partai penguasa semakin besar dan hal ini akan menguntungkan *PAP* secara politis.

Selain dampak secara politis, memburuknya perekonomian dunia yang dipicu oleh pergolakan politik di Eropa tersebut juga telah mempengaruhi ekonomi Singapura secara umum, yang mana sangat tergantung dari kestabilan situasi politik dan ekonomi dunia. Adanya ketergantungan yang cukup besar tersebut disebabkan perekonomian Singapura lebih didasarkan pada bidang perdagangan dan jasa yang tingkat pertumbuhannya sangat ditentukan oleh situasi politik dan ekonomi dunia. Tingginya tingkat perdagangan dan jasa di Singapura terlihat dari besarnya tingkat ekspor dan impor Singapura. Seperti terlihat pada tahun 1990 tingkat ekspor Singapura adalah sebesar US \$ 52.82 miliar, sedangkan tingkat impornya sebesar US \$ 60.9 miliar.¹⁰² Impor utama Singapura terdiri dari barang-barang mesin dan transportasi (44.7%), manufaktur (22.4%) dan mineral (15.8%), sedangkan ekspor utama terdiri dari barang-barang mesin dan transportasi (50.1%), kebutuhan material (18.2%) dan manufaktur (15.9%).¹⁰³ Tingkat ketergantungan ekonomi yang begitu tinggi dari Singapura terhadap kondisi perekonomian dunia terlihat, misalnya, ketika perekonomian Amerika Serikat sebagai partner dagang terbesar Singapura pada tahun 1990 sedang mengalami penurunan, perekonomian Singapura juga ikut menurun.¹⁰⁴ Memburuknya perekonomian dunia pada pertengahan tahun 1991 tersebut juga

¹⁰⁰ Singh, *op.cit.*, hal. 33.

¹⁰¹ *Kompas*, 22 Agustus 1991.

¹⁰² Rodan dalam Kevin Hewison (ed), *op.cit.* hal. 76.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Far Eastern Economic Review* 1992, *op.cit.*, hal. 188.

berimbas pada penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi di Singapura, dari 11% di tahun 1988 menjadi 8,3% di tahun 1990 dan di awal tahun 1991.¹⁰⁵ Penurunan tersebut diperkirakan masih akan tetap terus terjadi pada akhir tahun 1991, yang mana tingkat pertumbuhan ekonomi Singapura diperkirakan hanya sekitar 6,5% saja.¹⁰⁶ Walaupun mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi sebesar 8,3% masih merupakan angka pertumbuhan yang cukup tinggi karena rata-rata pertumbuhan ekonomi Singapura adalah sebesar 8% per tahun.¹⁰⁷ Nampaknya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih cukup tinggi tersebut mampu menghasilkan rasa puas masyarakat yang juga berakibat masih tetap tingginya legitimasi politik pemerintah.

Faktor lain yang menyebabkan perolehan suara *PAP* tetap tinggi adalah gaya kepemimpinan Goh yang partisipatif, konsultatif dan terbuka serta telah disusunnya rencana program-program pembangunan jangka panjang untuk 25 tahun ke depan.¹⁰⁸ Walaupun gaya kepemimpinan Goh tersebut juga berakibat negatif bagi Goh Chok Tong¹⁰⁹, namun nampaknya gaya yang berbeda tersebut disukai oleh banyak kalangan terutama generasi muda yang memang menghendaki adanya perubahan gaya kepemimpinan dari gaya yang kaku, keras dan paternalistik seperti yang dimiliki pendahulu Goh, Lee Kuan Yew. Adanya program-program yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang Singapura seperti, *Edusave* dan *Medifund* nampaknya juga memberikan harapan tersendiri bagi rakyat Singapura menyangkut peningkatan kesejahteraan bagi mereka.

¹⁰⁵ Far Eastern Economic Review 1991, *op.cit.*, hal. 207.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Singh, *loc.cit.*

¹⁰⁹ Selain berdampak positif, gaya kepemimpinan yang terbuka dan partisipatif dari Goh Chok Tong juga berakibat negatif bagi dirinya dan partainya. Gaya ini telah memunculkan suatu kebebasan memilih serta keberanian untuk mengkritik dan berbeda pendapat dengan pemerintah tanpa perlu khawatir akan ditangkap tanpa melalui lembaga peradilan, sepanjang tidak menyentuh kepada hal-hal yang berhubungan dengan isu rasial. Hal ini nampaknya juga menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya keberanian rakyat untuk memilih partai selain *PAP*. Adanya kebebasan mengkritik dan berbeda pendapat dengan pemerintah di masa Goh Chok Tong merupakan fenomena baru yang belum pernah terjadi pada masa Lee Kuan Yew. Dikutip dalam *Suara Karya*, 31 Agustus 1991. Hal tersebut nampaknya juga berdampak pada keberanian pemilih untuk memberikan pilihan selain *PAP*.

Selain dua faktor di atas, faktor lain yang juga yang sangat berperan dalam menunjang keberhasilan *PAP* mempertahankan kemenangannya dalam pemilu tahun 1991 ini adalah *track record* yang bagus dari *PAP*.¹¹⁰ Kekuasaan *PAP* di Singapura sejak tahun 1959 telah meninggalkan bukti mengenai apa yang dapat dikerjakan sebuah partai untuk Singapura dan rakyat Singapura. Kemajuan Singapura yang berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, terciptanya stabilitas politik, ekonomi serta keamanan, dan pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa adalah hal utama yang bisa memberikan catatan tersendiri bagi keberhasilan *PAP* dalam memerintah Singapura. Pandangan *PAP* kedepan serta diterimanya ideologi yang diterapkannya, serta *track record* nya sulit untuk dikalahkan oleh partai oposisi yang lain. Hampir semua rakyat Singapura mengakui keberadaan dan keberhasilan *PAP* memimpin Singapura selama sekitar tiga dekade dan pandangan secara umum nampaknya juga masih menghendaki *PAP* tetap memerintah Singapura.¹¹¹ Indikator pandangan umum rakyat ini terlihat dalam suatu survey pemerintah pada awal bulan Agustus 1991, dimana 70% lebih rakyat khususnya kaum muda merasa puas atas pemerintahan Singapura di bawah *PAP*.¹¹²

Faktor terakhir yang menguntungkan *PAP* adalah dimilikinya kandidat-kandidat yang kredibel.¹¹³ Secara keseluruhan, sukses *PAP* pada pemilihan suara berdasarkan fakta bahwa *PAP* mempunyai kandidat yang jauh lebih kredibel daripada oposisi. Sementara hampir dari mereka semua adalah teknokrat, kemampuan *PAP* untuk menarik individu yang berpendidikan, berbakat dan ahli ke dalam partai telah menjadi alasan utama untuk kesuksesannya sejak tahun 1959.¹¹⁴

Walaupun mempunyai beberapa faktor yang menguntungkan seperti disebutkan di atas, namun hasil yang diperoleh dalam pemilu tahun 1991 ini tetap

¹¹⁰ Singh, *loc.cit.*

¹¹¹ *Suara Pembaruan*, 11 September 1991.

¹¹² *Bisnis Indonesia*, 31 Agustus 1991.

¹¹³ Singh, *loc.cit.* Indikator kredibel bisa dijelaskan sebagai kemampuan dan pengalaman politik yang cukup baik, tingkat pengetahuan dan pendidikan yang tinggi serta adanya prestasi yang baik dalam bidang akademis dan non-akademis.

¹¹⁴ *Ibid.*

menunjukkan hasil yang terburuk bagi *PAP* sejak kemerdekaan Singapura. Hal ini disebabkan oleh turunnya perolehan suara *PAP* menjadi yang terendah sejak pemilu tahun 1968. Selain itu, lepasnya 4 kursi ke tangan partai oposisi merupakan kehilangan kursi yang terbesar selama 22 tahun terakhir.¹¹⁵ Dibandingkan dengan pada saat *PAP* pertama kali memiliki kekuasaan pada tahun 1959, banyak hal yang telah berubah seiring dengan waktu. Di masa awal pemerintahan sendiri yaitu pada tahun 1959 rakyat dihadapkan dua pilihan untuk perjuangan demi mempertahankan hidup, yaitu memilih antara *PAP* yang non-Komunis atau pro-Komunis. Banyak rakyat yang memberikan suaranya bagi *PAP* yang non-Komunis karena dianggap lebih bisa memberikan jaminan kelangsungan hidup dibandingkan dengan faksi pro-Komunis.¹¹⁶ Tetapi pada saat ini, dengan menurunnya tantangan dan ancaman dari Komunis dengan tidak adanya lagi partai Komunis yang tetap eksis di Singapura, mereka tidak lagi dihadapkan pada pilihan antara kondisi hidup dan mati, sehingga apabila mereka tidak memilih *PAP* sekalipun mereka masih tetap dapat bertahan hidup. Ukuran masa lalu menjadi tidak relevan lagi untuk digunakan pada saat ini. Perbedaan kondisi yang ada pada masa lalu dan saat ini telah melahirkan suatu pemikiran baru, seperti perbedaan harapan para pemilih dimana faktor pemenuhan kebutuhan dasar bukan menjadi faktor yang pokok lagi.¹¹⁷

4.2.5 Perluasan Kelas Menengah dari Generasi Muda di Singapura

Tanpa mengesampingkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, nampaknya perluasan aspirasi rakyat merupakan faktor yang paling menentukan dan lebih bersifat menyeluruh dalam mempengaruhi hasil-hasil pemilu tahun 1991. Keinginan dari rakyat Singapura secara umum yang menghendaki kehadiran oposisi di Parlemen sebenarnya bukan hal yang baru. Perkembangan tersebut menjadi semacam suatu kesadaran umum seperti yang terjadi sejak pemilu 1984 dimana *PAP* mengalami penurunan suara sebesar 12,5% dan

¹¹⁵ *Suara Pembaruan*, 2 September 1991.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Singh, *op.cit.*, hal. 96.

kehilangan dua kursinya dalam parlemen.¹¹⁸ Sejak saat itu, perlahan-lahan terjadi peningkatan keinginan secara lebih luas bagi rakyat Singapura, khususnya dari generasi muda yang berpendidikan dan hal ini merupakan dampak perkembangan yang global bagi terwujudnya pemerintahan yang lebih demokratis.¹¹⁹ Chua Beng Huat, seorang pengamat politik yang juga menjadi Guru Besar di Universitas Nasional Singapura mengatakan bahwa kedewasaan berpikir secara bertahap telah terjadi di sebagian besar rakyat Singapura.¹²⁰ Hal ini menunjukkan keinginan yang lebih tinggi dari generasi muda untuk turut serta menentukan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas. Perkembangan yang terjadi di Singapura tersebut diistilahkan oleh Chua Beng Huat sebagai suatu “Kebudayaan Demokrasi”,¹²¹ yaitu keinginan terhadap suatu pemerintahan yang berdasar pada kehendak rakyat secara umum dan ditujukan bagi kepentingan yang tulus untuk peningkatan kebutuhan rakyat, nampaknya sedang terjadi di Singapura.

Peningkatan partisipasi politik masyarakat di Singapura berkaitan erat dengan perluasan kelas menengah yang terjadi di Singapura. Seperti dikatakan oleh O'Donnell, Schmitter dan Whitehead (1986)¹²² bahwa hubungan antara pembangunan ekonomi dan sistem politik telah menghasilkan suatu perhatian khusus berupa dampak politik yang disebut sebagai pembangunan masyarakat kelas menengah. Dalam perkembangannya, kelas menengah nampaknya telah mempengaruhi, bahkan ikut menentukan penurunan sistem otoritarian, khususnya di negara-negara Industri Baru di Asia Timur (NIC's) seperti, Korea Selatan dan Taiwan.¹²³

¹¹⁸ Hiock, *op.cit.*, hal. 302.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Muttalib, *op.cit.*, hal. 303

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Rodan dalam Rodan (ed), *op.cit.*, hal. 52

¹²³ *Ibid.*

Hal tersebut nampaknya juga berlaku bagi Singapura dan itu disadari benar oleh pemerintah, seperti dikatakan oleh Lee Kuan Yew bahwa generasi muda saat ini terlalu pandai sehingga tahu bagaimana menggunakan suara mereka.¹²⁴ Suara tersebut disalurkan dalam pelaksanaan pemilu, di mana bisa dilihat seberapa besar keinginan mereka untuk berperan serta dalam proses perpolitikan negara. Dari hasil pemilu tahun 1984 terlihat bahwa kemajuan ekonomi Singapura yang berakibat pada semakin banyaknya kelas menengah di Singapura,¹²⁵ juga berimbas pada semakin banyaknya keinginan mereka diantaranya mengenai perubahan gaya pemerintahan. Keluhan masyarakat mengenai sifat otoriter pemerintah sebenarnya telah dicoba untuk dikurangi oleh pemerintah setelah pemilu tahun 1984 tersebut, dengan dibangunnya unit-unit *feedback* untuk rakyat.¹²⁶ Pembangunan unit-unit tersebut dimaksudkan untuk menampung berbagai keluhan dan aspirasi rakyat seperti *Citizen Consultative Committee (CCC)*, *Residence Committee (RC)*, *Management Committee (MC)* dan *Select Committee (SC)*.¹²⁷ Namun dengan adanya kelas menengah yang semakin meluas, nampaknya keinginan dan keluhan yang mereka sampaikan juga makin beragam dan hal ini berakibat pada semakin banyaknya tuntutan yang belum bisa terakomodasi.

¹²⁴ Fee, *op.cit.*, hal. 281.

¹²⁵ Menurut Chan Heng Chen, masyarakat Singapura adalah merupakan "Masyarakat Kelas Menengah". Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa lebih dari separo penduduk Singapura bekerja dan pendapatan dari pekerjaan itu rata-rata telah mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tiga dari empat golongan muda Singapura dapat digolongkan sebagai kelasmenengah dengan kepemilikan pribadi yang mampu mereka hasilkan sendiri meliputi, pendapatan, perumahan, pendidikan dan gaya hidup. Dikutip dalam Garry Rodan dalam Rodan, *loc.cit.*

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Sinar Harapan*, 12 Januari 1981.

Tabel 4.
Pekerjaan berdasarkan jabatan menurut sensus tahun 1957, 1970 dan 1980 di Singapura

Occupation	Number (persons/%)			Intercensal Change (%)	
	1957	1970	1980	1957-70	1970-80
Total	471 918	650 892	1 077 090	37.9	65.5
Professional and technical	24 485 (5.2)	56 080 (8.6)	95 145 (8.8)	129.0	69.7
Administrative and managerial	8 560 (1.8)	15 476 (2.4)	52 175 (4.8)	80.8	237.1
Clerical	53 591 (11.4)	82 941 (12.7)	167 473 (15.5)	54.8	101.9
Sales	86 320 (19.0)	102 628 (15.8)	131 977 (12.3)	18.9	28.6
Services	71 135 (15.1)	88 744 (13.6)	112 196 (10.4)	24.8	26.4
Agricultural workers and fishermen	37 113 (7.9)	26 943 (4.1)	20 954 (1.9)	-27.4	-22.2
Production and related workers	181 545 (38.5)	254 949 (39.2)	434 996 (40.4)	40.4	70.6
Not classifiable	9 169 (1.9)	23 131 (3.6)	62 174 (5.8)	152.3	168.8

Sumber: Department of Statistic, dikutip dalam Garry Rodan, "The Growth of Singapore's Middle Class and Its Political Significance, dalam Garry Rodan (ed), *Singapore Changes Guards: Social, Political and Economic Directions in The 1990s*, Melbourne: Longman Cheshire, 1993., hal. 55.

Dari Tabel di atas, beberapa jenis pekerjaan tertentu bisa dikelompokkan ke dalam beberapa golongan. Kelompok pekerjaan seperti, profesional, teknisi, tenaga administratif dan manajer dimasukkan ke dalam golongan kelas menengah ke atas atau golongan elit yang berpendapatan tinggi. Peningkatan jumlah pekerja dalam bidang ini cukup besar, seperti kelompok profesional dan teknisi yang mana dalam tenggang waktu antara tahun 1957-1970 meningkat 129% dan antara tahun 1970-1980 mengalami peningkatan lagi sebesar 69,7%. Demikian juga kenaikan yang cukup tajam juga terjadi pada kelompok tenaga administratif dan manajer. Sementara itu, kelompok pekerjaan seperti bidang pemasaran dan jasa bisa

digolongkan ke dalam golongan kelas menengah yang juga mempunyai pendapatan yang cukup tinggi.

Secara umum, jenis pekerjaan terbesar yang terdapat di Singapura adalah pekerjaan dalam bidang produksi, seperti karyawan dan pekerja pabrik atau perusahaan. Penduduk yang bekerja dalam bidang ini mencapai angka sekitar 40% dari total pekerja yang ada di Singapura. Mereka mempunyai pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan golongan manajer, profesional atau teknisis di atas. Namun, bila dihitung dari tingkat pendapatan, gaya hidup dan tingkat kesejahteraan dari kelas pekerja tersebut, nampaknya sebagian besar pekerja yang terdapat dalam kelas ini bisa digolongkan dalam kategori kelas menengah. Hal ini ditunjukkan dalam perkembangan pendapatan penduduk berdasarkan data dari *Ministry of Labour* pada periode 1973 – 1978 yang mana menunjukkan persentase sebagai berikut; 20% penduduk masih berpendapatan rendah yaitu di bawah S \$ 800 per bulan, 60% digolongkan menengah dengan pendapatan antara S \$ 800 S \$ 2.000 dan 20% dikatakan sebagai golongan orang-orang kaya dengan pendapatan S \$ 2.000 atau lebih.¹²⁸ Dengan peningkatan pendapatan tersebut, nampaknya telah terjadi perluasan kelas menengah dari generasi muda di Singapura. Generasi muda yang lebih berpendidikan muncul seiring dengan penambahan penduduk yang ada di Singapura. Kaum muda tersebut kemudian bekerja pada bidang-bidang yang menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pekerja yang bergerak dalam bidang-bidang manajerial, teknisi dan profesional. Walaupun sebagian dari kaum muda tersebut juga bekerja dalam bidang produksi, namun dari segi pendapatan, nampaknya hasil yang mereka dapatkan lebih tinggi dibandingkan dengan pendahulunya.

Meningkatnya pendapatan masyarakat juga berarti meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya, termasuk diantaranya adalah bidang pendidikan. Dari sebuah survey yang dilakukan pada tahun 1981 Singapura dengan adanya sistem sekolah terpadu dari pemerintah, Singapura memiliki 550 sekolah dari Taman kanak-kanak sampai dengan

¹²⁸ Rodan dalam Rodan (ed), *op.cit.*, hal. 62.

Perguruan Tinggi.¹²⁹ Dari jumlah tersebut terdapat 506.629 murid dan 23.862 guru.¹³⁰ Dalam tahun 1982 jumlah pelajar yang tercatat di berbagai lembaga pendidikan meningkat menjadi 517.673 siswa atau hampir seperlima jumlah penduduk (separo diantaranya berusia di bawah 21 tahun).¹³¹ Seiring dengan perkembangan kemajuan ekonomi yang diraih, jumlah generasi muda yang melanjutkan pendidikannya sampai ke Perguruan Tinggi terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah pemilih baru yang berpendidikan tinggi baik yang berpendidikan Barat maupun yang berpendidikan Cina (sekolah lokal).¹³² Pada pemilu tahun 1984 terdapat 250.000 pemilih baru yang terdiri dari para generasi muda yang membawa pemikiran baru mengenai nasib bangsa Singapura.¹³³ Selanjutnya, 400.000 pemilih baru kembali muncul sejak pemilu tahun 1988 sampai tahun 1991.¹³⁴ Secara persentase, pada pemilu tahun 1984 jumlah pemilih yang berumur antara 20 tahun sampai dengan 40 tahun adalah sebesar 60%.¹³⁵ Jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 70% pada survey tahun 1989.¹³⁶ Jadi bisa dikatakan bahwa separo lebih massa pemilih berasal dari kaum muda. Dari generasi muda inilah nampaknya mulai timbul pemikiran baru yang berbeda dibanding dengan pendahulunya mengenai cara pandang terhadap proses perpolitikan di Singapura.¹³⁷ Hal ini antara lain berkaitan dengan lingkungan sosial yang berbeda, yang mana generasi muda tersebut tidak pernah mengalami sejarah masa lalu yang pahit, yaitu pada saat kemiskinan dan keterbelakangan masih dialami oleh bangsa Singapura.¹³⁸ Mereka tidak pernah merasakan bagaimana bangsa ini perlahan-lahan bisa keluar dari kondisi kemiskinan dan mulai bergerak menjadi negara paling maju di Asia Tenggara.¹³⁹ Terpenuhinya kebutuhan ekonomi berpengaruh pada kebutuhan pada

¹²⁹ S. Gopinathan, "Education", dikutip dalam Skripsi Vici Henry Lihardo, *op.cit.*, hal. 77.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Fee, *op.cit.*, hal. 281.

¹³³ *Kompas*, 22 Desember 1984.

¹³⁴ *Suara Karya*, 16 Agustus 1991.

¹³⁵ Huat dalam Mahmood (ed), *op.cit.*, hal. 126.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Singh, *op.cit.*, hal. 96.

¹³⁹ *Ibid.*

bidang lain, yaitu bidang politik yang selama ini dirasakan masih menekan kebebasan seluruh rakyat. Jadi, perluasan kelas menengah yang terdapat di Singapura nampaknya berpengaruh cukup besar terhadap peningkatan dukungan rakyat terhadap partai oposisi.

4.3 Arti Hasil Pemilu bagi Oposisi

4.3.1 Penambahan Kursi Partai Oposisi di Parlemen

Ketika pertama kalinya PM Goh Chok Tong mengumumkan akan menyelenggarakan pemilu tanggal 31 Agustus 1991, lebih cepat 2 tahun dari rencana sebelumnya, pihak oposisi bereaksi keras memprotes keputusan tersebut.¹⁴⁰ Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pemilu yang mendadak dan masa kampanye yang singkat membuat partai-partai oposisi tidak bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin.¹⁴¹ Mereka menganggap pemerintahan *PAP* dan PM Go Chok Tong sengaja melakukan langkah tersebut sebagai upaya penggembosan terhadap partai-partai oposisi yang tidak mempunyai cukup sumber daya manusia yang tangguh dan sumber dana yang besar bagi kegiatan partai.¹⁴²

Namun, setelah dilakukan perhitungan suara pemilu ternyata menunjukkan hasil yang cukup mengejutkan. Untuk pertama kalinya partai-partai oposisi mampu meraih jumlah kursi dan persentase suara yang paling banyak sejak pemilu tahun 1968.¹⁴³ Empat wilayah pemilihan tunggal (*SMC*) berhasil dimenangkan oleh partai-partai oposisi, tiga berasal dari *SDP* dan satu berasal dari *WP*. Selain itu, hasil persentase suara yang sah menunjukkan peningkatan dukungan yang lebih luas bagi pihak partai oposisi di 12 konsituensi.¹⁴⁴ Secara umum partai oposisi mampu meningkatkan persentase suaranya sebesar 2,2% dari 36,8% di tahun 1988 menjadi 39% di tahun 1991.¹⁴⁵

¹⁴⁰ *Bisnis Indonesia*, 31 Agustus 1991.

¹⁴¹ *Ibid.*, 16 Agustus 1991.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Kompas*, 2 September 1991.

¹⁴⁴ Rodan dalam Rodan (ed), *op.cit.*, hal. 60.

¹⁴⁵ *Ibid.*

Konstituensi yang dimenangkan partai-partai oposisi terdiri dari 4 *SMC* yaitu di wilayah Bukit Gombak, Hougang, Nee Soon Central dan Potong Pasir.¹⁴⁶ Di *SMC* Bukit Gombak, calon oposisi yang berasal dari Partai Demokrasi Singapura (*SDP*) diwakili oleh *Ling How Doong*¹⁴⁷. Di konstituensi ini, *Ling How Doong* mampu mengalahkan calon *PAP* yang juga menjadi pejabat menteri pembangunan masyarakat, *Dr Seet Ai Mee* dengan perolehan sebesar 12.037 suara.¹⁴⁸ Sementara, *Dr Seet Ai Mee* hanya mampu memperoleh 11.383 suara.¹⁴⁹ Calon *SDP* lainnya, *Cheo Chai Chen* yang menjadi wakil oposisi di wilayah Nee Soon Central berhasil menang tipis sebesar 50, 3% atau 168 suara di atas calon *PAP*, *Ng Pock Too*.¹⁵⁰ Kemenangan yang cukup meyakinkan diraih oleh sekjen *SDP*, *Chiam See Tong* yang mewakili wilayah Potong Pasir. *Chiam See Tong* berhasil menduduki kursi parlemen untuk ketiga kalinya sejak tahun 1984, 1988 dan tahun 1991 ini.¹⁵¹ Dia memperoleh 69,6% suara yang berarti meningkat sebesar 6,5% dari pemilu sebelumnya.¹⁵² Jumlah suara yang diraih *Chiam* adalah sebesar 12.582, sedangkan lawannya, *Andy Gan*, hanya mendapatkan 7.096 suara.¹⁵³ Kursi keempat yang diraih oposisi dihasilkan oleh calon *WP*, *Low Thia Kiang*, di wilayah Hougang dengan mendapat dukungan dari 10.621 pemilih atau 52,8% suara.¹⁵⁴ Walaupun dari empat wilayah yang dimenangkan partai oposisi, tiga diantaranya hanya berhasil menang tipis, namun hal itu sudah cukup bagi syarat diraihnya kursi di wilayah tersebut.

Di beberapa konstituensi lainnya, partai-partai oposisi juga mampu memberikan perlawanan yang terbaik sehingga kemenangan yang diraih oleh *PAP* tidak bisa mutlak. Konstituensi tersebut adalah; *SMC* Bukit Batok yang diwakili *Kwan Yue Keng (SDP)* meraih 48,2%; *SMC* Braddel Heights dengan calon *Sin Kek Tong (SDP)* mendapatkan 47,7%; *GRC* Eunos yang diwakili empat calon

¹⁴⁶ Singh, *op.cit.*, hal. 86.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Suara Pembaruan*, 1 September 1991.

¹⁵¹ *Kompas*, 2 September 1991.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Singh, *op.cit.*, hal. 86.

dari *WP* yaitu, Jufrie Mahmood, Lee Siew Choh, Wee Han Kim dan Neo Choon Aik mampu memperoleh 47,6% suara; *SMC* Nee Soon South dengan wakil Low Yong Nguan (*SDP*) meraih 47,2%; *SMC* Changi yang diwakili Tan Bin Seng (*WP*) mendapatkan 47,0%; dan yang terakhir *SMC* Yu-Hua dengan calon Toh Kim Kiat (*SDP*) yang meraih 43,8% suara.¹⁵⁵ Di beberapa konstituensi di atas, partai oposisi memberikan perlawanan yang lebih baik dari pemilu sebelumnya, sehingga walaupun mengalami kekalahan namun jumlahnya tidak begitu besar. Nampaknya, faktor legitimasi rakyat terhadap *PAP* yang masih tinggi di wilayah tersebut dan kredibilitas kandidat *PAP*, yang mampu merespon keinginan massa, lebih unggul dibandingkan dengan faktor-faktor yang menguntungkan partai oposisi.¹⁵⁶ Faktor-faktor lain tersebut diantaranya berupa; strategi yang diterapkan partai oposisi, perluasan kelas menengah dan berbagai isu diangkat oleh calon-calon oposisi di konstituensi tersebut.¹⁵⁷

Walaupun lebih banyak mengalami kekalahan, namun secara keseluruhan partai-partai oposisi berhasil meningkatkan suaranya di 12 konstituensi, khususnya untuk wilayah-wilayah pemilihan tunggal. Konstituensi tersebut adalah; Ulu Pandan sebesar 12,7%; Nee Soon South 12,1%; Hougang 11,8%; Jurong 10,9%; Nee Soon Central 7,9%; Bukit Merah 7,9%; Yu-Hua 6,8%; Potong Pasir 6,5%; Braddel Heights 6,5%; changi 6,4%; Bukit Gombak 4,9%; dan Bukit Batok 4,1%.¹⁵⁸ Di konstituensi-konstituensi di atas suara-suara yang mendukung partai oposisi mulai menunjukkan peningkatan yang bervariasi mulai dari yang terendah 4,1% di wilayah Bukit Batok sampai dengan yang tertinggi 12,7% di Ulu Pandan.¹⁵⁹ Namun di sisi lain, tidak seluruh peningkatan tersebut mampu memberikan kemenangan bagi partai oposisi di konstituensi tersebut. Hal ini dikarenakan hal-hal yang menguntungkan *PAP* seperti faktor legitimasi politik dari rakyat terhadap pemerintahan *PAP* masih lebih besar pengaruhnya dibanding

¹⁵⁵ Rodan dalam Rodan (ed), *op.cit.*, hal. 61.

¹⁵⁶ Singh, *op.cit.*, hal. 88.

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Rodan dalam Rodan (ed), *op.cit.*, hal. 62.

¹⁵⁹ *Ibid.*

dengan pengaruh isu-isu kampanye yang diangkat partai oposisi terhadap masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.¹⁶⁰

Apa yang terjadi pada Pemilu tahun 1991 juga menunjukkan usaha yang lebih serius dan pengorganisasian partai oposisi yang lebih baik, terutama *SDP* dan *WP*. Hal tersebut dimulai dari kesuksesan oposisi menempatkan kandidat yang lebih kredibel.¹⁶¹ Ini terlihat di beberapa konstituensi yang dimenangkan oleh partai oposisi yaitu; *SMC* Bukit Gombak, *SMC* Nee Soon Central, *SMC* Hougang dan *SMC* Potong Pasir. Di *SMC* Bukit Gombak, calon *PAP*, Dr. Seet Ai Mee harus mengakui keunggulan calon oposisi dari *SDP*, Ling How Doong. Sebab-sebab kekalahan Dr. Seet Ai Mee di wilayah ini diantaranya disebabkan oleh anggapan bahwa dia kurang bisa berhubungan dengan masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah kebawah.¹⁶² Selain itu, meningkatnya biaya pendidikan, transportasi, dan kesehatan juga menjadi sebab ketidakmampuan calon *PAP* meraih kemenangan di wilayah ini.¹⁶³ Para pemilih nampaknya merasa bahwa aspirasi mereka kurang diperhatikan pemerintah, sehingga mereka lebih mendukung calon oposisi yang dianggap mampu menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Di *SMC* Hougang, calon *PAP*, Tang Guang Seng, juga harus mengalami nasib serupa seperti dialami oleh Dr. Seet Ai Mee. Tang dikalahkan calon *WP*, Low Thia Kiang dengan sebab-sebab yang tidak berbeda jauh dengan wilayah Bukit Gombak.¹⁶⁴

Seperti halnya di wilayah Bukit Gombak dan Hougang, kekalahan yang diderita calon *PAP*, Ng Pock Too, juga disebabkan oleh tidak terpenuhinya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.¹⁶⁵ Beberapa aspirasi yang tidak mampu dipenuhi pemerintah tersebut diantaranya adalah kegagalan pembangunan taman umum dan stasiun *MRT* (*Mass Rapid Transport*), penanganan yang buruk terhadap sarana dan prasarana perumahan oleh Dewan Kota, kegagalan membangun pangkalan taksi dan kurangnya areal parkir bagi kendaraan-

¹⁶⁰ Singh, *loc.cit.*

¹⁶¹ Mutalib, *op.cit.*, hal 304.

¹⁶² Singh, *op.cit.*, hal. 104.

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*, hal. 105.

¹⁶⁵ *Ibid.*

kendaraan besar seperti, truk.¹⁶⁶ Ketidakpuasan masyarakat di wilayah Nee Soon Central makin bertambah dengan kurangnya kemampuan Ng Pock Too untuk mendekati para pemilih.¹⁶⁷ Hal ini berbeda dengan Cheo Chai Chen, seorang wakil oposisi dari Partai Demokratik Singapura (*SDP*), yang selalu berhubungan dengan penduduk dan mampu mempengaruhi massa pemilih bahwa dengan kemenangan oposisi di wilayah tersebut akan mengusahakan terpenuhinya berbagai keinginan masyarakat.¹⁶⁸

Berbeda dengan tiga *SMC* lainnya, kemenangan di *SMC* Potong Pasir nampaknya sudah diperkirakan sebelumnya. Penampilan yang gemilang, kredibilitas yang baik dan pengalaman yang tinggi membuat calon *SDP*, Chiam See Tong sulit untuk dikalahkan calon-calon *PAP*. Hal ini ditambah dengan ditampilkannya calon *PAP*, *Andy Gan*, yang kurang berpengalaman dan merupakan pendatang baru dalam pemilu tahun 1991 ini.¹⁶⁹ Kesuksesan Dewan Kota Potong Pasir yang dijalankan *SDP* dalam mengakomodasi suara rakyat menambah track record yang baik bagi Chiam See Tong dan *SDP* pada umumnya. Ancaman dari Goh yang akan memotong jasa pelayanan kepada masyarakat di Potong Pasir apabila tetap memilih oposisi berakibat negatif bagi *PAP*. Adanya ancaman tersebut nampaknya makin memantapkan suara yang mendukung oposisi dengan bukti menguatnya dukungan kepada oposisi menjadi 69,6% suara.¹⁷⁰

Secara umum, hasil pemilu tahun 1991 ini bagi oposisi telah menghasilkan satu prestasi tersendiri dengan keberhasilannya memenangkan 4 kursi parlemen dan 39% suara yang sah.¹⁷¹ Di beberapa wilayah yang dimenangkan partai oposisi, nampaknya tingkat kepedulian calon-calonnya terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat lebih tinggi dibandingkan calon-calon *PAP*. Mereka lebih memahami keinginan tersebut dan bahkan semakin membangkitkan aspirasi massa dengan mengangkat isu-isu yang nyata di dalam masyarakat.

Beberapa strategi partai oposisi juga mampu mendapatkan hasil yang

¹⁶⁶ *Ibid.*, hal. 106.

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ *Ibid.*, hal. 107.

¹⁷¹ *Suara Pembaruan*, 11 September 1991.

positif berupa peningkatan kursi partai oposisi. Dilema yang dirasakan oleh sebagian besar rakyat, dimana di satu sisi masih menginginkan *PAP* memerintah Singapura, dengan prestasi yang telah diraihinya selama ini, untuk melanjutkan pemerintahan Singapura dan di waktu yang sama juga menginginkan keberadaan oposisi, mampu diatasi dengan strategi pemilu sela (*by election*). Dengan membiarkan 41 kursi direbut *PAP* pada hari pencalonan, maka keinginan masyarakat yang menginginkan *PAP* tetap memerintah Singapura telah terwujud. Selanjutnya, keinginan massa terhadap hadirnya partai oposisi di parlemen bisa terwujud tanpa perlu takut bahwa *PAP* akan kalah dalam pemilu tahun 1991 ini.

4.3.2 Membangun Oposisi yang Lebih Kuat dan Hambatannya

Peningkatan kursi partai oposisi dalam pemilu tahun 1991 mengindikasikan bahwa dukungan bagi partai oposisi tidak hanya pada tingkat lokal saja yang merupakan ciri satu atau dua konstituensi tertentu, melainkan sudah meluas pada tingkat nasional dalam arti geografis.¹⁷² Indikasi tersebut terlihat dengan makin menyebarnya peningkatan suara partai oposisi dan sumber suara partai oposisi yang tidak bersifat wilayah.¹⁷³ Peningkatan suara yang diperoleh partai oposisi nampaknya lebih banyak berasal dari generasi muda yang lebih berpendidikan di Singapura. Hal ini nampaknya juga bisa dilihat dari survey yang telah dilakukan oleh *Straits Times* yang menunjukkan bahwa hampir 70% golongan muda di Singapura menghendaki tampilnya partai oposisi dalam parlemen.¹⁷⁴

Nampaknya, dengan hasil yang diperoleh partai oposisi tersebut telah mampu memperkuat posisinya di negara ini untuk mendapat dukungan yang lebih luas dari rakyat. Parlemen yang baru akan terdiri dari 77 anggota Parlemen yang berasal dari *PAP* dan 4 anggota berasal dari partai oposisi.¹⁷⁵ Untuk merealisasikan upaya pembentukan partai oposisi yang lebih kuat, dua partai oposisi yaitu *WP* dan *SDP* segera melakukan kerjasama yang lebih baik agar

¹⁷² *Kompas*, 2 September 1991.

¹⁷³ *Suara Pembaruan*, 3 September 1991.

¹⁷⁴ Fee, *op.cit.*, hal. 281.

¹⁷⁵ *Ibid.*

dapat mengimbangi *PAP*. Upaya tersebut, seperti yang dikatakan oleh Chiam See Tong, sekjen *SDP*, adalah dengan melakukan merger antara *WP* dengan *SDP*.¹⁷⁶ Selain itu, keinginan untuk membentuk oposisi yang lebih kuat tersebut juga nampak dari keseriusan Chiam untuk berkonsentrasi penuh dalam bidang politik dan meninggalkan praktek hukum yang telah dilakukannya selama ini.¹⁷⁷ Apa yang dilakukannya merupakan suatu tanda besarnya kesungguhannya untuk terjun secara penuh dalam bidang politik dan adanya kepercayaannya bahwa oposisi tidak hanya akan menjadi kekuatan sementara di dalam perpolitikan Singapura. Dengan demikian, nampaknya hasil pemilu tahun 1991 ini merupakan tonggak sejarah bagi partai-partai oposisi dalam usahanya mendapatkan legitimasi yang lebih tinggi dari rakyat.

Walaupun begitu, kekuatan oposisi masih terlalu kecil dibandingkan dengan kekuatan partai pemerintah *PAP*. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan jumlah kursi yang dimiliki, yaitu dari total 81 kursi yang ada di parlemen, partai oposisi hanya mendapat 4 kursi saja. Jika partai oposisi tidak mampu menarik perhatian dari kelompok lain, nampaknya partai oposisi sulit untuk dapat berbuat lebih banyak dalam *GRC* dimana minimal salah satu calonnya berasal dari kelompok etnis lain yang minoritas. Karena ada kemungkinan jumlah wakil untuk masing-masing *GRC* akan ditingkatkan, sehingga berakibat pada berkurangnya calon di masing-masing *SMC*.¹⁷⁸ Dengan demikian, partai oposisi akan mendapat beban yang makin berat dalam upayanya menambah kursi di parlemen.

Keinginan partai oposisi untuk makin meningkatkan perannya dalam proses perpolitikan di Singapura dan menambah jumlah kursi di parlemen juga menghadapi masalah lain. Salah satu masalah itu adalah masih terbatasnya dana yang dimiliki oleh partai oposisi.¹⁷⁹ Keberadaan dana yang lebih besar diperlukan untuk mengadakan kegiatan kampanye pemilu yang lebih besar dan untuk menarik minat para profesional masuk ke dalam partai politik tersebut. Seperti

¹⁷⁶ Singh, *op.cit.*, hal. 151.

¹⁷⁷ Muttalib, *op.cit.*, hal. 306.

¹⁷⁸ *Kompas*, 31 Agustus 1991.

¹⁷⁹ Muttalib, *loc.cit.*

terlihat dalam kebutuhan masing-masing kandidat pada Pemilu tahun 1991 yang meningkat menjadi S \$ 6.000 dari S \$ 4.000 di tahun 1988.¹⁸⁰ Dan nampaknya jumlah ini akan meningkat lagi untuk pemilu yang akan datang. Masalah yang dihadapi oleh partai oposisi dalam usahanya untuk memperkuat posisinya dalam proses perpolitikan di Singapura nampaknya masih banyak menghadapi hambatan. Namun tingkat keseriusan yang tinggi dari anggota partai oposisi seperti ditunjukkan oleh Chiam See Tong yang meninggalkan praktek hukumnya dan berkonsentrasi penuh dalam bidang politik menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh dari partai oposisi dalam rangka membentuk oposisi yang kuat.¹⁸¹

4.4 Implikasi Hasil Pemilu bagi Partai Aksi Rakyat

Hasil Pemilu tahun 1991 di Singapura, yang memberikan tambahan kursi kepada kelompok oposisi, telah mengecewakan PM Goh Chok Tong. Ia mengatakan bahwa rakyat negara tersebut tidak bersedia menerima gaya pemerintahannya yang lebih terbuka. Meskipun menang lebih dari 95% dari jumlah kursi yang ada, *PAP* sangat kecewa menanggapi hasil Pemilu kali ini.¹⁸² Goh gagal mencapai target sesuai dengan apa yang diharapkannya sebelumnya, yaitu ingin memperbaiki hasil dibanding Pemilu 1988. Goh secara jelas menunjukkan kekecewaannya pada konferensi Pers pada tanggal 1 September 1991 pada saat dia mengatakan:

*The results show that while the voters had given the PAP the mandate to govern Singapore, they have not given me the clear endorsement I had hoped for... That solid endorsement did not come. I will have to study the detailed results, to reflect over them to understand the meaning and then to decide whether and how to continue with my open consultative style of government.*¹⁸³

Kekecewaan Goh sebenarnya merupakan hal yang wajar. Berbagai faktor pendukung yang diyakininya akan mampu meningkatkan suara *PAP* telah

¹⁸⁰ *Ibid.*, hal. 306.

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Singh, *op.cit.*, hal. 109.

¹⁸³ *Ibid.*

diupayakannya, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pendekatannya yang lebih intensif dengan berdialog langsung dengan rakyat, gaya kepemimpinan yang partisipatif dan terbuka, serta program-program yang diperkenalkannya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Semua itu diharapkan Goh akan membuat rakyat memberikan dukungan dan mandat yang penuh kepadanya namun, nampaknya apa yang diharapkannya tidak terwujud. Dalam standar negara-negara demokratis lain di dunia ini, kehilangan 4 kursi dari 81 kursi yang ada dan penurunan prosentase suara menjadi 61% merupakan suatu kemenangan besar dan tanda masih tingginya dukungan rakyat terhadap pemerintah.¹⁸⁴ Namun berbeda dengan di Singapura, bagi *PAP* yang sudah terbiasa menang di setiap Pemilu dengan hasil yang minimal atau tidak adanya kursi bagi oposisi, hasil ini digambarkan oleh S. Rajaratnam, "kemenangan ini tidak ada artinya apabila harus kehilangan kursi yang ada".¹⁸⁵ Tidak dapat dipungkiri, dengan meningkatnya perolehan kursi oleh kelompok oposisi dalam pemilu kali ini memang dapat memojokkan posisi Goh. Hal tersebut menimbulkan spekulasi di kalangan para pengamat bahwa Goh mungkin akan mendapat tekanan dari partainya, misalnya saja untuk mundur atau merubah gaya pemerintahannya.¹⁸⁶ Sebab, di bawah Goh, penampilan partai berkuasa, Partai Aksi Rakyat, mencatat hasil yang terburuk. Kebingungan Goh diungkapkannya dengan mengatakan:

I cannot understand why Singaporeans are still so dissatisfied. Some give the reason that people now expect more. But I really don't know why. I'll be quite frank with you. I haven't thought of an answer. Mr Lee was authoritarian, he came down very hard on people who gave wrong views. The Government has changed its style. It is now more open, consultative, friendly.

*Did the votes go up or go down? So what do people want? Year after year, our lives become better in terms of incomes. The votes go down. So there is a negative correlation: The more open and friendly we are, the better we do for Singaporeans, the worse for votes.*¹⁸⁷

¹⁸⁴ Muttalib, *op.cit.*, hal. 305.

¹⁸⁵ *Ibid.*, hal. 304.

¹⁸⁶ *Pelita*, 16 September 1991.

¹⁸⁷ Singh, *op.cit.*, hal. 113.

Melihat hasil pemilu yang mengejutkan tersebut beberapa pengamat politik seperti Chua Beng Huat, Jon Quah, dan Walter Moon tidak sependapat apabila hal itu dikaitkan dengan kegagalan Goh secara pribadi, yaitu tidak diterimanya gaya terbuka, partisipatif dan konsultatif yang diterapkannya oleh masyarakat.¹⁸⁸ Namun, berdasarkan pengamatan selama masa kampanye, banyak faktor-faktor lain di luar gaya kepemimpinan Goh seperti keefektifan strategi dan isu kampanye dari partai oposisi, perluasan kelas menengah dan kesalahan strategi pemilu yang diterapkan oleh Goh.¹⁸⁹ Sebaliknya, gaya Goh yang terbuka dan partisipatif dipandang sebagai reputasinya yang patut dipuji, karena dengan secara terbuka ia telah mengumumkan program-programnya dan bahkan gaya pemerintahannya dengan menunjukkan keburukan cara-cara dan gaya pemerintahan yang telah ditampilkan oleh pendahulunya.

Sebenarnya, akan lebih adil apabila peningkatan suara bagi oposisi tersebut dilihat dari perkembangan politik yang sedang terjadi di Singapura secara umum. Penurunan suara yang telah terjadi sejak pemilu tahun 1984 masih terus berlanjut dalam pelaksanaan pemilu sampai tahun 1991 dan hal itu memang gagal dicegah oleh Goh Chok Tong. Namun, sebenarnya Goh telah mengantisipasi situasi politik yang berkembang tersebut, yaitu dengan memperkenalkan gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif dan terbuka seperti yang diharapkan oleh rakyat. Perubahan kebudayaan politik yang berkembang di Singapura, yaitu adanya keinginan dari sebagian besar generasi muda yang menghendaki pemerintahan yang lebih partisipatif dan akomodatif kepada rakyat.¹⁹⁰ Disamping itu, terdapat kecenderungan bahwa rakyat juga menghendaki perlunya kehadiran oposisi di parlemen, karena nampaknya selama ini rakyat tidak pernah diikutsertakan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik. Goh Chok Tong telah berusaha memenuhi keinginan rakyat untuk merubah gaya kepemimpinan yang keras dari Lee Kuan Yew dan menggantinya dengan gaya kepemimpinan yang lebih lunak, terbuka dan partisipatif. Dalam satu hal, Goh mampu

¹⁸⁸ *Kompas*, 4 September 1991.

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ Muttalib, *op.cit.*, hal. 303.

mengurangi penurunan suara yang lebih banyak kepada *PAP*, namun keinginan rakyat terhadap kehadiran partai oposisi tidak bisa dihentikan. Hasil yang diperoleh *PAP* dalam pemilu tahun 1991 ini sudah maksimal, karena nampaknya seandainya Perdana Menteri Singapura masih dipimpin oleh pemimpin yang hebat sekaliber Lee Kuan Yew pun masih sulit untuk mencegah peningkatan dukungan bagi partai oposisi seperti yang terjadi pada dua pemilu sebelumnya.

Meskipun begitu, kemenangan *PAP* dalam pemilu tahun 1991 ini membuat Goh Chok Tong berhak untuk menduduki kursi Perdana Menteri untuk kedua kali dan pertama kali melalui pemilu. Dalam kabinet yang dibentuk Goh Chok Tong terdapat beberapa posisi lama yang tetap dijabat oleh orang yang sama yaitu; jabatan Menteri Senior oleh Lee Kuan Yew, Wakil Perdana Menteri yang sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri yang dijabat Lee Hsien Loong, Wakil Perdana Menteri Ong Teng Cheong dan Menteri Perdagangan Richard Hu.¹⁹¹ Jabatan yang diganti adalah Menteri Pembangunan Masyarakat dari Dr. Seet Ai Mee ke Yeo Cheow Tong, menyusul kekalahan Dr. Seet Ai Mee dalam pemilu tahun 1991. Sementara beberapa jabatan yang lain diduduki oleh muka-muka baru dan lama yang menempati jabatan yang berbeda dengan sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya susunan kabinet baru adalah sebagai berikut,¹⁹²

Goh Chok Tong	: Perdana Menteri
Lee Kuan Yew	: Menteri Senior
Ong Teng Cheong	: Wakil Perdana Menteri
Lee Hsien Loong	: Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Industri
Suppiah Dhanabalan	: Menteri Pembangunan Nasional
Tony Tan	: Menteri Pendidikan
Yeo Ning Hong	: Menteri Lingkungan Hidup
Shanmugan Jayakumar	: Menteri Dalam Negeri dan Hukum
Richard Hu	: Menteri Keuangan

¹⁹¹ *Kompas*, 6 September 1991.

¹⁹² *Ibid*.

Lee Yock Suan	: Menteri Tenaga Kerja
Wong Kan Seng	: Menteri Luar negeri
Yeo Cheow Tong	: Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesehatan
George Yeo	: Menteri Kesenian dan Penerangan
Lee Boon Yang	: Menteri Kantor Perdana Menteri
Mah Bow Tan	: Menteri Komunikasi

Kekecewaan Goh Chok Tong menanggapi hasil pemilu tahun 1991 nampaknya tidak berlangsung lama. Hal ini dapat dilihat dari pernyataannya setelah melantik kabinet baru, "Saya berniat untuk tetap menjadi PM sampai tahun 1999. Hasil pemilu saat ini sebetulnya tidaklah seburuk penilaian saya sebelumnya. Saya putuskan untuk menjadi diri saya sendiri yang sejati dan tidak lagi unjuk kekecewaan, sehingga mungkin saya tidak perlu lagi mengadakan jumpa pers pada pukul 4 pagi".¹⁹³ Hasil pemilu tahun 1991 yang sebelumnya dinilai sebagai wujud penolakan rakyat terhadap gaya pemerintahannya, nampaknya tidak lagi dipermasalahkannya. Meningkatnya jumlah oposisi di parlemen, nampaknya bukan berarti bahwa rakyat tidak menerima gaya pemerintahan yang terbuka dan partisipatif dari Goh. Namun, hal tersebut merupakan perkembangan yang wajar dari suatu negara maju seperti Singapura, dimana rakyatnya lebih menghendaki dinamika pemerintahan yang lebih besar dan kuat, yang pada gilirannya semakin membuat negara itu maju. Perubahan terhadap gaya pemerintahan terbuka dan partisipatif justru lebih akan melemahkan posisi pemerintah karena akan dianggap menghambat laju keterbukaan yang lebih besar lagi dalam perpolitikan di Singapura.

Pemerintah nampaknya mengakui bahwa kebijakan yang ditempuhnya selama ini menjadi tidak relevan lagi untuk tetap dipakai sebagai landasan penyusunan arah pembangunan negara. Seperti pernah dikatakan oleh salah anggota parlemen dari *PAP* sendiri bahwa pemerintah dianggap terlalu memaksakan sesuatu yang rakyat rasakan sebagai urusan pribadi mereka.¹⁹⁴ Salah

¹⁹³ *Kompas*, 5 September 1991.

¹⁹⁴ *Straits Times*, dikutip dalam Huat dalam Mahmood (ed), *op.cit.*, hal. 127.

seorang anggota parlemen lainnya mengatakan bahwa “*our hard-headed and statistical approach to problems have given the impression that we are beginning to care less for the people and more for those who can achieve*”¹⁹⁵ Ucapan lainnya adalah bahwa “pemerintah sering tidak tepat dalam menentukan ukuran kebijakan keuangan secara objektif tanpa meneliti lebih jauh sebelum menentukan kebijaksanaan tertentu”.¹⁹⁶ Kritik-kritik tersebut telah menjadi suatu *public opinion* dan nampaknya hal itu juga disadari oleh pemerintahan *PAP*

Langkah-langkah selanjutnya segera disusun oleh *PAP* untuk mengantisipasi penurunan suara yang lebih jauh dalam pemilu mendatang. Langkah itu disusun untuk menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat mengenai perlunya peranan yang lebih besar dari rakyat dalam ikut menentukan proses pengambilan kebijakan negara. Mekanisme untuk memunculkan konsensus baru yang dilakukan *PAP* adalah dengan memperbesar partisipasi bagi rakyat dalam proses pembuatan keputusan secara nasional melalui forum nasional.¹⁹⁷ Orientasi yang secara eksplisit muncul adalah merupakan suatu langkah terhadap upaya demokratisasi yang lebih luas terhadap badan-badan politik, sebagai contoh; pembangunan lebih jauh terhadap kebudayaan demokrasi di masa depan dengan mekanisme formal dari pemilu.¹⁹⁸ Langkah nyata yang diambil diantaranya adalah dengan lebih memfungsikan *feedback unit* yang mana akan dapat menampung keluhan dan pendapat masyarakat.¹⁹⁹ Upaya untuk lebih memfungsikan *feedback unit* ini nampaknya berkaitan dengan masih adanya unit-unit yang kurang tanggap terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, seperti di daerah-daerah di mana *PAP* mengalami kekalahan dari partai oposisi. Kesalahan strategi yang dilakukan *PAP* dengan perhatian yang lebih besar terhadap kelas menengah ke atas nampaknya berusaha diperbaiki oleh *PAP* dengan upaya-upaya tersebut. Dari langkah-langkah yang dilakukan oleh *PAP* diatas nampaknya bisa dikatakan bahwa hal tersebut mempunyai tujuan umum

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*, hal. 128.

yaitu terciptanya hubungan yang lebih dekat antara pemerintah dengan rakyat, sehingga diharapkan dukungan yang lebih besar lagi akan diberikan kepada pemerintahan *PAP*.



BAB V

KESIMPULAN

Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Lee Kuan Yew dalam masa pemerintahannya selama 31 tahun telah membawa dua dampak dalam perkembangan Singapura. Di satu sisi, di bidang ekonomi, pembangunan yang memang lebih menitikberatkan pada bidang ekonomi telah menghasilkan suatu kemajuan yang sangat tinggi berupa peningkatan pendapatan negara dan pendapatan perkapita penduduk, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan standar hidup masyarakat. Di sisi lain, di bidang politik, pembangunan pada bidang politik tidak begitu nampak, sehingga dinamika pertumbuhan politik di Singapura tidak begitu terlihat nyata.

Tantangan faktual bagi negara Singapura sebagai negara baru untuk bisa survive telah mendorong pemerintahan Lee Kuan Yew melakukan kebijakan depolitisasi. Tantangan faktual tersebut mencakup tiga kondisi yaitu; *pertama*, ketidakmampuan ekonomi Singapura pada tahun 1950-an dan 1960-an yang nampak dari berbagai bentuk kesulitan hidup seperti; kemiskinan, keterbelakangan, kelaparan dan tidak adanya sumber kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan hidup. *Kedua*, ancaman Komunis yang selalu datang setiap saat dengan berbagai bentuk kegiatan subversifnya berupa; penghasutan kepada massa untuk menentang pemerintah dan upaya-upaya kekerasan untuk merebut kekuasaan yang sah. *Ketiga*, berasal dari masyarakat Singapura sendiri. Mayoritas penduduk Singapura yang berasal dari etnis Cina nampaknya telah menimbulkan dampak berupa kekhawatiran dua negara tetangga Indonesia dan Malaysia yang mayoritas muslim terhadap penyebaran Komunis di Asia Tenggara yang berpusat di Singapura. Tindakan konfrontasi dari negara tetangga tersebut sewaktu-waktu dikhawatirkan bisa terjadi akibat meluasnya pengaruh Komunis di Singapura. Beberapa hal itulah yang nampaknya menjadi suatu landasan bagi pemerintahan Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party / PAP*) di bawah Perdana Menteri Lee Kuan Yew menerapkan ideologi *survival* dan *pragmatis* partainya.

Langkah yang diambil kemudian adalah dengan melakukan pembangunan ekonomi yang berdampak pada kurangnya pembangunan bidang politik atau bisa dikatakan sebagai kebijakan depolitisasi pemerintah. Kebijakan depolitisasi tersebut terlihat dari adanya pembatasan kebebasan pers, pembatasan kebebasan berpendapat yang dapat dilihat dari pemakaian Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (*Internal Security Act / ISA*) yang membolehkan penahanan tanpa pengadilan bagi masyarakat yang mengkritik pemerintah dan dianggap telah membahayakan keamanan negara dan pembatasan terhadap munculnya organisasi sosial politik lain yang kuat. Kebijakan Lee Kuan Yew tersebut menjadikan dirinya sebagai pemimpin pemerintahan yang otoriter karena segala keputusan dan kebijakan negara bersumber dari dia. Hal ini dilakukan Lee untuk lebih menjamin stabilitas sosial, politik dan keamanan negara agar pembangunan ekonomi bisa berjalan lancar. Lee Kuan Yew nampaknya lebih percaya pada keutuhan dan persatuan partainya daripada melibatkan institusi politik yang lain karena kehadiran institusi politik lain yang kuat dianggap akan menghambat percepatan kemajuan ekonomi negara yang baru merdeka seperti Singapura. Hal tersebut nampaknya juga didukung oleh rakyat Singapura yang menyadari bahwa perjuangan untuk mempertahankan hidup pada saat itu lebih penting dibanding keinginan untuk lebih berperan serta dalam bidang politik. Kenyataan ini ditambah dengan budaya politik Konfusius yang menerapkan ajaran kepatuhan terhadap penguasa negara, sehingga dukungan rakyat terhadap pemerintahan PAP cukup besar dan hal ini menyebabkan legitimasi politik terhadap PAP juga tinggi. Indikasi ini terlihat dari kemenangan besar PAP dalam setiap Pemilu sejak Singapura merdeka tahun 1965.

Dominasi *PAP* dengan menguasai seluruh kursi parlemen Singapura berlangsung sejak tahun 1968 sampai dengan awal tahun 1980-an dan sejak pertengahan tahun 1980-an partai oposisi mampu menempatkan wakilnya dalam parlemen. Pada pemilu tahun 1968, 1972, 1976, dan 1980 *PAP* berhasil merebut seluruh kursi di parlemen. Baru pada pemilu sela tahun 1981, salah seorang wakil dari partai oposisi, J.B. Jeyaretnam, tampil sebagai satu-satunya anggota parlemen dari partai oposisi. Kemudian, pada pemilu-pemilu selanjutnya yaitu pada tahun

1984, 1988 dan tahun 1991 ini partai oposisi selalu menempatkan wakilnya dalam parlemen. Namun, hal itu bukan berarti bahwa pemerintah lemah atau tidak mendapatkan legitimasi politik dari rakyat, akan tetapi lebih banyak disebabkan oleh dampak dari kemajuan ekonomi yang telah diraih Singapura. Hal ini berkaitan dengan bertambahnya pemilih-pemilih baru yang berasal dari generasi muda yang lebih berpendidikan sebagai hasil dari kemajuan ekonomi, yang mana mereka menghendaki perlunya kehadiran wakil oposisi dalam parlemen.

Keberhasilan pembangunan ekonomi yang dialami Singapura di bawah pimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew telah menghasilkan suatu dampak positif bagi rakyat Singapura berupa keberhasilan modernisasi dan perubahan dalam struktur sosial masyarakat dari masyarakat kelas bawah menjadi masyarakat kelas menengah. Hal itu terlihat dari peningkatan pendapatan, standar hidup, gaya hidup dan tingkat pendidikan masyarakat, sehingga memunculkan suatu kelas menengah baru, khususnya berasal dari segmen generasi muda. Namun di sisi lain, keberhasilan pembangunan tersebut juga menimbulkan dampak negatif bagi *PAP*, yaitu merosotnya dukungan suara terhadap *PAP* pada pemilu sejak pemilu tahun 1984 sampai pemilu tahun 1991. Perluasan kelas menengah dan meningkatnya kaum muda yang berpendidikan telah membawa pemikiran dan pandangan baru yang lain dibanding generasi sebelumnya mengenai kehidupan perpolitikan di Singapura. Dengan telah terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, nampaknya telah terjadi pergeseran nilai-nilai dan keinginan dari rakyat Singapura. Hal ini terutama dipelopori oleh kaum muda yang lebih berpendidikan, baik yang berpendidikan Barat maupun berpendidikan Cina. Kaum muda yang berpendidikan Barat nampaknya tertarik dengan perkembangan dari negara-negara lain, dimana kebebasan dan demokrasi sudah berkembang begitu pesat, untuk kemudian mengadopsi model perkembangan tersebut dan mencoba menerapkannya di Singapura. Hal inilah yang nampaknya menjadi dasar bagi kaum muda untuk lebih memilih partai oposisi dalam pemilu, karena dengan adanya oposisi di parlemen, maka pengawasan yang lebih efektif bisa dilakukan terhadap penguasa. Kehadiran partai oposisi di parlemen juga diharapkan dapat lebih menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat,

yang mana belum dapat terakomodasi oleh pemerintah. Selain itu, dengan adanya oposisi di parlemen juga bisa menunjukkan perkembangan ke arah demokrasi dan kebebasan yang lebih besar lagi dari rakyat karena kekuasaan *PAP* menjadi tidak mutlak lagi.

Perkembangan yang terjadi di Singapura nampaknya menunjukkan terjadinya perubahan politik di Singapura yang ditandai dengan pergeseran nilai-nilai budaya politik yang ada di Singapura. Budaya politik Konfusius, yaitu suatu budaya politik yang berisi ajaran kepatuhan terhadap penguasa yang selama ini lekat dalam kehidupan masyarakat Singapura, sedikit demi sedikit mulai luntur. Sebaliknya, yang muncul adalah tuntutan-tuntutan dan orientasi yang baru terhadap proses penyelenggaraan perpolitikan di Singapura. Peran serta yang lebih luas dari masyarakat terhadap penentuan kebijakan publik lebih diinginkan oleh generasi muda, daripada hanya menerima dan tunduk terhadap segala kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah.

Adanya perubahan budaya politik di atas, nampaknya telah menjadi hambatan utama bagi *PAP* untuk mempertahankan dominasinya dalam pemerintahan Singapura. Hal ini terlihat dari menurunnya dukungan suara yang diberikan rakyat kepada *PAP* dalam pemilu, sejak tahun 1984. Munculnya 250.000 pemilih baru dari generasi muda yang lebih berpendidikan pada pemilu tahun 1984 telah mengakibatkan penurunan suara sebesar 12,5% dan lepasnya 2 kursi anggota parlemen ke tangan partai oposisi. Kaum muda tersebut nampaknya mempunyai orientasi yang berbeda dengan pendahulunya, yang mana mereka menginginkan perubahan gaya pemerintahan otoriter dan kaku dari Lee Kuan Yew, serta menghendaki aspirasi politik yang lebih luas lagi bagi masyarakat. Dan hal ini telah mengakibatkan meningkatnya dukungan suara, terutama dari generasi muda, terhadap partai oposisi sejak pemilu tahun 1984.

Pada pemilu Singapura tahun 1991, penurunan suara yang lebih besar kembali dialami oleh *PAP*. Pergantian pimpinan pemerintahan dari Lee Kuan Yew yang otoriter kepada Goh Chok Tong yang terbuka dan partisipatif pada tahun 1990 ternyata tidak mampu mencegah peningkatan suara yang lebih besar terhadap partai oposisi. Hal ini disebabkan adanya faktor lain di luar itu yang

cukup mempengaruhi pandangan dari pemilih, diantaranya adalah adanya perubahan budaya politik rakyat yang menginginkan kehadiran partai oposisi di parlemen. Sebaliknya, dukungan kepada partai oposisi mengalami peningkatan dibanding pemilu sebelumnya dengan terpilihnya empat wakil oposisi menjadi anggota parlemen Singapura dan meningkatnya persentase suara partai oposisi dari 36,8% menjadi 39%. Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya perolehan suara partai oposisi dalam pemilu tahun 1991 antara lain; *pertama*, keefektifan strategi pemilu dari partai oposisi dengan menerapkan strategi pemilu *sela / by election* yang dilontarkan pertama kali oleh calon anggota parlemen dari partai oposisi, Chiam See Tong. Maksud dari strategi pemilu sela ini adalah dengan membiarkan *PAP* memastikan kemenangannya pada hari nominasi (sebelum pemungutan suara dilaksanakan), maka rakyat tidak perlu khawatir bahwa partai oposisi akan menumbangkan pemerintahan. Hal unik yang terjadi di Singapura adalah bahwa sebagian besar generasi muda memang menghendaki kehadiran partai oposisi di parlemen, namun sebaliknya mereka tidak menghendaki *PAP* kalah dalam pemilu. Keefektifan strategi tersebut terlihat dari keberhasilan partai oposisi mempengaruhi pandangan masyarakat untuk lebih memilih partai oposisi karena dipastikan sebesar apapun dukungan masyarakat dalam pemungutan suara tetap tidak akan mempengaruhi kedudukan pemenang pemilu.

Kedua, kesalahan strategi pemilu *PAP*, dimana *PAP* lebih memperhatikan kepentingan kelas menengah berpendidikan Barat dibandingkan dengan yang berpendidikan Cina. Dengan terabaikannya kepentingan golongan berpendidikan Cina tersebut, maka mereka kemudian beralih mendukung pada partai oposisi. Jumlah kaum muda berpendidikan Cina yang juga cukup besar berdampak pada penurunan persentase suara *PAP*.

Ketiga, adanya perluasan kelas menengah baru dari kaum muda yang lebih berpendidikan nampaknya juga berpengaruh cukup besar terhadap peningkatan persentase suara yang diterima partai oposisi. Keberhasilan pemerintahan *PAP* dalam membangun perekonomian Singapura telah menyebabkan makin banyaknya jumlah generasi muda yang berpendidikan tinggi. Ironisnya, dari

generasi muda yang sebenarnya merupakan hasil kemajuan ekonomi di bawah pemerintahan *PAP*, ternyata justru berakibat pada menurunnya dukungan kepada *PAP*. Keberhasilan pembangunan ekonomi Singapura memang diakui, namun adanya perubahan budaya politik rakyat Singapura yang tercermin dari munculnya keinginan kaum muda yang menghendaki perluasan aspirasi politik dalam pengambilan kebijakan publik nampaknya lebih mendorong kaum muda untuk memilih partai oposisi.

Keberhasilan partai oposisi menambah jumlah wakilnya di parlemen menjadi 4 orang pada pemilu tahun 1991 menunjukkan tanda-tanda menguatnya posisi partai oposisi dalam proses perpolitikan di Singapura. Namun demikian, keberhasilan partai oposisi dalam meningkatkan jumlah suaranya dan wakilnya di parlemen sebagai hasil pemilu tahun 1991 nampaknya belum bisa dikatakan sebagai suatu kekuatan yang mampu menjadi penyeimbang pemerintah, karena menguatnya posisi partai oposisi tidak cukup signifikan dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dari pemerintah. Jumlah empat orang dari wakil oposisi masih terlalu kecil dalam parlemen yang total anggota seluruhnya sebanyak 81 orang. Kekhawatiran *PAP* dalam hal ini lebih tertuju pada akibat selanjutnya dari peningkatan wakil oposisi tersebut yaitu munculnya potensi untuk semakin memperkuat posisi partai oposisi dalam parlemen Singapura pada pemilu-pemilu selanjutnya.

Bagaimanapun, keberhasilan partai oposisi meningkatkan persentase perolehan suara dan menambah jumlah wakilnya di parlemen adalah merupakan suatu prestasi tersendiri bagi partai oposisi, karena jumlah ini merupakan jumlah terbanyak sejak pemilu tahun 1968. Partai oposisi yang selama ini dianggap lemah dan keberadaannya kurang diperhitungkan ternyata mampu meraih 39% dukungan suara dari pemilih dan menempatkan empat wakilnya dalam parlemen. Keberhasilan partai oposisi pada pemilu tahun 1991 ini, nampaknya menjadi suatu sejarah tersendiri bagi perpolitikan di Singapura, yang mana oleh partai oposisi perpolitikan Singapura diharapkan akan lebih dinamis lagi dengan semakin banyaknya wakil partai oposisi yang duduk dalam parlemen.

POSTSCRIPT

Pemilu yang diadakan di Singapura pada tahun 1991 merupakan salah satu fenomena politik yang menarik, diantara sekian masalah politik yang ada di Singapura. Beberapa alasan mengapa pemilu tahun 1991 ini dijadikan sebagai pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa pada pemilu tahun 1991 ini partai oposisi mampu membuat sejarah baru dengan keberhasilannya menempatkan empat wakilnya dalam parlemen dan meningkatnya persentase suaranya menjadi sebesar 39%. Prestasi yang dicapai oleh partai oposisi tersebut adalah hasil terbaik yang pernah dicapainya sejak pemilu tahun 1968.

Selain itu, pemilu tahun 1991 ini merupakan pemilu yang pertama kalinya bagi Perdana Menteri baru Goh Chok Tong yang diangkat sebagai PM Singapura oleh Lee Kuan Yew pada tahun 1990. Pemilu ini menjadi menarik karena dapat dilihat seberapa jauh Partai Aksi Rakyat (*PAP*) mampu mempertahankan dominasi politiknya di bawah pimpinan Perdana Menteri yang baru. Kemampuan dan prestasi Goh Chok Tong belum dapat dinilai secara menyeluruh karena dia belum lama memerintah Singapura. Hal ini menjadi ujian tersendiri bagi Goh Chok Tong, apakah secara politis dia mampu mendapatkan dukungan yang penuh dari rakyat Singapura melalui suatu pemilu, setelah sekian lamanya dipimpin oleh Lee Kuan Yew.

Alasan terakhir yang membuat pemilu tahun 1991 ini menarik adalah adanya perubahan budaya politik rakyat yang semakin meluas yang menjadi fenomena tersendiri karena ikut berperan besar di dalam mempengaruhi hasil pemilu tahun 1991 tersebut. Perubahan budaya politik yang terjadi sejalan dengan semakin bertambahnya generasi baru yang berasal dari kaum muda yang mempunyai orientasi yang lain dengan pendahulunya. Generasi ini nampak semakin kritis kepada pemerintah dan tidak hanya tunduk serta patuh terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Beberapa keinginan dan keluhan yang tidak mampu terakomodasi oleh pemerintah menyebabkan beralihnya dukungan mereka kepada partai oposisi. Hal ini berakibat pada

POSTSCRIPT

Pemilu yang diadakan di Singapura pada tahun 1991 merupakan pemilu yang sangat menarik untuk dibahas, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat pemilu tahun 1991 ini sebagai pokok bahasan yang diangkat dalam skripsi ini. Faktor-faktor yang menarik dalam pemilu tahun 1991 ini diantaranya adalah; *pertama*, pada pemilu tahun 1991 ini partai oposisi mampu membuat sejarah baru dengan keberhasilannya mencompatkan empat wakilnya dalam parlemen dan meningkatnya persentase suaranya menjadi sebesar 39%. Prestasi yang dicapai oleh partai oposisi tersebut adalah hasil terbaik yang pernah dicapainya sejak pemilu tahun 1968.

Kedua, pemilu tahun 1991 ini merupakan pemilu yang pertama kalinya bagi Perdana Menteri baru Goh Chok Tong yang diangkat sebagai PM Singapura oleh Lee Kuan Yew pada tahun 1990. Pemilu ini menjadi menarik karena dapat dilihat seberapa jauh Partai Aksi Rakyat (*PAP*) mampu mempertahankan dominasi politiknya di bawah pimpinan Perdana Menteri yang baru. Kemampuan dan prestasi Goh Chok Tong belum dapat dinilai secara menyeluruh karena dia belum lama memerintah Singapura. Hal ini menjadi ujian tersendiri bagi Goh Chok Tong, apakah secara politis dia mampu mendapatkan dukungan yang penuh dari rakyat Singapura melalui suatu pemilu, setelah sekian lamanya dipimpin oleh Lee Kuan Yew.

Ketiga, adanya perkembangan menarik berupa perubahan budaya politik rakyat yang semakin meluas menjadi fenomena tersendiri yang ikut berperan besar di dalam mempengaruhi hasil pemilu tahun 1991 tersebut. Perubahan budaya politik yang terjadi sejalan dengan semakin bertambahnya generasi baru yang berasal dari kaum muda yang mempunyai orientasi yang lain dengan pendahulunya. Generasi ini nampak semakin kritis kepada pemerintah dan tidak hanya tunduk serta patuh terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Beberapa keinginan dan keluhan yang tidak mampu terakomodasi oleh pemerintah menyebabkan beralihnya dukungan mereka kepada partai oposisi.

peningkatan persentase suara dan jumlah kursi partai oposisi yang ada di parlemen.

Namun demikian, fenomena politik lain yang muncul yang mana tidak kalah menariknya dengan pemilu tahun 1991 yaitu pemilu tahun 1997. Keberhasilan partai oposisi dalam meningkatkan persentase suara dan jumlah kursi dalam parlemen seperti yang diperolehnya pada pemilu tahun 1991 ternyata tidak mampu dipertahankannya kembali pada tahun 1997. Partai oposisi harus kehilangan dua kursinya dan hanya menempatkan dua wakilnya di parlemen, yaitu Chiam See Tong dari Partai Rakyat Singapura (*Singapore People's Party / SPP*) dan Low Thia Kiang dari partai Pekerja (*Worker's Party*). Perpecahan internal di dalam tubuh Partai Demokratik Singapura (*Singapore Democratic Party / SDP*) yang pada pemilu tahun 1991 memperoleh tiga kursi serta ketidakmampuan wakil partai oposisi mengakomodasi berbagai keluhan dan keinginan masyarakat ikut menjadi pemicu menurunnya suara partai oposisi. Selain itu, adanya perkembangan yang terjadi di Singapura berupa perubahan budaya politik rakyat Singapura terus berlanjut pada pemilu tahun 1997. Hal ini nampak dari semakin kritisnya rakyat terutama dari golongan muda terdidik terhadap wakil-wakil mereka di pemerintahan. Kekritisan rakyat ternyata tidak hanya ditujukan pada Partai Aksi Rakyat saja, melainkan juga pada setiap partai yang menjadi wakil mereka di parlemen. Wujud dari kekritisan tersebut nampak dari beralihnya dukungan rakyat terhadap partai oposisi yang dianggap kurang bisa mengakomodir keinginan rakyat, sehingga suara dari partai oposisi pada tahun 1997 mengalami penurunan.

Namun demikian, seperti yang dijelaskan dalam bab I dan Postscript ini bahwa terdapat beberapa alasan mengapa skripsi ini hanya berfokus pada pemilu tahun 1991. Dengan Postscript ini, kemungkinan ada penulis lain yang tertarik dan akan membahas fenomena politik di Singapura yang lain, seperti pemilu tahun 1997 tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

- Budiardjo, Miriam. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta. PT. Gramedia.
- Chee, Chan Heng, Robert Bartley, Samuel P. Huntington dan Shijuro Ogata. 1994. *Demokrasi dan Kapitalisme: Perspektif Asia dan Amerika*. Jakarta. CIDES.
- Chee, Chan Heng. 1978. *The Dynamics of One Party Dominance: The PAP at the Grass-Roots*. Singapore. Singapore University Press.
- Effendi, Sofian. 1986. *Unsur-unsur Penelitian Sosial*. Jakarta. LP3ES.
- Fee, Lew Eng. 1989. *Southeast Asian Affairs 1989*. Singapore. Institute of Southeast Asian Studies. Heinemann Educational Books (Asia) LTD.
- Frankel, Joseph. 1990. *Hubungan Internasional*. Jakarta. ANS Sungguh Bersaudara.
- Kartono, Kartini. 1981. *Pengantar Methodologi Research*. Jakarta. CV Rajawali Pers.
- Gie, The Liang. 1979. *Ilmu Politik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Hewison, Kevin, Richard Robison, Garry Rodan (eds). 1993. *Southeast Asia in the 1990s: Authoritarianism, Democracy and Capitalism*. St. Leonards.
- Hiock, Lee Boon. 1978. *Southeast Asian Affairs 1978*, Singapore. Institute of Southeast Asian Studies Heinemann Educational Books (Asia) LTD.
- Hiock, Lee Boon. 1984. *Southeast Asian Affairs 1984*, Singapore. Institute of Southeast Asian Studies Heinemann Educational Books (Asia) LTD.
- Huat, Chua Beng. 1996. *Communitarian Ideology and Democracy in Singapore*. London. Routledge.
- Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson, 1976. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Massachusetts. Harvard University Press.

- Josey, Alex. 1982. *Lee Kuan Yew Perjuangan Untuk Singapura*. Jakarta, Gunung Agung.
- Mahmood, Norma (ed). 1994. *Rethinking Political Development in Southeast Asia*. Kuala Lumpur. University of Malaya Press.
- Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta. LP3ES.
- Mas'ood, Mohtar dan Colin MacAndrews (eds). 1997. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Mc Clelland, Charles A. 1971. *Ilmu Hubungan Internasional : Teori dan Sistem*. Jakarta. CV Rajawali Pers.
- Muttalib, Hussin. 1992. *Southeast Asian affairs 1992*, Singapore. Institute of Southeast Asian Studies Heinemann Educational Books (Asia) LTD.
- Poerwodarminto, WJS. 1976. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. PN Balai Pustaka.
- Quah, Jon S. T. 1977. *Southeast Asian Affairs 1977*. Singapore. Institute of Southeast Asian Studies. Heinemann Educational Books (Asia) LTD.
- Rodan, Garry. 1993. *Singapore Changes Guard: Social, Political And Economic Directions in the 1990s*. Melbourne: Longman Chesire.
- Singh, Bilveer. 1991. *Whither PAP's Dominance ? An Analysis of Singapore's 1991 General Elections*. Singapore: Pelanduk Publications.
- Surbakti, Ramlan. 1982. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana.
- Vasil, Raj. 1993. *Southeast Asian Affairs*. Singapore. Institute of Southeast Asian Studies Heinemann Educational Books (Asia) LTD.

JURNAL DAN SURAT KABAR

Antara, 10 Agustus 1991.

Antara, 12 Agustus 1991.

Bisnis Indonesia, 22 Agustus 1991.

Bisnis Indonesia, 31 Agustus 1991.

Bisnis Indonesia, 3 September 1991.

Business News, 28 November 1990.

Business News, 10 Mei 1993.

Editor, 8 Desember 1990.

Far Eastern Economic Review, *Asia 1991*, Year Book, 1991.

Far Eastern Economic Review, *Asia 1992*, Year Book, 1992.

Jurnal Ekuin, 12 November 1981.

Jurnal Ilmu politik, Nomor 1, PT AIPI, Jakarta, 1986.

Kompas, 12 November 1984.

Kompas, 17 November 1984.

Kompas, 18 November 1984.

Kompas, 22 Desember 1984.

Kompas, 24 Desember 1984.

Kompas, 27 April 1987.

Kompas, 8 Januari 1988.

Kompas, 16 Mei 1988.

Kompas, 9 Januari 1991.

Kompas, 26 Mei 1990.

Kompas, 15 Agustus 1991.

Kompas, 16 Agustus 1991.

Kompas, 22 Agustus 1991.

Kompas, 26 Agustus 1991.

Kompas, 29 Agustus 1991.

Kompas, 30 Agustus 1991.

Kompas, 31 Agustus 1991.

Kompas, 1 September 1991.

Kompas, 2 September 1991.

Kompas, 4 September 1991.

Kompas, 5 September 1991.

Kompas, 6 September 1991.

Media Indonesia, 19 Agustus 1991.

Merdeka, 27 Januari 1984.

Merdeka, 28 Januari 1984.

Merdeka, 8 Agustus 1990.

Merdeka, 31 Agustus 1991.

Merdeka, 2 September 1991.

Pelita, 3 Januari 1991.

Pelita, 15 Agustus 1991.

Pelita, 19 Agustus 1991.

Pelita, 22 Agustus 1991.

Pelita, 16 September 1991.

Regional Outlook, *Southeast Asia 1992-93*, ISEAS, Singapura, 1993.

Sinar Harapan, 12 Januari 1981.

Sinar Harapan, 8 Agustus 1984.

Sinar Harapan, 24 Desember 1984.

Suara Karya, 27 Mei 1988.

Suara Karya, 10 Agustus 1988.

Suara karya, 7 Desember 1990.

Suara Karya, 16 Agustus 1991.

Suara Karya, 31 Agustus 1991.

Suara Pembaruan, 5 Agustus 1991.

Suara Pembaruan, 1 September 1991.

Suara Pembaruan, 2 September 1991.

Suara Pembaruan, 3 September 1991.

Suara Pembaruan, 28 Agustus 1991.

Suara Pembaruan, 29 Agustus 1991.

Suara Pembaruan, 11 September 1991.

Tempo, 10 September 1988.

Tempo, 1 September 1990.

Tempo, 1 Desember 1990.

Tempo, 7 September 1991.

SKRIPSI

Lihardo, Vici Henry. 1994. *Partisipasi Politik Dalam Pembangunan Politik Ekonomi Singapura*, Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.

LAMPIRAN A

Calon-Calon Anggota Parlemen yang Bertanding dalam Pemilu Tahun 1991 di Singapura

Single Member Constituencies (SMC) :

No	Daerah	Calon PAP	Calon Oposisi dan Independen
1.	Ayer rajah	Tan Cheng Bock	Aziz Ibrahim (PKMS)
2.	Boon lay	Goh Che Wee	Samad Sahooman (PKMS)
3.	Braddel Heights	Goh Choon kang	Sin Kek Tong (SDP)
4.	Bukit Batok	Ong Chit Chung	Kwan Yue Keng (SDP)
5.	Bukit Gombak	Seet Ai Mee	Ling How Doong (SDP)
6.	Bukit Merah	Ch'ng Jit Koon	N. Gopalan (WP), Patrick Leong (Ind)
7.	Bukit Timah	Wang Kai Yuen	Zeng Guoyuan (WP), Mohd S Jan (Ind)
8.	Buona Vista	Peter Sung	Abdul karim Sattar (PKMS)
9.	Changi	Teo Chong Tee	Tan Bin Seng (WP)
10.	Chua Chu Kang	Low Seow Chay	Kwek Guan (Ind), Harry P.B. (Ind)
11.	Hougang	Tang Guan Seng	Low Thia Kiang (WP)
12.	Jurong	Ho Kah Leong	Moh Awang (PKMS)
13.	Leng Kee	Ow Chin Hock	G.K. Niddy (Ind)
14.	Mountbatten	Eugene yap	Yen Kim Khoon (Ind)
15.	Nee Son Central	Ng Pock Too	Cheo Chai Chen (SDP)
16.	Nee Soon South	Koh Lip Lin	Low Yong Nguan (SDP)
17.	Potong Pasir	Andy Gan	Chiam See Tong (SDP)
18.	Tanglin	Lew Syn Pau	Jimmy Tan (SDP), Gaguru T.M. (Ind)
19.	Ulu Pandan	Lim Boon Heng	Ashleigh Seow (SDP)
20.	Yuhua	Yu-Foo Yee Shoon	Toh Kim Kiat (SDP)

Group Representation Constituencies (GRC) :

No	Daerah	Calon PAP	Calon Oposisi
1.	Bedok	S. Jayakumar, Abdullah Tarmugi, Tan Soo Khoon, Arthur Beng	A. Balakrishnan, Tan Soo Phuan, Sim Say Chuan, John Baptist Lim (WP)
2.	Cheng San	Lee Yock Suan, S. Chandra Das, Heng Chiang Meng, Michael Lim	Pok Lee Chuan, Ch'ng Chin Siah, Gertrude M.D.G., Ch'ng Wee Hong (NSP)
3.	Eunos	Tay Eng Soon, Sidek Saniff, Chew Heng Ching, Charles Chong	Lee Siew Choh, Wee han Kim, Mohd Jufrie Mahmood, Maurice Neo (WP)
4.	Marine Parade	Goh Chok Tong, Othman Haron Eusofe, Lim Chee Onn, Mathias Yao	Suib Abdul Rahman, Theng Chin Beng, Aminudin Ami, K.S.M. Rajaseka(SJP)
5.	Tampines	Mah Bow Tan, Aline Wong, Yatiman Yusuf, Ch'ng Hee Kok	Ken Sunn, Sarry Hassan, Ong Seng Kwe, Rasiah Thagarajah (NSP)

Sumber : Bilveer Singh, *Whither PAP's Dominance: An Analysis of Singapore's 1991 General Elections*, Pelanduk Publications, Singapura, 1992., hal. 56.

Keterangan :

PAP = People's Action Party (Partai Aksi Rakyat)

NSP = National Solidarity Party (Partai Solidaritas Nasional)

SJP = Singapore Justice Party (Partai keadilan Singapura)

WP = Worker's Party (Partai Pekerja)

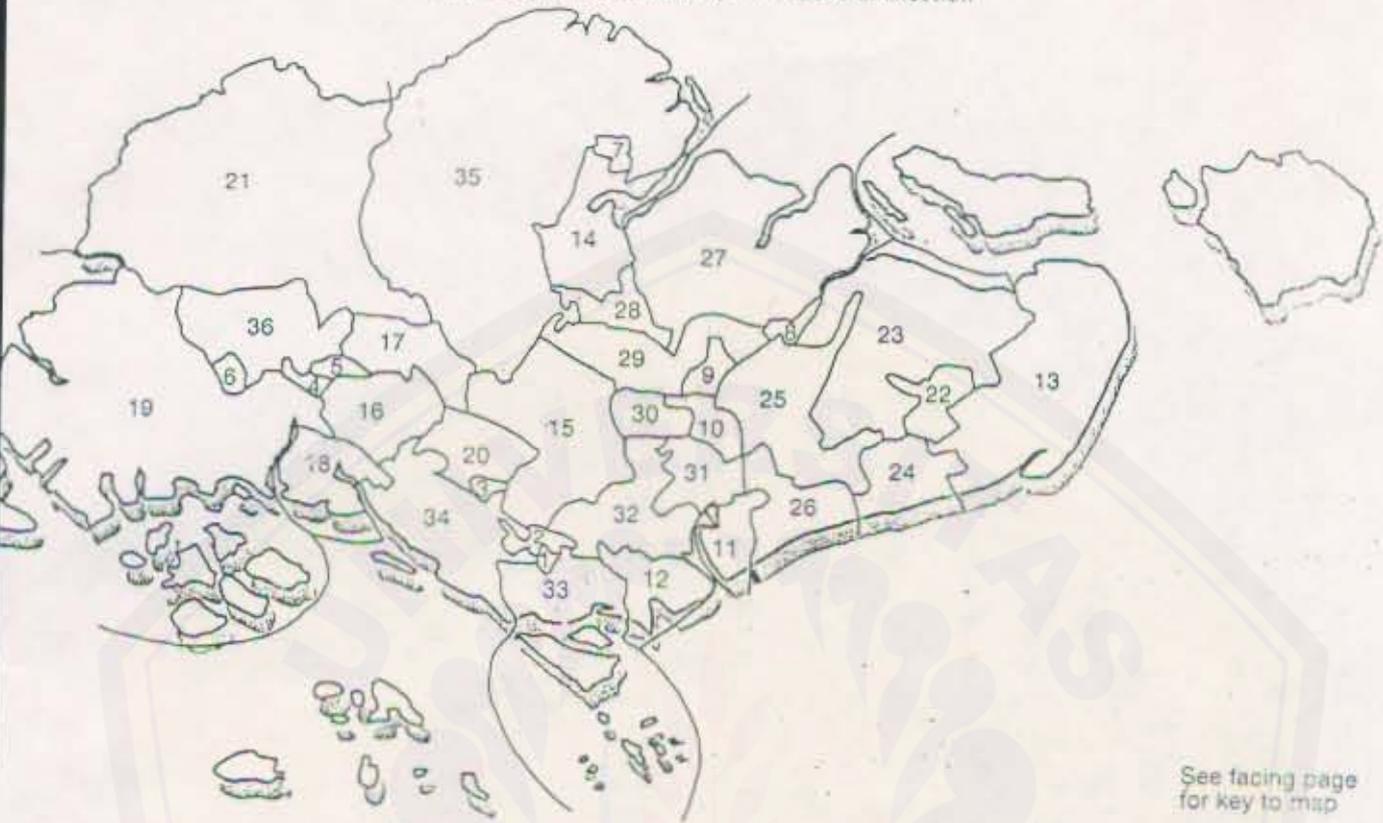
SDP = Singapore Democratic Party (Partai Demokratik Singapore)

PKMS = Partai Kebangsaan Melayu Singapura

Ind = Kelompok Independen

LAMPIRAN B

Map Electoral Boundaries, 1991 General Election



See facing page for key to map

List of Electoral Divisions, 1991 General Election

Single Member Constituencies		No. of Voters	Group Representation Constituencies		No. of Voters
1	Bukit Merah	11,885	22	Tampines	71,065
2	Leng Kee	18,821	23	Eunos	95,720
3	Buona Vista	14,681	24	Bedok	87,122
4	Yuhua	19,095	25	Aljunied	95,747
5	Bukit Batok	25,127	26	Marine Parade	74,527
6	Boon Lay	15,288	27	Cheng San	97,017
7	Nee Soon Central	27,878	28	Ang Mo Kio	74,772
8	Hougang	21,659	29	Thomson	75,332
9	Braddel Heights	27,704	30	Toa Payoh	63,801
10	Potong Pasir	19,413	31	Jalan Besar	82,516
11	Mountbatten	15,674	32	Kampong Glam	73,208
12	Kreta Ayer	17,022	33	Tanjong Pagar	87,372
13	Changi	25,372	34	Brickworks	102,167
14	Nee Soon South	28,449	35	Sembawang	121,964
15	Tanglin	16,644	36	Hong Kah	64,934
16	Bukit Timah	24,935			
17	Bukit Gombak	25,244			
18	Ayer Rajah	22,190			
19	Jurong	33,336			
20	Ulu Pandan	22,636			
21	Chua Chu Kang	24,333			

Sumber : Derek Da Cunha, *The Price of Victory: The 1997 Singapore's General Elections and Beyond*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1997., hal. 11.

LAMPIRAN C

Tabel
Singapore: Basic Economic Indicators, 1960, 1970, 1980, 1985, 1986

Item	Year				
	1960	1970	1980	1985	1986
Area (sq. km.)	581.5	586.4	617.8	620.5	621.7
Population (thousands)	1,646	2,075	2,414	2,558	2,586
-Annual change (%)	2.4	1.5	1.2	1.1	1.0
GDP (\$\$ millions, at current factor cost)	1,985.3	5,319.9	23,217.9	35,180.5	35,217.0
-Annual Change (%)	9.8	15.2	22.6	3.7	0.1
GDP (\$\$ millions, at 1968 factor cost)	2,122.3	5,107.0	12,160.5	16,301.5	16,611.2
-Annual Change (%)	8.7	9.4	10.2	1.8	1.9
Per capita GDP (\$\$, at 1968 factor cost)	1,289	2,461	5,037	6,373	6,424
Employment (thousands)	448.6	644.2	1,073.4	1,154.3	1,149.0
Unemployment rate (%)	4.9	6.0	3.0	4.1	6.5
Gross national saving (% of GNP)	n.a.	19.3	34.7	42.1	41.2
Gross fixed capital formation (\$\$ millions, at current market prices)	204.9	1,888.5	10,203.1	16,223.7	14,020.1
Total					
Private	145.1	1,521.2	7,710.2	10,393.6	8,224.8
Public	59.8	367.3	2,492.9	5,830.1	5,795.3
Total trade (\$\$ millions)	7,554.8	12,289.6	92,797.1	107,996.3	104,530.9
Exports	3,477.1	4,755.8	41,452.3	50,178.8	48,985.5
Imports	4,077.7	7,533.8	51,344.8	57,817.5	55,545.4
Official reserves (\$\$ millions)	n.a.	3,097.9	13,757.7	27,080.1	28,157.5
n.a. = not available					

Source: Ministry of Trade and Industry, *Economic Survey of Singapore: 1986* (Singapore, 1986) taken from *The Singapore Economy in 1986, Southeast Asian Affairs 1987*, Institute of Southeast Asian Studies Heinemann Educational Books (Asia) LTD, Singapore, 1977, hal. 291.